

REFORMULASI PEMBELAJARAN SEJARAH

Selama ini, tujuan pencapaian pembelajaran sejarah hanya terfokus pada masalah kecakapan akademik, sementara kesadaran sejarah dan nasionalisme siswa tidak pernah tersentuh dalam capaian tujuan pembelajaran. Padahal, tujuan pembelajaran sejarah di sekolah mencakup tiga tujuan utama yakni kesadaran sejarah, nasionalisme, dan kecakapan akademik.

Kehadiran buku ini diharapkan menjadi model dan solusi untuk reformulasi pembelajaran sejarah dengan meng-evaluasi pembelajaran sejarah secara komprehensif, melalui indikator-indikator yang telah dikembangkan dalam model ini. Paradigma dalam pembelajaran sejarah harus dikembalikan kepada substansi semula, bukan sekadar menekankan pada kemampuan yang sifatnya kognitif.

 Pujangga Press Yogyakarta

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Yogyakarta
Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 586168 Psw. 385.
Email: pujanggapress@yahoo.com

REFORMULASI PEMBELAJARAN SEJARAH

Prof. Dr. Lantip Diat Prasajo, M.Pd.
Prof. Dr. Aman, M.Pd.

REFORMULASI

Pembelajaran Sejarah

Prof. Dr. Lantip Diat Prasajo, M.Pd.
Prof. Dr. Aman, M.Pd.

 Pujangga Press Yogyakarta

Prof. Dr. Lantip Diat Prasajo, M.Pd.
Prof. Dr. Aman, M.Pd.

REFORMULASI

Pembelajaran Sejarah

Reformulasi Pembelajaran Sejarah

LANTIP DIAT PRASOJO & AMAN
Hak cipta@2022 pada pengarang

Diterbitkan oleh
Pujangga Press
Program Studi Pendidikan Sejarah,
Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Yogyakarta,
Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 586168 Psw. 385.
Email: pujanggapress@yahoo.com

Editor:
M. Nur Rokhman
Proofreader:
Rhoma Dwi Aria Yuliantri
Disain Cover:
Alifi Nur Prasetyo Nugroho
Disain Isi:
Nurtanio Agus Purwanto

Diterbitkan Oleh
Pujangga Press Yogyakarta
ISBN 978-602-99251-04

Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)

LANTIP DIAT PRASOJO & AMAN
Reformulasi Pembelajaran Sejarah/Lantip Diat
Prasojo & Aman Ed. 1, Cet. 1. Yogyakarta: Pujangga
Press, 2022 180 hlm, 21 cm

Bibliografi:
ISBN:-

1. Pembelajaran
2. Sejarah

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS ~ 5

Bab I

PENDAHULUAN ~ 9

Bab II

KONSEPSI DAN WAWASAN SEJARAH

A. Hakikat dan Makna Sejarah ~ 23

B. Cara Pandang Sejarah ~ 37

Bab III

KESADARAN SEJARAH DAN NASIONALISME

A. Kesadaran Sejarah (*Historical Consciousness*) ~ 43

B. Nasionalisme (*Nationalism*) ~ 48

C. Kecakapan Akademik (*Academic Skill*) ~ 59

Bab IV

REFORMULASI PEMBELAJARAN SEJARAH

A. Refleksi Kurikulum Sejarah: Dulu dan Sekarang ~ 63

B. Masalah Rekonstruksi dan “Dekonstruksi” ~ 69

C. Kebijakan PP Nomor 7 Tahun 2005 ~ 76

D. Karakteristik Mata Pelajaran Sejarah ~ 80

- E. Tujuan Pembelajaran Sejarah SMA ~ 82
- F. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ~ 85
- G. Paradigma Baru Pembelajaran Sejarah ~ 87

Bab V

ORIENTASI PEMBELAJARAN SEJARAH

- A. Kinerja Guru Sejarah ~ 106
- B. Materi Pelajaran Sejarah ~ 109
- C. Metode Pembelajaran Sejarah ~ 124
- D. Sarana Pembelajaran sejarah ~ 137
- E. Iklim Kelas ~ 139
- F. Sikap Siswa ~ 141
- G. Motivasi Belajar Sejarah ~ 144

Bab VI

PENUTUP ~ 155

DAFTAR PUSTAKA ~ 161

TENTANG PENULIS ~ 177

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan ke hadlirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga atas segala anugrahnya penulis berhasil menyelesaikan buku ini. Kehadiran buku ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan sejarah, dalam merajut formulasi dan substansi pembelajaran sejarah yang berlandaskan pada undang-undang sistem pendidikan nasional dan kurikulum sejarah, yang berlaku di berbagai jenjang pendidikan.

Realitas yang cukup mengawatirkan dalam pembelajaran sejarah dewasa ini adalah hilangnya ruh dan core value dalam proses pelebagaannya. Kegiatan belajar mengajar sejarah hanya dijadikan rutinitas yang hampa, tanpa makna, dan memberikan pandangan negatif bagi peserta didik yang memandang sejarah sebagai pelajaran yang menjenuhkan, dan tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Jelas ini adalah pandangan yang keliru, suatu pemikiran yang harus diarahkan bahwa sejarah memiliki makna yang sangat fundamental bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, perlu ada reformulasi pembelajaran sejarah dari pandangan dan realitas yang keliru, pada sebuah pemikiran dan implementasi yang substansi, mengacu pada tujuan sesungguhnya dalam pembelajaran sejarah. Berdasarkan kurikulum yang dikembangkan selama ini, pembelajaran sejarah setidaknya memiliki tiga dimensi tujuan yakni: meningkatkan kemampuan akademik (*academic skill*), memupuk kesadaran sejarah (*historical conciousness*), dan menanamkan semangat nasionalisme (*nationalism*) di kalangan peserta didik. Untuk ini, reformulasi pembelajaran sejarah mutlak diperlukan.

Agar pengembangan pembelajaran sejarah lebih bermakna dan terintegrasi dengan berbagai bidang keilmuan lainnya, sekurang-kurangnya terdapat berbagai bidang yang seyogianya mendapat perhatian. Pertama, materi pelajaran sejarah harus mampu mengembangkan integritas dan jati diri siswa, sehingga terbentuk karakter peserta didik yang memiliki sikap nasionalisme, kebersamaan dalam perbedaan, toleransi, empati, dan sikap-sikap positif lain yang berharga baik bagi didiknya, masyarakatnya, maupun bangsanya.

Kedua, untuk menjawab tantangan masa depan, sikap positif dan daya inovatif diperlukan agar bangsa Indonesia bukan sekedar menjadi konsumen ipteks, konsumen budaya, maupun penerima nilai-nilai luar secara pasif, melainkan memiliki keunggulan komparatif dalam hal penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau ipteks. Ketiga, peserta didik akan dapat dikembangkan sikap positifnya apabila proses belajar mengajar dilaksanakan secara terencana untuk meningkatkan dan membangkitkan upaya untuk kompetitif.

Keempat, dalam proses pengembangan motivasi belajarnya, peserta didik perlu dipacu kemampuan berfikirnya secara logis dan sistematis. Dalam proses belajar mengajar, pengajar harus memberi arahan yang jelas agar peserta didik dapat memecahkan suatu persoalan secara logis dan ilmiah.

Oleh karena itu peserta didik perlu dilibatkan secara aktif dalam proses belajar mengajar melalui pemberian tugas. Tugas tidak terlalu berat tetapi dapat memacu daya berfikir peserta didik.

Salah satu aspek yang penting adalah bagaimana peserta didik dapat terlatih berpikir secara deduktif-induktif. Artinya, dalam proses belajar mengajar peserta didik perlu diarahkan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mempelajari materi pelajaran melalui pengalaman.

Dengan cara seperti ini mereka dapat secara langsung dihadapkan pada suatu realita di lapangan. Seperti halnya peserta didik disediakan model pembelajaran yang bersifat khusus yang memberikan pengalaman, berdiskusi, penelitian, dan lain sebagainya yang diarahkan untuk menarik kesimpulan baik deduktif maupun induktif.

Oleh karena itu, peserta didik harus diberi pembelajaran yang berorientasi pada tujuan melalui kinerja guru yang baik, dimana mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Fenomena ini dalam hal-hal tertentu dapat membentuk semangat loyalitas, toleransi, dan kemampuan adaptabilitas yang tinggi.

Dalam hal pendekatan ini perlu diselaraskan dengan kegiatan proses belajar mengajar yang memberi peluang kepada mereka untuk berprakarsa secara dinamis dan

kreatif. Dengan demikian akan tercapai kualitas proses dan hasil belajar yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas, dengan melibatkan peserta didik secara maksimal melalui berbagai kegiatan yang konstruktif, sehingga pengalaman tersebut dapat mengantar mereka dalam suatu proses belajar yang kondusif dan kreatif.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan program pembelajaran sejarah yang berorientasi pada masa depan, melibatkan peran siswa secara penuh, dan membangun sikap kritis dalam pembelajaran sejarah, melalui reformulasi pada konsep dan hakikat tujuan pembelajaran sejarah yang sesungguhnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna, banyak kekurangan dan kelemahan baik teori maupun metodologi, ini dikarenakan kekurangan dan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan tulisan sederhana ini.

Yogyakarta, 1 Desember 2022

Prof. Dr. Lantip Diat Prasajo, M.Pd.

Prof. Dr. Aman, M.Pd.

Bab 1

PENDAHULUAN

Permasalahan serius yang dihadapi bangsa Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan, adalah masalah pembangunan dan pembinaan bangsa (*nation and character building*). Sebagai masyarakat majemuk, bangsa Indonesia harus menghadapi realitas sosial menyangkut keberagaman suku bangsa, ras, bahasa, agama, adat-istiadat, lapisan sosial, kesenjangan ekonomi, dan masalah-masalah sosial lain yang sangat kompleks. Dalam upaya membentuk dan menjaga keberagaman dalam keserasian itu diperlukan berbagai upaya yang dapat membina sikap-sikap positif yang saling menghormati, menghargai, mengakui eksistensi, dan kerja sama di antara berbagai keanekaragaman tersebut.

Pembelajaran sejarah, terutama pembelajaran sejarah nasional, adalah salah satu di antara sejumlah pembelajaran, mulai dari SD (Sekolah Dasar) sampai dengan SMA (Sekolah Menengah Atas), yang mengandung tugas menanamkan semangat berbangsa dan bertanah air. Tugas pokok pembelajaran sejarah adalah dalam rangka *character building* peserta didik. Pembelajaran sejarah akan membangkitkan kesadaran empati (*emphatic awareness*) di kalangan peserta didik, yakni sikap simpati dan toleransi terhadap orang lain yang disertai dengan

kemampuan mental dan sosial untuk mengembangkan imajinasi dan sikap kreatif, inovatif, serta partisipatif.

Kemampuan untuk mengidentifikasi diri secara empatik dengan orang lain itu merupakan kecakapan sosial yang merupakan kemampuan membentuk kebersamaan dan keterikatan atau solidaritas. Sedangkan toleransi akan mendidik siswa untuk memahami nilai-nilai yang tidak dianutnya meskipun bukan berarti tanpa pengetahuan atau kritik.

Kompetensi sosial menilai dengan kritis dengan mengakui validitas perbedaan adalah salah satu modal untuk menerima ketidaksamaan dalam kemajemukan. Toleransi juga dapat mendidik siswa untuk menanamkan sikap demokratis, berjiwa besar, dalam menghargai dan menghormati pendapat dan pikiran orang lain, disertai landasan tanggung jawab dan komitmen masyarakat bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tertuang pada Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dengan demikian, pendidikan nasional memiliki tujuan yang sangat luas tidak saja terkait dengan kecakapan akademik, melainkan pula kecakapan-kecakapan lain seperti religius, kepribadian, dan sosial. Dalam konsepsi pembelajaran sejarah, tujuan-tujuan itu lebih terwujud secara spesifik seperti kesadaran sejarah, nasionalisme, patriotisme, wawasan humaniora, di samping kecakapan akademik, yang sampai sekarang belum disosialisasikan secara intensif sehingga substansi utama dari kurikulum tersebut kurang mencapai sasaran. Untuk mewujudkan itu semua, adalah mutlak diperlukan usaha peningkatan kualitas pendidikan nasional yang dilakukan secara terus-menerus.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan serta berbagai faktor yang berkaitan dengannya, dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Program peningkatan kualitas pendidikan adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional secara substantif, yang diwujudkan dalam kompetensi yang utuh pada diri peserta didik, yaitu meliputi kompetensi akademik atau modal intelektual, kompetensi sosial atau modal sosial dan kompetensi moral atau modal moral (Zamroni, 2005: 1). Ketiga modal dasar ini merupakan kekuatan yang diperlukan oleh setiap bangsa agar mampu bersaing dalam era global.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti halnya pengembangan dan penyempurnaan kurikulum,

pengembangan materi pembelajaran, perbaikan sistem evaluasi, pengadaan buku dan alat-alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan mutu pimpinan sekolah (Depdiknas, 2001: 3). Namun demikian, upaya tersebut belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Kualitas pendidikan dipengaruhi beberapa faktor, seperti: guru, siswa, pengelola sekolah (Kepala Sekolah, karyawan dan Dewan/Komite Sekolah), lingkungan (orang-tua, masyarakat, sekolah), kualitas pembelajaran, dan kurikulum (Edy Suhartoyo. 2005: 2). Hal serupa juga disampaikan oleh Djemari Mardapi (2003 a: 8) bahwa usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian.

Meningkatnya kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Usaha peningkatan kualitas pendidikan akan berlangsung dengan baik manakala didukung oleh kompetensi dan kemauan para pengelola pendidikan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus menuju ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, inovasi pendidikan secara berkesinambungan dalam program pendidikan termasuk program pembelajaran sejarah merupakan tuntutan yang harus segera dilaksanakan.

Sistem pembelajaran sebagai bagian integral dari sistem kegiatan pendidikan, merupakan fenomena yang harus diperbaiki dan dikembangkan oleh pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan. Hal ini menyangkut banyak

hal seperti kurikulum, metode, media pembelajaran, materi pembelajaran, kualitas pendidik, evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya sehingga tercipta sistem pembelajaran yang baik dan berorientasi ke masa depan.

Dengan demikian, perlu dikembangkan prinsip-prinsip belajar yang berorientasi pada masa depan, dan menjadikan peserta didik tidak hanya sebagai objek belajar tetapi juga subjek dalam belajar. Pendidikan tidak lagi berpusat pada lembaga atau pengajar yang hanya akan mencetak para lulusan yang kurang berkualitas, melainkan harus berpusat pada peserta didik sebagai pusat belajar dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersikap kreatif dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi intelektual yang dimilikinya.

Sistem pembelajaran yang baik seharusnya dapat membantu peserta didik mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Meskipun proses belajar mengajar tidak dapat sepenuhnya berpusat pada peserta didik seperti pada pendidikan terbuka, tetapi yang perlu dicermati adalah bahwa pada hakekatnya peserta didiklah yang harus belajar dan mengembangkan diri. Dengan demikian proses belajar mengajar perlu berorientasi pada kebutuhan dan kemampuan siswa.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar harus dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berguna bagi peserta didik. Pengajar perlu memberikan bermacam-macam suasana belajar yang memadai untuk materi yang disajikan, dan menyesuaikannya dengan kemampuan serta karakteristik peserta didik sebagai subjek-didik.

Mengajar merupakan suatu aktivitas profesional yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi dan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan-keputusan (Winata Putera, 1992 : 86). Sekarang ini pengajar lebih dituntut untuk berfungsi sebagai pengelola proses belajar mengajar yang melaksanakan tugas yaitu dalam merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengevaluasi.

Keberhasilan dalam belajar mengajar sangat tergantung pada kemampuan pengajar dalam merencanakan, yang mencakup antara lain menentukan tujuan belajar peserta didik, bagaimana caranya agar peserta didik mencapai tujuan tersebut, sarana apa yang diperlukan, dan lain sebagainya. Dalam hal mengatur, yang dilakukan pada waktu implementasi apa yang telah direncanakan dan mencakup pengetahuan tentang bentuk dan macam kegiatan yang harus dilaksanakan, bagaimana semua komponen dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Pengajar bertugas untuk mengarahkan, memberikan motivasi, dan memberikan inspirasi kepada peserta didik untuk belajar. Memang benar tanpa pengarahan pun masih dapat juga terjadi proses belajar, tetapi dengan adanya pengarahan yang baik dari pengajar maka proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan dalam hal mengevaluasi, termasuk penilaian akhir, hal ini dimaksudkan apakah perencanaan, pengaturan, dan pengarahannya dapat berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki.

Dalam proses belajar mengajar, pengajar perlu mengadakan keputusan-keputusan, misalnya metode apakah

yang perlu dipakai untuk mengajar mata pelajaran tertentu, alat dan media apakah yang diperlukan untuk membantu peserta didik membuat suatu catatan, melakukan praktikum, menyusun makalah diskusi, atau cukup hanya dengan mendengar ceramah pengajar saja.

Dalam proses belajar mengajar, pengajar selalu dihadapkan pada bagaimana melakukannya, dan mengapa hal tersebut perlu dilakukan. Begitu juga dalam hal evaluasi atau penilaian dihadapkan pada bagaimana sistem penilaian yang digunakan, bagaimana kriterianya, dan bagaimana pula kondisi peserta didik sebagai subjek belajar yang memerlukan nilai itu.

Selama ini, pembelajaran sejarah di sekolah kurang begitu diminati oleh peserta didik. Pelajaran sejarah dianggap sebagai pelajaran yang membosankan karena seolah-olah cenderung "hapalan". Bahkan kebanyakan siswa menganggap bahwa pelajaran sejarah tidak membawa manfaat karena kajiannya adalah masa lampau. Tidak memiliki sumbangan yang berarti bagi dinamika dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pelajaran sejarah hanya dianggap sebagai pelajaran pelengkap, apalagi mata pelajaran ini tidak di UN kan.

Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang semakin menyempitkan gerak langkah pembelajaran sejarah, yakni dengan semakin kecilnya porsi jam pelajaran sejarah di sekolah. Tidak mengherankan jika prestasi belajar sejarah siswa juga cenderung kurang memuaskan.

Sikap siswa yang cenderung apatis terhadap pelajaran sejarah tentu diakibatkan oleh banyak faktor baik intern maupun ekstern. Faktor ekstern misalnya

terkait dengan penyajian materi pelajaran sejarah yang cenderung rentetan fakta yang cenderung membosankan, metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan substansi materi pelajaran sejarah, kurangnya sarana pembelajaran yang mendukung, di samping kinerja guru sejarah yang merupakan faktor utama cenderung belum memuaskan, dan hal itu berdampak pula pada kurang kondusifnya proses pembelajaran sejarah. Sedangkan faktor internal meliputi sikap siswa terhadap pelajaran cenderung kurang positif, begitu juga dengan minat dan motivasi yang cenderung rendah.

Dalam rangka pengembangan pembelajaran sejarah agar lebih bermakna dan terintegrasi dengan berbagai bidang keilmuan lainnya, sekurang-kurangnya terdapat berbagai bidang yang seyogiannya mendapat perhatian. Pertama, materi pelajaran sejarah harus mampu mengembangkan integritas dan jati diri siswa, sehingga terbentuk karakter peserta didik yang memiliki sikap nasionalisme, kebersamaan dalam perbedaan, toleransi, empati, dan sikap-sikap positif lain yang berharga baik bagi didiknya, masyarakatnya, maupun bangsanya.

Materi pelajaran sejarah memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ikut bertanggungjawab dalam pengembangan materi pelajaran sejarah harus bersinergi satu sama lain baik antara ahli sejarah, sejarawan, ahli pendidikan sejarah, LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan), Pusat Kurikulum, Pusat Perbukuan, dalam rangka menghasilkan materi pelajaran sejarah yang

future oriented dalam membangun sebuah peradaban yang luhur.

Kedua, untuk menjawab tantangan masa depan, sikap positif dan daya inovatif diperlukan agar bangsa Indonesia bukan sekedar menjadi konsumen IPTEK, konsumen budaya, maupun penerima nilai-nilai luar secara pasif, melainkan memiliki keunggulan komparatif dalam hal penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) atau IPTEK. Oleh karenanya, kreativitas perlu dikembangkan melalui penciptaan iklim kelas yang kondusif di mana pengajar mendorong vitalitas dan kreativitas peserta didik untuk mengembangkan diri. Peserta didik perlu diberi kesempatan untuk belajar dengan daya intelektualnya sendiri, melalui proses rangsangan-rangsangan baik yang berupa pertanyaan-pertanyaan maupun penugasan, sehingga peserta didik dapat melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang dan dapat menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

Ketiga, peserta didik akan dapat dikembangkan sikap positifnya apabila proses belajar mengajar dilaksanakan secara terencana untuk meningkatkan dan membangkitkan upaya untuk kompetitif. Oleh karena itu, proses belajar mengajar yang memberi peluang kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas secara kompetitif perlu disosialisasikan, kemudian juga perlu adanya penghargaan yang layak kepada mereka yang berprestasi. Hal ini akan berdampak positif terhadap terbentuknya rasa percaya diri pada peserta didik. Pada gilirannya, pengalaman ini selanjutnya dapat menjaga proses pembentukan kemandirian.

Dalam hal ini, para peserta didik juga perlu dilibatkan dalam proses belajar mengajar yang memberikan pengalaman bagaimana peserta didik bekerja sama dengan peserta didik yang lain seperti dalam hal berdiskusi, membuat artikel kelompok, pengamatan, wawancara, dan lain sebagainya untuk dikerjakan secara kelompok. Pengalaman belajar seperti ini selanjutnya akan dapat membentuk sikap kooperatif dan ketahanan para peserta didik untuk bersaing dengan pengalaman nyata untuk dapat menghargai segala kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Keempat, dalam proses pengembangan motivasi belajarnya, peserta didik perlu dipacu kemampuan berfikirnya secara logis dan sistematis. Dalam proses belajar mengajar, pengajar harus memberi arahan yang jelas agar peserta didik dapat memecahkan suatu persoalan secara logis dan ilmiah. Oleh karena itu peserta didik perlu dilibatkan secara aktif dalam proses belajar mengajar melalui pemberian tugas. Tugas tidak terlalu berat tetapi dapat memacu daya berfikir peserta didik.

Salah satu aspek yang penting adalah bagaimana peserta didik dapat terlatih berpikir secara deduktif-induktif. Artinya, dalam proses belajar mengajar peserta didik perlu diarahkan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mempelajari materi pelajaran melalui pengalaman.

Dengan cara seperti ini mereka dapat secara langsung dihadapkan pada suatu realita di lapangan. Seperti halnya peserta didik disediakan model pembelajaran yang bersifat khusus yang memberikan peng-

alaman, berdiskusi, penelitian, dan lain sebagainya yang diarahkan untuk menarik kesimpulan baik deduktif maupun induktif.

Kelima, peserta didik harus diberi pembelajaran yang berorientasi pada tujuan melalui kinerja guru yang baik, di mana mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Fenomena ini dalam hal-hal tertentu dapat membentuk semangat loyalitas, toleransi, dan kemampuan adaptabilitas yang tinggi.

Dalam hal pendekatan ini perlu diselaraskan dengan kegiatan proses belajar mengajar yang memberi peluang kepada mereka untuk berprakarsa secara dinamis dan kreatif. Dengan demikian akan tercapai kualitas proses dan hasil belajar yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas, dengan melibatkan peserta didik secara maksimal melalui berbagai kegiatan yang konstruktif, sehingga pengalaman tersebut dapat mengantar mereka dalam suatu proses belajar yang kondusif dan kreatif.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan program pembelajaran sejarah yang berorientasi pada masa depan, melibatkan peranan siswa secara penuh, dan membangun sikap kritis dalam pembelajaran sejarah. Bagi kalangan peserta didik, terlebih di tingkat SMA, maka sikap kritis dalam pembelajaran sejarah adalah tujuan yang hendak dicapai sebagaimana dijabarkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar kurikulum sejarah. Dengan demikian, kesan bahwa pembelajaran sejarah hanyalah sebagai pelajaran hapalan, perlu segera dihilangkan.

Pembelajaran sejarah kritis dan substantif harus segera dilembagakan di sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memacu daya intelektualitas siswa menyangkut peristiwa-peristiwa lampau yang dibaca dalam kaca mata kekinian. Pembelajaran kritis dan substantif harus menyentuh wilayah intelektual siswa, dan mampu membangun pemikiran interpretatif tentang peristiwa sejarah terutama menyangkut peristiwa-peristiwa yang faktanya masih bersifat lunak.

Di samping itu, ada yang lebih penting. Bagaimana pembelajaran sejarah dapat menumbuhkan sikap nasionalisme, patriotisme, kesadaran sejarah, wawasan humaniora, di samping yang secara umum tujuan pendidikan untuk meningkatkan kecakapan akademik, sosial, religius, dan kepribadian.

Setiap kegiatan, baik pendidikan maupun non pendidikan, seharusnya diikuti dengan kegiatan evaluasi. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk menilai apakah suatu program terlaksana sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan atau belum. Berdasarkan hasil evaluasi akan dapat diketahui hal-hal yang telah dicapai, apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Setelah itu kemudian diambil keputusan apakah program tersebut diteruskan, direvisi, dihentikan, atau dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan tujuan, sasaran dan alternatif baru yang sama sekali berbeda dengan format sebelumnya. Agar dapat menyusun program yang lebih baik, maka hasil evaluasi program sebelumnya dapat dijadikan sebagai acuan pokok.

Ditinjau dari sasaran yang ingin dicapai, evaluasi bidang pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yakni evaluasi yang bersifat makro dan bersifat mikro. Evaluasi makro sasarannya adalah program pendidikan yang direncanakan dan tujuannya adalah untuk memperbaiki bidang pendidikan.

Sedangkan evaluasi mikro sering digunakan di level kelas. Di sini, sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggungjawabnya adalah guru untuk sekolah atau dosen untuk perguruan tinggi (Djemari Mardapi, 2000: 2). Guru memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan program pembelajaran, sedangkan sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru, sehingga tujuan pembelajaran yang utama dapat tercapai.

Dalam pada itu, salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah melalui program pembelajaran, dan evaluasi merupakan salah satu faktor penting program pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, pelaksanaan evaluasi harus menjadi bagian penting dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Di samping evaluasi berguna bagi pimpinan sekolah sebagai upaya untuk memotret sistem pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya, evaluasi juga dapat menumbuhkan minat dan motivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi, dan juga untuk mendorong guru agar lebih meningkatkan kinerja dalam berkarya sebagai pendidik profesional. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya terfokus pada penilaian hasil belajar semata, melainkan

pula perlu didasarkan pada penilaian terhadap *input* maupun proses pembelajaran itu sendiri.

Dalam konsepsi ini, optimalisasi sistem evaluasi mempunyai dua makna, yakni sistem evaluasi yang memberikan informasi yang optimal, dan manfaat yang dicapai dari evaluasi tersebut (Djemari Mardapi, 2003 a: 12). Manfaat utama dari pelaksanaan evaluasi pendidikan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, dilaksanakannya evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran diharapkan akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran berikutnya yang tentunya akan meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya.

Bab II

KONSEPSI DAN WAWASAN SEJARAH

A. Hakikat dan Makna Sejarah

Seseorang yang mempelajari sejarah, harus memahami hubungkait antara sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai pendidikan. Hubungkaitnya antara konsep dasar sejarah dan pelajaran sejarah di sekolah, dijelaskan dalam Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa lampau berdasarkan metode dan metodologi tertentu. Terkait dengan pendidikan di sekolah dasar hingga sekolah menengah, pengetahuan masa lampau tersebut mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian peserta didik (2006: 523).

Pada umumnya orang memakai istilah sejarah untuk menunjuk cerita sejarah, pengetahuan sejarah, gambaran sejarah, yang kesemuanya itu sebenarnya adalah sejarah dalam arti subjektif. Sejarah dalam arti subjektif ini merupakan suatu konstruk, ialah bangunan yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian atau cerita.

Uraian atau cerita itu merupakan suatu kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta terangkakan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses maupun struktur. Kesatuan itu menunjukkan koherensi, artinya pelbagai unsur bertalian satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Fungsi unsur-unsur itu saling menopang dan saling tergantung satu sama lain (Sartono Kartodirdjo, 1992: 15).

Sejarah dalam arti objektif menunjuk kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri, ialah peristiwa sejarah dalam kenyataannya. Kejadian itu sekali terjadi tidak dapat diulang atau terulang lagi. Bagi orang yang berkesempatan mengalami suatu kejadianpun sebenarnya hanya dapat mengamati dan mengikuti sebagian dari totalitas kejadian itu, jadi tidak mungkin mempunyai gambaran umum seketika itu.

Keseluruhan proses itu berlangsung terlepas dari subjek manapun juga, jadi maksudnya adalah objektif dalam arti tidak memuat unsur-unsur subjek (pengamat atau pencerita) (Sartono Kartodirdjo, 1992: 15). Kesimpulan akhir Sartono Kartodirdjo (1992: 498), menegaskan bahwa sejarah merupakan cerita tentang pengalaman kolektif suatu komunitas atau *nation* di masa lampau.

Dalam al-Muqaddimah Ibn Khaldun (Ahmad Syafii Maarif, 1997: 2), terdapat dua sisi sejarah yang perlu diperhatikan, yakni sisi luar dan sisi dalam. Pada sisi luar sejarah itu tidak lebih dari pada perputaran kekuasaan yang silih berganti di masa lampau. Tetapi pada sisi dalamnya sejarah adalah suatu penalaran kritis (nazar) dan kerja yang cermat untuk mencari kebenaran; suatu

penjelasan yang cerdas tentang sebab-sebab dan asal-usul segala sesuatu; pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi.

Sejarah dipandang memiliki fungsi dapat mengajar *man of action* (manusia pelaku) tentang bagaimana orang lain bertindak dalam keadaan-keadaan khusus, pilihan-pilihan yang dibuatnya, dan tentang keberhasilan dan kegagalan mereka. Sejarah menjelaskan kondisi dan situasi yang tepat bagi seorang negarawan untuk melaksanakan tugas kenegaraannya secara tepat pula. Tanpa mengenal sejarah seorang negarawan atau siapa saja yang memiliki tanggung jawab umum akan kehilangan arah dan acuan dalam melaksanakan kebijakannya. Sebagaimana dikatakan Allan Nevin (Ahmad Syafii Maarif, 2006: 29), bahwa sejarah adalah jembatan penghubung masa silam dan masa kini, dan sebagai petunjuk ke arah masa depan.

Menurut pandangan Kuntowijoyo (1994: 18), sejarah dimaksudkan sebagai rekonstruksi masa lalu dan yang direkonstruksi sejarah adalah apa saja yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami manusia. Sementara itu R. Moh. Ali (1965: 7-8), menjelaskan bahwa sejarah mengandung arti yang mengacu pada hal-hal: 1) perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam kenyataan sekitar kita; 2) cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa realitas tersebut; 3) ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut.

Hal serupa disampaikan sejarawan Sidi Gazalba (1966: 11) yang mengemukakan bahwa sejarah adalah

gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan, yang memberi pengertian dan kepehaman tentang apa yang telah berlalu itu. Pendapat ini didukung oleh Taufik Abdullah (2001: 98) yang mengatakan bahwa sejarah adalah hasil dari sebuah usaha untuk merekam, melukiskan dan menerangkan peristiwa masa lalu.

Edward Hallet Carr (1982: 30) dalam bukunya, *What is History* menyebutkan “ *History is a continuous process of interaction between the historian and the his facts, and unending dialogue between the present and the past*”. (Sejarah adalah sebuah proses interaksi tanpa henti antara sejarawan dan fakta-faktanya, sebuah dialog yang tak berujung antara masa sekarang dan masa lampau. Lain halnya dengan G.J Renier (1997: 81) yang mengatakan bahwa sejarah adalah cerita mengenai pengalaman orang yang berada di dalam masyarakat yang beradab.

Bagi kalangan sejarawan dan pemerhati sejarah, suatu peristiwa harus diterangkan secara lebih jauh dan lebih mendalam mengenai bagaimana terjadinya, latar belakang kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga kulturalnya. Hanya menceritakan bagaimana terjadinya suatu peristiwa, belum memberikan eksplanasi secara tuntas dan lengkap, karena sejarawan adalah wisatawan profesional dalam dunia lampau (Sartono Kartodirdjo, 1992: 27).

Oleh karena itu, seorang sejarawan sejatinya harus mampu menunjukkan pola-pola perkembangan, konteks

dan kondisi peristiwa, serta akibatnya, yang kesemuanya sukar diketahui dan dipahami oleh semua orang yang tidak mengalami sendiri peristiwa-peristiwa itu. Walaupun sejarawan pada umumnya termotivasi oleh rasa cintanya pada masa lampau dengan segala keunikannya serta oleh hasratnya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih kongkret tentang peristiwa, pelaku, dan situasi sejarah, hasil kerjanya pada dasarnya ditujukan untuk orang-orang dari masanya sendiri. Perhatiannya terhadap masa lampau, terutama pada periode yang ditandai oleh perubahan yang pesat dan revolusioner, ketidakpastian yang bersifat konstan, dan krisis, terkait dan sebanding dengan keterlibatan emosional mereka dengan masa kini dan dengan pencarian mereka akan berbagai jawaban terhadap fenomena dan soal-soal yang melingkupi mereka (Soedjatmoko, 1995: 385).

Dalam konteks akademis, sejarah merupakan suatu bidang ilmu atau bidang studi yang memerlukan imajinasi kesejarahan yang kritis dalam pengkajiannya. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan sejarah dalam *setting historis* yang fenomenologis. Sejarah tidak selalu menyangkut "*past event*" atau peristiwa-peristiwa masa lampau, tetapi juga berhubungan atau menyangkut peristiwa-peristiwa mutakhir (*current events*) (Suyatno Kartodirdjo, 2000: 31).

Dalam konteks ini, sejarawan yang bertindak sebagai duta dari masa lampau tidak hanya memberikan informasi tentang negeri pada jaman tertentu, tetapi juga kondisi dan situasinya, sistem ekonomi, sosial, dan politik, serta seluruh fenomena kehidupan masyarakat dalam pelbagai aspeknya. Dengan pelbagai pendekatan

dalam metodenya, sejarawan menjalankan tugasnya dalam pelbagai lapangan. Hasilnya dapat memperdalam pengertian di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Bagi seorang sejarawan sangatlah penting untuk menyadari bahwa wujud dan isi cita-cita serta nilai-nilai bangsanya tidak bisa dimengerti tanpa refleksi kepada sejarah dan pengalaman bangsa itu. Oleh sebab itu, kesadaran sejarah merupakan orientasi intelektual, suatu sikap jiwa yang perlu untuk memahami secara tepat paham kepribadian nasional (Sartono Kartodirdjo, 1990: 63). Kesadaran sejarah sangat diperlukan sebagai suatu cara untuk melihat realitas sosial dengan segala permasalahannya bukan saja sebagai masalah-masalah moral yang memerlukan jawaban ya atau tidak, putih atau hitam, melainkan agar manusia mampu melihat masalah-masalah dinamika sosial termasuk segi moralnya, sebagai suatu masalah-masalah historis yang memerlukan cara-cara penghadapan historis pula (Soedjatmoko, 1983: 69).

Sejarawan harus bisa menjangkau bagian dalam peristiwa sejarah atau pikiran-pikiran yang melatarbelakanginya. Dalam konteks ini, (Collingwood, 1973: 10) menekankan keistimewaan yang dapat dilakukan oleh sejarawan terhadap objeknya yaitu dengan jalan *re thinking them in his own mind* (memikirkan kembali dalam pikiran sejarawan sendiri).

Dengan ini, seorang sejarawan harus mampu meneropong pikiran pelaku sejarah dengan cara mencoba menghidupkan kembali pikiran-pikiran pelaku sejarah tersebut dalam pikirannya sendiri. Dengan kata lain,

secara imajiner sejarawan harus mencoba menempatkan dirinya ke dalam pelaku-pelaku sejarah yang bersangkutan.

Ini dianggap merupakan unsur pokok dalam “cara berpikir historis” (*historical thinking*) yang menjadi dasar dari “cara menerangkan dalam sejarah” (*historical explanation*). Dengan demikian, (Widja, 1989: 123) sejarawan dianggap perlu memperhatikan prinsip koligasi dalam menerangkan peristiwa yaitu suatu prosedur menerangkan suatu peristiwa dengan jalan menelusuri hubungan-hubungan intrinsiknya dengan peristiwa-peristiwa lainnya dan menentukan tempatnya dalam keseluruhan peristiwa sejarah.

Dengan demikian, akan dapat ditentukan langkah nyata untuk memajukan usaha merekonstruksikan sejarah. Dengan pengetahuan masa lampau yang benar dan kongkret, akan dapat diwujudkan identitas sejarah. Usaha untuk mencari relevansi dapat diartikan bahwa sejarah harus menjadi bagian dari pengetahuan kolektif yang mampu menjelaskan kesinambungan dan perubahan masyarakat untuk kepentingan pembangunan. Jelaslah bahwa penulisan sejarah, dewasa ini tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masa kini beserta masalah-masalahnya baik dalam bidang politik maupun dalam lapangan ekonomi atau sosial (Frederick dan Soeri Soeroto, 1982: 66).

Sejarah sebagai disiplin ilmu yang otonom, perlu dikembangkan menurut pola kecenderungan ilmu sejarah itu sendiri. Penulisan sejarah konvensional, yang menyusun ceritera sejarah hanya secara deskriptif-naratif belaka, hanya menerangkan bagaimana suatu peristiwa terjadi, dan tidak menyentuh substansinya. Supaya mendapat

gambaran yang lebih lengkap mengenai realitas tersebut, orang perlu mendekati peristiwa sejarah dari pelbagai segi, yang disebut pendekatan multidimensional dan sudah tentu memerlukan metode dari pelbagai ilmu yang disebut metode *Interdisipliner* (Sartono Kartodirdjo, 1982: vi-vii).

Dalam konsep ini metodologinya telah disempurnakan untuk menggarap pelbagai permasalahan yang kompleks. Dengan meminjam konsep dan teori dari ilmu-ilmu sosial yang lain, alat analitik dan kerangka konseptualnya menjadi sempurna. Bukti dari itu semua adanya pertumbuhan produksi yang besar dalam penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 1995: 19).

Sementara itu orang bertanya apakah sejarah itu perlu. Untuk membahas dan menjawab pertanyaan ini, perlulah kiranya historis-kritis menelaahnya dari *diakronisme* ilmu sejarah itu. Orang tidak akan belajar sejarah jika tidak ada manfaatnya. Kenyataan bahwa sejarah terus ditulis orang di semua peradaban dan di sepanjang waktu, sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa sejarah itu perlu (Kuntowijoyo, 1995: 19).

Sejarah tidak hanya sekedar serangkaian peristiwa yang *mandeg* dan hanya menjadi ceritera pelipur lara, ceritera pembangkit semangat untuk “kebesaran diri”, melainkan lebih dari itu, bahwa sejarah terjadi di dalam “suatu lingkaran waktu yang satu”, yang selalu bergerak tanpa henti. Oleh karena itu waktu dapat dikatakan selalu berada di dalam kekinian. Dalam kekiniannya yang selalu bergerak itulah waktu dapat terbagi menjadi tiga masa: yaitu waktu kini masa lampau, waktu kini sekarang, dan waktu kini yang akan datang (Anhar Gonggong, 1996: 4).

Sejarah sebagai bagian masa dari gerak waktu tanpa henti, memiliki dinamika yang menggerakkan. Generasi yang hidup dalam “waktu kini-sekarang” mempunyai kedudukan strategis. Kedudukan strategis yang dimaksud adalah generasi dalam “waktu kini-sekarang”, adalah membangun kelangsungan hidup dirinya dengan mengacu kepada “waktu kini-masa lampau” dan sekaligus berperan dalam merancang kehidupan generasi yang hidup di dalam “waktu kini-yang akan datang”.

Dalam kajian ilmiahnya, muncullah kontroversi apakah sejarah itu sebagai ilmu atau seni. Mungkin pendirian moderat yang mengatakan bahwa sejarah mengandung kedua dimensi ilmu dan seni pantas untuk dipertahankan. Dari sudut metode pengumpulan dan penafsiran data, sejarah tidak berbeda dengan metode ilmu pada umumnya (Juliet Gardiner, 1988: 69-72). Tetapi dalam teknik penyusunan laporan, unsur imajinasi sejarawan memegang peranan penting, dan tentu saja bukanlah imajinasi liar. Imajinasi historis adalah imajinasi yang dikontrol oleh hukum-hukum logika berdasarkan fakta. Karena imajinasi inilah karya sejarah dirasakan juga sebagai karya sastra.

Kemudian dalam masalah bahasa, bahasa sejarah lebih dekat kepada bahasa novel daripada bahasa teks ilmiah. Hal ini memang diperlukan, sebab bila tidak, siapa yang akan betah membaca karya sejarah. Sekalipun demikian, laporan sejarah senantiasa menuntut akurasi dalam bingkai disiplin historis. Tinggi rendahnya kualitas sebuah karya sejarah akan sangat tergantung kepada akurasi dan disiplin seorang sejarawan dalam membangun laporannya. Dalam historiografi, dikenal istilah

sejarah yang baik dan sejarah yang papa (*poor history*). Yang paling repot adalah “sejarah yang terburuk sekalipun tetaplah ia sejarah”, tulis Renier (1995: 22).

Seseorang yang mempelajari sejarah, harus memiliki cara pandang yang benar tentang sejarah. Sejarah tidak saja serangkaian fakta yang kering dan mati, melainkan memiliki makna yang dalam bagi kehidupan manusia.

Mata pelajaran sejarah bertujuan agar peserta didik memiliki beragam kemampuan. Kemampuan yang dimaksud antara lain: membangun kesadaran tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan; melatih daya kritis untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan; menumbuhkan apresiasi dan penghargaan terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau; menumbuhkan pemahaman terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang; dan menumbuhkan kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional.

Selanjutnya konsepsi wawasan, berasal dari kata “wawas” yang berarti pandangan, tinjauan, dan tanggapan indrawi atau sebuah konsepsi cara pandang (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2000: 1271). Oleh karena itu wawasan kesejarahan dapat diartikan sebagai pandangan, tinjauan, dan tanggapan terhadap makna kesejarahan.

Wawasan itu sendiri memuat dua gejala, yakni sebagai cara pandang dan sebagai hasil cara pandang. Sartono Kartodirdjo (1992: 206), bahwa wawasan merupakan kerangka pikiran, kerangka referensi, pandangan atau perspektif dalam mengantisipasi fenomena kehidupan. Di sini wawasan atau perspektif berbeda-beda terminologinya, sesuai dengan cara pandang yang dipakainya.

Dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu sosial pada khususnya, setiap disiplin memiliki referensi atau kerangka konseptual tertentu, sehingga perspektif atau wawasannya sesuai dengan kerangkanya itu. Dengan demikian, cara memandang dan hasil cara memandang terhadap fenomena antara disiplin yang satu dengan disiplin yang lain berbeda, selaras dengan kerangkanya itu.

Perspektif sosiologis terbentuk berdasarkan kerangka konsep sosiologis, terutama yang ditampilkan struktur atau pola hubungan sosial. Dalam perspektif ilmu politik, yang tampak adalah struktur kekuasaan dan pola distribusi kekuasaan. Sedangkan wawasan sejarah adalah cara memandang dan hasil cara memandang berdasarkan paradigma sejarah.

Banyak ahli sejarah yang mengakui akan arti dan makna kesejarahan, meskipun dalam perspektifnya mereka menggunakan terminologi yang berbeda-beda. Reiner (1961: 21) menggunakan istilah pengalaman yang dimaknainya memiliki arti penting bagi kehidupan manusia, baik itu pengalaman individu maupun pengalaman kolektif. Bahkan dalam konteks yang lebih luas seseorang dapat mengambil makna pengalaman

bangsanya maupun pengalaman bangsa lain. Syafii Maarif (1995: 1) menekankan bahwa dalam mengikuti sejarah bangsa-bangsa lain, pendekatan yang terlalu *Indonesia-sentris* akan sedikit diimbangi oleh panorama universal. Mungkin ada seseorang yang tidak dapat mengambil keputusan secara proporsional, tidak dapat memperbaiki kondisinya, bahkan tidak dapat melangsungkan kehidupannya tanpa melihat pengalaman masa lampau (Renier, 1961: 21).

Sartono Kartodirdjo (1989: 9-17) memandang bahwa sejarah adalah ceritera tentang pengalaman kolektif suatu komunitas atau bangsa di masa lampau yang akan membentuk kepribadian nasional dan sekaligus menentukan identitas nasional bangsa tersebut. Pandangan terhadap fenomena ilmu sejarah dalam perspektif yang *diakronis* akan mampu mengungkap asal mula dan seluruh proses perkembangan objek kajian. Dengan tanpa mengurangi relevansi perspektif *sinkronis* untuk menerangkan berbagai fenomena sosial budaya, pendekatan *diakronis* merupakan suatu keluasaan apabila ingin memperoleh pengetahuan yang bulat.

Selanjutnya, dengan apa ilmu sejarah mencoba berhubungan dengan masa sekarang. Perlu disadari terlebih dahulu bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang cukup diri, artinya sebagai lambang sebuah kesadaran ia mempunyai cara pengkajian dan cara hidup tersendiri. Mengenai bagaimana sejarah berhubungan dengan masa kini, terdapat tiga cara, yaitu: 1) pendekatan sejarah menekankan pada kesinambungan dan perubahan, di mana pendekatan genetis merupakan pendekatan dalam ilmu sejarah; 2) melalui paralelisme sejarah masa kini dan

masa lalu; dan 3) dengan kajian sejarah perbandingan (Kuntowijoyo, 1994: xii).

Seseorang yang mempelajari sejarah, pada gilirannya akan memiliki wawasan sejarah. Dengan memiliki wawasan sejarah, seseorang akan dapat mengkonsepkan sejarah yang berguna untuk mengantisipasi masa depan, termasuk di dalam pembangunan bangsa. Tanpa wawasan sejarah, dalam pembangunan bangsa akan menyebabkan suatu bangsa seperti orang "pikun", karena bangsa yang tidak mengenal sejarah, ibarat orang yang kehilangan memorinya. (Sartono Kartodirdjo, 1992: 206) Oleh karena itu, bangsa yang tidak mengenal sejarah, akan kehilangan kepribadian dan identitasnya.

Dalam mengkaji perspektif atau wawasan sejarah, sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari fakta sejarah. Fakta adalah suatu yang benar-benar terjadi atau bukti-bukti tentang apa yang telah terjadi. Louis Gottschalk (1969: 95), mengemukakan bahwa fakta sejarah merupakan keterangan yang disimpulkan dari bahan sejarah melalui kritik sejarah. Dalam pada itu, berbagai dokumen peristiwa sejarah merupakan bahan fakta sejarah, yang disebut data. Data merupakan bahan yang perlu diolah, diseleksi, dan dikategorikan atas dasar kriteria seleksi tertentu barulah menjadi fakta.

Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo (1968: 8) mengungkapkan bahwa: "...tidak mengetahui sejarah diibaratkan orang yang membaca roman halaman terakhirnya, karena tidak dapat dimengerti *integre* itu dan *happy-end*-nya tidak dapat dimengerti secara sungguh-sungguh". Pendapat Sartono Kartodirdjo tersebut, diilhami oleh seorang tokoh Romawi, Cicero bahwa yang tidak mengetahui kejadian-

kejadian sebelum dilahirkan adalah orang yang selama hidupnya tetap menjadi anak kecil atau tidak mampu berpikir dengan bijaksana.

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka prinsip belajar dari sejarah merupakan proses yang penting. Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa tanpa masa lampau manusia akan kehilangan pegangan untuk menghadapi masa kini dan masa yang akan datang. Dengan lain kata, meskipun pada limit-limit tertentu sejarah memiliki makna bagi kehidupan manusia, baik kedudukannya sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota suatu *nation*.

Sejalan dengan pengakuan akan arti dan makna sejarah, maka sejarah sering dikatakan memiliki fungsi edukatif, rekreatif, dan inspiratif. Nuansa ini menunjukkan bahwa kesadaran sejarah perlu diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat melalui pembelajaran sejarah. Atas dasar itulah Sartono Kartodirdjo (1989: 9-17) menyarankan agar dalam proses belajar mengajar diupayakan untuk menyentuh fungsi edukatif sejarah, di samping fungsi genetiknya.

Untuk lebih memperdalam tentang makna wawasan kesejarahan, perlu meninjau sejarah berdasarkan sudut penglihatan sejarah. Ini merupakan kecenderungan pemikiran tentang masa lampau yang hendaknya diperdalam sehingga tampak pola perkembangannya.

Dengan pengetahuan masa lampau yang benar dan kongkret, akan dapat diwujudkan identitas sejarah. Usaha untuk mencari relevansi dapat diartikan bahwa sejarah harus menjadi bagian dari pengetahuan kolektif

yang menjalankan kesinambungan dan atau perubahan suatu masyarakat untuk kepentingan pembangunan ilmu sejarah itu sendiri (Frederick dan Soeri Soeroto, 1982: 66).

B. Cara Pandang Sejarah

Wawasan sejarah melihat bahwa segala sesuatu sebagai suatu proses, bukan sebagai keadaan yang atomistik. Di sini ditekankan pada kontinuitas, artinya ada kesinambungan antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Waktu secara sistem matematik memang dapat dipahami, tetapi sebagai dimensi dalam segala proses atau kejadian tidak mungkin, sebab proses itu sendiri pada hahekatnya memiliki kontinuitas dan dalam kerangka pikiran sejarah, unit-unit waktu itu diberi struktur berdasarkan karakteristik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa secara *inhern* konsep waktu memuat kontinuitas.

Wawasan sejarah menempatkan suatu gejala dalam penglihatan *setting historis*, maksudnya suatu struktur situasional yang di dalamnya terjadi gejala sejarah yang dikaji, dengan memfokuskan sebagai fakta sejarah, secara otomatis akan tampil lingkungan sosialnya dan segala macam unsur kultural serta pengaruhnya pada gejala itu. Sebagai contoh dalam mempelajari Candi Borobudur, perlu melacak keadaan sosial ekonomi masyarakatnya, religinya, hubungan sosialnya, kekuasaan raja dan sistem pemerintahannya serta menghubungkan dengan peninggalan bangunan sejaman di sekitarnya. Ini berarti dalam pengkajiannya memerlukan bantuan dari ilmu sosial. Dengan demikian wawasan sejarah

memandang perlunya mendekati suatu fenomena secara *multidimensional* (Sartono Kartodirdjo, 1992: 208).

Wawasan sejarah memiliki karakter yang erat hubungannya dengan ilmu sejarah. Ilmu sejarah mengenal pandangan berdimensi tiga, dan ketiganya terdapat karakteristik pokok wawasan sejarah, yaitu: 1) sejarah merupakan konstituitas waktu silam, kini, dan depan; 2) sejarah merupakan kesatuan manusia, waktu, dan tempat; 3) sejarah merupakan ilmu, seni, dan filsafat. Karakteristik wawasan sejarah tersebut berturut-turut adalah perkembangan, kultural, dan otonomi.

Karakteristik perkembangan menunjuk bahwa eksistensi manusia terlaksana dalam waktu memiliki struktur temporal dan mengatasi fenomena kehidupan dalam *idea of progres* waktu silam, kini, dan depan, tidak bersifat homogen. Waktu kini merupakan hak istimewa setelah waktu silam.

Dalam hal ini, sejarah merekam kesadaran dari masa silam, merangsang perbuatan nyata pada masa kini, dan membangkitkan apresiasi untuk masa depan (Sidi Gazalba, 1966: 20). Atas dasar kausalitas peristiwa itulah manusia dapat bercermin pada masa silam untuk lebih memahami masa kini dan mampu menentukan arah masa depan secara prediktif.

Karakteristik kultural menunjuk bahwa eksistensi manusia terlihat dalam kebudayaan yang mendiami sebagai proses humanisasi dan liberalisasi. Sejarah adalah bagian dari kebudayaan. Sejarah dan kebudayaan merupakan bagian integral dari fenomena kehidupan. Sartono Kartodirdjo (1992: 209) mengatakan bahwa

perspektif kultur menempatkan peristiwa sejarah sebagai pencerminan proses konfrontasi kekuatan sosial.

Perubahan sosial dalam persepsi sejarah, menggunakan pendekatan fenomenologis, yakni mengkaji struktur masa kini dari kesadaran masa silam yang diterapkan pada kondisi kini atau masa depan yang diproyeksikan. Sedangkan karakteristik otonomi, menunjuk bahwa eksistensi manusia terletak dalam pertanggungjawaban kebebasan suatu nilai etis yang mengikat penyejarahan. Dari refleksi antropologis-filosofis diketahui bahwa manusia pada dasarnya adalah otonom dan bebas. Otonom adalah hak menentukan dan mengatur diri sendiri, sedangkan kebebasan menentukan ekspresi otonomi.

Ilmu sejarah mempunyai penglihatan tiga dimensi waktu yaitu, pertama penglihatan pada masa silam, kedua masa kini, dan ketiga masa depan. Menyelidiki masa silam tidak terlepas dari kenyataan kejadian masa sekarang yang sedang dialami bersama dan sedikit banyak tidak terlepas dari perspektif masa depan (Anhar Gonggong, 1996: 4).

Masa lampau harus dipelajari dengan berpijak pada kenyataan dan perkembangan situasi sekarang serta mencanangkan perkiraan dan harapan ke masa depan. Tanpa canangan perspektif ke masa depan, sejarah bukan merupakan suatu proses yang terus berjalan, tetapi keadaan yang membeku, terpencil dari keadaan sekarang dan masa depan.

Berkaitan dengan penglihatan tiga dimensi waktu dalam sejarah tersebut, fakta sebagai produk masa lampau, pada dasarnya juga tergantung dari masa kini,

artinya sejarah tidak menghadapi realitas itu sendiri, tetapi hanya bebas dalam fakta yang berupa pernyataan simbol dari realitas. Sejarawan harus menjelaskan peristiwa, di mana dalam eksplanasinya dipengaruhi oleh kebudayaan jamannya, sehingga waktu lampau tidak dapat ditangkap secara keseluruhan, karena dipengaruhi oleh dimensi kekinian. Dalam konsep ini Reiner (1961: 61) menerangkan bahwa pengalaman masa lampau manusia merupakan bagian penting dalam proses berpikir, karena tanpa pengalaman masa lampau tidak akan dapat disusun ide tentang akibat dari tindakannya.

Mengutip pernyataan Bacon yang mengungkapkan bahwa "*...histories make man wise*", sejarah mempunyai fungsi edukatif bahwa sejarah membuat orang bijaksana. Sejarah sebagai objek studi yang memusatkan perhatiannya pada masa lampau tidak dapat dilepaskan dengan masa kini. Karena semangat dan tujuan untuk mempelajari sejarah pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan nilai kemasakinannya.

Sejarah, sebagaimana dirumuskan oleh Edward Hallet Carr (1989: 64) sebagai "*unending dialogue between the present and the past*", berarti mencerminkan nilai kemasakinian dari sejarah, dan nilai kemasakinian dari sejarah itu adalah semangat yang sebenarnya berasal dari kepentingan mempelajari sejarah. Hanya melalui memproyeksikan peristiwa masa lampau ke masa kini maka kita baru akan dapat berbicara tentang makna edukatif sejarah yang sesungguhnya. Dalam kemasakinianlah masa lampau itu benar-benar masa lampau yang penuh makna, *the meaningful of past* dan bukan

masa lampau yang mati dan final, *the final and dead of past*.

Masalah yang berkenaan dengan sejarah, sebagaimana diketahui, pada dasarnya sudah dapat ditunjuk pada kedudukan sejarah sebagai ilmu. Hal itu memang disebabkan oleh sifat sejarah itu sendiri, hal mana sejarah tidak berbeda nasib dengan seluruh kelompok ilmu yang kini dikenal sebagai ilmu-ilmu sosial budaya (Haryati Subadio, 1985: 1-2). Walaupun demikian, tetapi diketahui bahwa kelompok ilmu itu tidak mungkin dikenakan atau menghasilkan dalil dan hukum mutlak. Bidang studinya memang manusia, sedangkan keadaan manusia selamanya banyak variabelnya.

Dalam konteks historis, mencari dan memperoleh pengetahuan atau ilmu tentang masa silam, dapat menghasilkan kepuasan intelektual. Dalam pada itu, (F.R. Ankersmit, 1987: 373) pemberian makna pada masa silam tidak boleh dilakukan secara otonom. Makna sejarah memang tidak terdapat di dalam proses sejarah yang disusun oleh fakta-fakta, melainkan harus didasarkan atas fakta-fakta itu.

Menurut Taufik Abdulah (1985: 9-10), fakta sejarah itu baru ada setelah diajukan beberapa pertanyaan tentang suatu peristiwa sejarah. Tanpa adanya pertanyaan, tidak akan ada fakta yang ditemukan, atau kalau tidak hanyalah belantara fakta tanpa tepi yang akan dihadapi. Pertanyaan bertolak, atau berasal dari *intellectual concern* dari suatu keprihatinan intelektual, ketika seorang sejarawan atau pemberi order penelitian sejarah tergugah tentang suatu hal.

Dari fakta-fakta yang masuk dalam kesadaran kolektif, dan telah diolah sistem nilai, pada gilirannya menjadi wawasan kesejarahan. Dari wawasan kesejarahan inilah suatu peristiwa dianggap bermakna, *meaningful*. Suatu peristiwa dijadikan simbol atau sesuatu yang bermakna bagi integrasi komunitas dan kontinuitas kultural, bahkan biasanya juga, integrasi nasional. Maka tidaklah mengherankan suatu peristiwa penting yang tak berarti dalam konteks sejarah empiris, bisa menjadi serba bermakna dalam kesadaran. Dengan kata lain suatu peristiwa kecil dapat diungkap dari situasi historisnya, dan juga telah menjadi bagian dari kesadaran.

Berdasarkan uraian tentang wawasan sejarah dengan segala hal yang berkaitan dengannya, dapat disimpulkan bahwa wawasan sejarah adalah cara memandang dan hasil cara memandang terhadap suatu peristiwa sejarah sebagai suatu proses. Dalam memandang suatu peristiwa sejarah sebagai suatu proses, terdapat kesinambungan antara peristiwa atau kejadian di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang dalam suatu *setting historis*.

Bab III

KESADARAN SEJARAH DAN NASIONALISME

A. Kesadaran Sejarah (*Historical Consciousness*)

Suatu bangsa sebagai kolektivitas seperti halnya individu memiliki kepribadian yang terdiri atas serumpun ciri-ciri menjadi suatu watak. Kepribadian nasional lazimnya bersumber pada pengalaman bersama bangsa itu atau sejarahnya. Identitas seseorang pribadi dikembalikan kepada riwayatnya, maka identitas suatu bangsa berakar pada sejarah bangsa itu.

Dalam hal ini, sejarah nasional fungsinya sangat fundamental untuk menciptakan kesadaran nasional yang pada gilirannya memperkuat solidaritas nasional. Sehubungan dengan itu pelajaran sejarah nasional amat strategis fungsinya bagi pendidikan nasional.

Sejarah merupakan cerita tentang pengalaman kolektif suatu komunitas atau *nation* di masa lampau. Pada pribadi pengalaman membentuk kepribadian seseorang dan sekaligus menentukan identitasnya.

Proses serupa terjadi pada kolektivitas, yakni pengalaman kolektifnya atau sejarahnya yang membentuk kepribadian nasional dan sekaligus identitas nasionalnya. Bangsa yang tidak mengenal sejarahnya dapat diibaratkan

seorang individu yang telah kehilangan memorinya, ialah orang yang pikun atau sakit jiwa, maka dia kehilangan kepribadian atau identitasnya (Kartodirdjo, 1993: 50).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diambil beberapa butir kesimpulan. Pertama, untuk mengenal identitas bangsa diperlukan pengetahuan sejarah pada umumnya, dan sejarah nasional khususnya. Sejarah nasional mencakup secara komprehensif segala aspek kehidupan bangsa, yang terwujud sebagai tindakan, perilaku, prestasi hasil usaha atau kerjanya mempertahankan kebebasan atau kedaulatannya, meningkatkan taraf hidupnya, menyelenggarakan kegiatan ekonomi, sosial, politik, religius, lagi pula menghayati kebudayaan politik beserta ideologi nasionalnya, kelangsungan masyarakat dan budayanya.

Kedua, sejarah nasional mencakup segala lapisan sosial beserta bidang kepentingannya, subbudayanya. Sejarah nasional mengungkapkan perkembangan multi-etnisnya, sistem hukum adatnya, bahasa, sistem kekerabatan, kepercayaan, dan sebagainya.

Pelajaran sejarah bertujuan menciptakan wawasan historis atau perspektif sejarah. Wawasan historis lebih menonjolkan kontinuitas segala sesuatu. *Being* adalah hasil proses *becoming*, dan *being* itu sendiri ada dalam titik proses *becoming*.

Sementara itu yang bersifat sosio-budaya di lingkungan kita adalah produk sejarah, antara lain wilayah RI, negara nasional, kebudayaan nasional. Sejarah nasional multidimensional berfungsi antara lain: mencegah timbulnya determinisme, memperluas cakrawala

intelektual, mencegah terjadinya *sinkronisme*, yang mengabaikan *determinisme*.

Di samping itu, pelajaran sejarah juga mempunyai fungsi sosio-kultural, membangkitkan kesadaran historis. Berdasarkan kesadaran historis dibentuk kesadaran nasional. Hal ini membangkitkan inspirasi dan aspirasi kepada generasi muda bagi pengabdian kepada negara dengan penuh dedikasi dan kesediaan berkorban. Sejarah nasional perlu menimbulkan kebanggaan nasional (*national pride*), harga diri, dan rasa swadaya.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa pelajaran sejarah tidak semata-mata memberi pengetahuan, fakta, dan kronologi. Dalam pelajaran sejarah perlu dimasukkan biografi pahlawan mencakup soal kepribadian, perwatakan semangat berkorban, perlu ditanam *historical-mindedness*, perbedaan antara sejarah dan mitos, legenda, dan novel historis.

Apabila suatu kepribadian turut membentuk identitas seorang individu atau suatu komunitas, kiranya tidak sulit dipahami bahwa kepribadian berakar pada sejarah pertumbuhannya. Di sini, kesadaran sejarah amat esensial bagi pembentukan kepribadian. Analog dengan sosiogenesis individu, kepribadian bangsa juga secara inheren memuat kesadaran sejarah itu.

Implikasi hal tersebut di atas bagi *national building* ialah tak lain bahwa sejarah dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dalam proses pembentukan kesadaran sejarah. Dalam rangka *nation building* pembentukan solidaritas, inspirasi dan aspirasi mengambil peranan yang penting, di satu pihak untuk

system-maintenance negara nasion, dan dipihak lain memperkuat orientasi atau tujuan negara tersebut. Tanpa kesadaran sejarah, kedua fungsi tersebut sulit kiranya untuk dipacu, dengan perkataan lain semangat nasionalisme tidak dapat ditumbuhkan tanpa kesadaran sejarah (Kartodirdjo, 1993: 53).

Apabila sudah disadari hubungan erat antara sejarah dengan pendidikan, memang belum ada jaminan bahwa makna dasar dari sejarah telah bisa diwujudkan untuk menunjang proses pendidikan itu. Masih diperlukan proses aktualisasi nilai-nilai sejarah dalam kehidupan yang nyata. Sejarah tidak akan berfungsi bagi proses pendidikan yang menjurus ke arah pertumbuhan dan pengembangan karakter bangsa apabila nilai-nilai sejarah tersebut belum terwujud dalam pola-pola perilaku yang nyata.

Untuk sampai pada taraf wujud perilaku ini, perlu ditumbuhkan kesadaran sejarah sebagaimana dijelaskan oleh Soedjatmoko (1984: 67), bahwa:

“...Suatu orientasi intelektual, suatu sikap jiwa yang perlu memahami secara tepat faham kepribadian nasional. Kesadaran sejarah ini menuntun manusia pada pengertian mengenal diri sendiri sebagai bangsa, kepada *self understanding of nation*, kepada sangkan paran suatu bangsa, kepada persoalan *what we are, what we are what we are...*”

Dengan demikian, kesadaran sejarah tidak lain daripada kondisi kejiwaan yang menunjukkan tingkat penghayatan pada makna dan hakekat sejarah bagi masa kini dan bagi masa yang akan datang, menyadari dasar pokok bagi berfungsinya makna sejarah dalam proses pendidikan.

Untuk mengembangkan manusia seperti itu, dengan sendirinya diperlukan motivasi yang kuat sebagai faktor penggerak dari dalam diri manusia sendiri. Ini tidak lain daripada nilai-nilai, yang kalau dihubungkan dengan sejarah, merupakan nilai-nilai masa lampau yang telah teruji oleh jaman.

Di sinilah bertemu antara pendidikan dan sejarah. Sejarah dalam salah satu fungsi utamanya adalah mengabdikan pengalaman-pengalaman masyarakat di waktu yang lampau, yang sewaktu-waktu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat itu dalam memecahkan problema-problema yang dihadapinya. Melalui sejarahlah nilai-nilai masa lampau dapat dipetik dan digunakan untuk menghadapi masa kini.

Oleh karena itu, tanpa sejarah orang tidak akan mampu membangun ide-ide tentang konsekuensi dari apa yang dia lakukan dalam realitas kehidupannya pada masa kini dan masa yang akan datang, dalam sebuah kesadaran historis. Dalam kaitan ini, Collingwood (1973: 10) sejarawan Inggris menyatakan sebagai berikut:

“...knowing your self means knowing that you can do; and since nobody knows what he can do until he tries, the only clue to what man can do is what man has done. The value of history, then, is that it teaches us what man has done and then what man is...”

Dalam pandangan Collingwood ini, mengenal diri sendiri itu berarti mengenal apa yang dapat seseorang lakukan, dan karena tidak seorang pun mengetahui apa yang bisa dia lakukan sampai dia mencobanya, maka satu-satunya kunci untuk mengetahui apa yang dia bisa

perbuat seseorang adalah apa yang telah diperbuat. Dengan demikian nilai dari sejarah adalah bahwa sejarah telah mengajarkan tentang apa yang telah manusia kerjakan, dan selanjutnya apa sebenarnya manusia itu.

Menurut Suyatno Kartodirdjo (1989: 1-7), kesadaran sejarah pada manusia sangat penting artinya bagi pembinaan budaya bangsa. Kesadaran sejarah bukan hanya sekedar memperluas pengetahuan, melainkan harus diarahkan pula kepada kesadaran penghayatan nilai-nilai budaya yang relevan dengan usaha pengembangan kebudayaan itu sendiri.

Kesadaran sejarah dalam konteks pembinaan budaya bangsa dalam pembangkitan kesadaran bahwa bangsa itu merupakan suatu kesatuan sosial yang terwujud melalui suatu proses sejarah, yang akhirnya mempersatukan sejumlah nasion kecil dalam suatu nation besar yaitu bangsa. Dengan demikian indikator-indikator kesadaran sejarah tersebut dapat dirumuskan mencakup: menghayati makna dan hakekat sejarah bagi masa kini dan masa yang akan datang; mengenal diri sendiri dan bangsanya; membudayakan sejarah bagi pembinaan budaya bangsa; dan menjaga peninggalan sejarah bangsa.

B. Nasionalisme (*Nationalism*)

Dalam pembelajaran sejarah, nasionalisme merupakan tujuan pembelajaran yang sangat penting dalam rangka membangun karakter bangsa. Dalam Permen-diknas No 22 Tahun 2006 Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, mata pelajaran sejarah

telah diberikan pada tingkat pendidikan dasar sebagai bagian integral dari mata pelajaran IPS, sedangkan pada tingkat pendidikan menengah diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Mata pelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Materi sejarah mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Selain itu, memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia.

Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan; menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi segala ancaman disintegrasi bangsa; sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari; dan berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Djoko Suryo (2005: 4) merumuskan upaya-upaya pembangunan kembali sikap kebangsaan yakni: (1) sikap *nationhood* bersumber pada pengetahuan, pemahaman dan pengalaman terhadap konsep *nation* dan *nation state*; (2) konsep *nation* yang dimiliki masyarakat saat ini

pada dasarnya merupakan penerusan dari konsep bangsa menurut paham nasionalisme dari pendiri bangsa; (3) visi nasionalisme Indonesia pada masa pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan secara jelas dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai orientasi pemikiran perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda dengan mendirikan negara kesatuan baik kesatuan tanah air, maupun bahasa dan kebudayaannya;

Masih dalam Djoko Suryo (2005: 4), selanjutnya, (4) ciri dan jiwa nasionalisme pada masa pergerakan adalah sifat anti kolonial dan semangat untuk membangun persatuan dan kesatuan masyarakat tanah jajahan dari kemajemukannya menjadi kesatuan bangsa, di mana motto Bhinneka Tunggal Ika dari masa Kerajaan Majapahit diangkat sebagai semboyan dalam upaya untuk mewujudkan terciptanya bangunan bangsa yang dicita-citakan; (5) berdirinya negara Republik Indonesia (Proklamasi Kemerdekaan 1945) sebagai salah satu perwujudan keberhasilan gerakan nasionalisme pada masa sebelum kemerdekaan; dan (6) revolusi kemerdekaan (1945-1950), menjadi bagian dari perwujudan cita-cita nasionalisme mempertahankan negara nasion proklamasi, dan perjalanan negara dan bangsa dari masa 1950 hingga 2000-an pada dasarnya berlangsung secara dinamis.

Nasionalisme dalam konsepsi sosial-kultural, kelahirannya tidak muncul begitu saja tanpa proses evolusi makna melalui media bahasa. Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata *nationalism* dan *nation* dalam bahasa Inggris, yang dalam studi semantik Guido

Zernatto, (1944) dalam Sulfikar Amir (2007), kata *nation* tersebut berasal dari kata Latin *natio* yang berakar pada kata *nascor* yang bermakna 'saya lahir', atau dari kata *natus sum*, yang berarti 'saya dilahirkan'.

Selama Kekaisaran Romawi, kata *natio* secara peyoratif dipakai untuk mengolok-olok orang asing. Beberapa ratus tahun kemudian pada Abad Pertengahan, kata *nation* digunakan sebagai nama kelompok pelajar asing di universitas-universitas (seperti Permias untuk mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat sekarang) (Sulfikar Amir, 2007). Kata *renaisans* dalam bahasa Italia, *renaissance*, juga berasal dari akar kata latin yang sama, yakni dari *renascor* atau *renatus sum*, yang berarti saya lahir kembali dan saya dilahirkan kembali (A. Daliman, 2006: 56).

Konsep *nation* mendapat makna baru yang lebih positif dan menjadi umum dipakai setelah abad ke-18 di Prancis. Ketika itu Parlemen Revolusi Prancis menyebut diri mereka sebagai *assemblee nationale* yang menandai transformasi institusi politik tersebut, dari sifat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan ke sifat egaliter di mana semua kelas meraih hak yang sama dengan kaum kelas elite dalam berpolitik.

Jika pada masa Abad Pertengahan (Abadke-5-15), kebebasan individu dan kebebasan berpikir banyak didominasi oleh kekuasaan dan otoritas agama (gereja), maka sesudah renaissans timbullah cita-cita kemerdekaan, lepas dari segala bentuk dominasi, dan pula dari dominasi dogma agama (A. Daliman, 2006: 57). Dari sinilah makna kata *nation* menjadi seperti sekarang yang

merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara.

Dinamika nasionalisme sebagai sebuah konsep yang merepresentasikan sebuah politik, bagaimanapun jauh lebih kompleks dari transformasi semantik yang mewakilinya. Begitu rumitnya pemahaman tentang nasionalisme membuat ilmuwan sekaliber Max Weber pun nyaris frustrasi manakala harus memberikan terminologi sosiologis tentang makna nasionalisme.

Pada sebuah artikel singkat yang ditulis Weber pada 1948, menunjukkan adanya sikap pesimistis bahwa sebuah teori yang konsisten tentang konsepsi nasionalisme dapat dibangun. Tidak tersedianya rujukan mapan yang dapat dijadikan dasar dan pegangan dalam memahami nasionalisme hanya akan menghasilkan persepsi yang dangkal.

Bagaimanapun, bentuk penjelasan tentang nasionalisme, baik itu dari dimensi kekerabatan biologis, etnisitas, bahasa, maupun nilai-nilai kultur, menurut Weber, hanya akan berujung pada pemahaman yang tidak komprehensif. Kekhawatiran Weber ini wajar mengingat komitmennya terhadap epistemologi modernisme yang mencari pengetahuan universal.

Termasuk dua bapak ilmu sosial Karl Marx dan Emile Durkheim pun tidak menaruh perhatian serius pada isu nasionalisme walau tentu saja pemikiran mereka banyak mengilhami penjelasan tentang fenomena nasionalisme (Sulfikar Amir, 2007). Tetapi, itu tak berarti nasionalisme harus disikapi secara *taken for granted* dan diletakkan jauh-jauh dari telaah teoretis.

Besarnya implikasi nasionalisme dalam berbagai dimensi sosial mengundang para sarjana mencoba memahami dan sekaligus mencermati secara kritis konsep bangsa dan kebangsaan (nasionalisme), seberapa pun besarnya paradoks dan ambivalensi yang dikandungnya. Tentu saja upaya memecahkan teka-teki nasionalisme tidak mudah mengingat, seperti yang dikatakan Weber, begitu beragam faktor yang membentuk bangunan nasionalisme, sehingga indikatornya tidak dapat diidentifikasi secara pasti.

Hans Kohn, seorang sejarawan yang cukup terkenal dan paling banyak karya tulisnya mengenai nasionalisme, memberikan terminologi yang sampai saat ini masih tetap digunakan secara relevan dalam pembelajaran di sekolah, yakni: *“nationalism is a state of mind in which the supreme loyalty of individual is felt to be due the nation state”*. Bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Hans Kohn, 1965: 9).

Konsep nasionalisme tersebut menunjukkan bahwa selama berabad-abad silam kesetiaan orang tidak ditujukan kepada *nation state* atau negara kebangsaan. Akan tetapi, kepada pelbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, raja feodal, suku, negara kota, kerajaan dinasti, golongan keagamaan atau gereja.

Menurut Muhammad Imarah (1998: 281), cinta tanah air atau nasionalisme adalah fitrah asli manusia dan sama dengan kehidupan, sedangkan kehilangan rasa cinta tanah air sama dengan kematian. Hasan al-Banna (1906-1949) dalam Imarah (1998: 282-283), berbicara tentang

nasionalisme serta kedudukannya pada kebangkitan Islam modern mengemukakan:

“...sesungguhnya Ikhwanul Muslimin mencintai negeri mereka; menginginkan persatuan dan kesatuan; tidak menghalangi siapapun untuk loyal kepada negerinya, lebur dalam cita-cita bangsanya, dan mengharapkan kemakmuran dan kejayaan negerinya. Kita bersama para pendukung nasionalisme, bahkan juga bersama mereka yang berhaluan nasionalis ekstrim sejauh menyangkut kemaslahatan bagi negeri ini dan rakyatnya...”

Pandangan Hasan al-Banna tersebut mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya substansi nasionalisme itu sama meskipun dengan kriteria yang berbeda seperti aqidah, batas-batas peta bumi, dan letak geografis. Pendapat ini menetralsir pertentangan konsepsi nasionalisme Islam dan Barat dalam konsepsi yang lebih substantif. Tentunya gagasan ini tidak sependapat dengan pandangan A. Hassan (1984: 42-46) mengenai cinta bangsa dan tanah air.

Sedangkan dalam konsepsi politik, terminologi nasionalisme sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik yakni pembentukan dan pelestarian negara nasional. Dengan demikian pembahasan masalah nasionalisme pada awal pergerakan nasional dapat difokuskan pada masalah kesadaran identitas, pembentukan solidaritas melalui proses integrasi dan mobilisasi lewat organisasi (Sartono Kartodirdjo, 1994: 4).

Hal ini sejalan dengan konsepsi Wikipedia Bahasa Melayu dalam Ensiklopedi Bebas yang mengidentifikasi

bahwa nasionalisme merupakan suatu ideologi yang mencipta dan mempertahankan kedaulatan sesebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan suatu konsep identiti bersama untuk sekumpulan manusia (<http://ms.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2007).

Hubungan antara nasionalisme dan *nation state*, sangat erat tidak dipisahkan satu sama lain. Nasionalisme merupakan semangat, kesadaran, dan kesetiaan bahwa suatu bangsa itu adalah suatu keluarga dan atas dasar rasa sebagai suatu keluarga bangsa, dan oleh karena itu dibentuklah negara. Dalam konsepsi ini berarti negara merupakan nasionalisme yang melembaga.

Oleh karena itu, pada dasarnya nasionalisme merupakan dasar universal bagi setiap negara. Bangsa lebih menunjuk pada penduduk suatu negeri yang dipersatukan di bawah suatu pemerintahan tunggal yang disebut negara. Sedang negara lebih menunjuk kepada suatu badan politik dari rakyat atau atau bangsa yang menempati wilayah tertentu yang terorganisir secara politis di bawah suatu pemerintah yang berdaulat, dan atau tidak tunduk kepada kekuasaan dari luar (A. Daliman, 2006: 59; Snyder, 1954: 17-18).

Nasionalisme sebagai sebuah produk modernitas, perkembangannya berada di titik persinggungan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial. Tetapi nasionalisme tidak sekedar dilihat sebagai sebuah proses dari atas ke bawah di mana kelas dominan memiliki peranan lebih penting dalam pembentukan nasionalisme daripada kelas yang terdominasi.

Ini berarti bahwa pemahaman komprehensif tentang nasionalisme sebagai produk modernitas hanya dapat dilakukan tentunya juga dengan melihat apa yang terjadi pada masyarakat di lapisan paling bawah ketika asumsi, harapan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya terhadap ideologi nasionalisme memungkinkan ideologi tersebut meresap dan berakar secara kuat (Sulfikar Amir, 2007). Pada tingkat inilah elemen-elemen sosial seperti bahasa, kesamaan sejarah, identitas masa lalu, dan solidaritas sosial menjadi pengikat erat kekuatan nasionalisme.

Semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai oleh lima prinsip nasionalisme, yakni: 1) kesatuan (*unity*), dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan *policy* kebudayaan; 2) kebebasan (*liberty, freedom, independence*), dalam beragama, berbicara dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi; 3) kesamaan (*equality*), dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban;

Selanjutnya, 4) kepribadian (*personality*) dan identitas (*identity*), yaitu memiliki harga diri (*self esteem*), rasa bangga (*pride*) dan rasa sayang (*deposition*) terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya; 5) prestasi (*achievement*), yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) serta kebesaran dan kemanusiaan (*the greatnees and the glorification*) dari bangsanya (Sartono Kartodirdjo, 1999: 7-8).

Amerika Serikat merupakan negara kebangsaan modern (*the modern nation state*) pertama yang dibangun tidak berdasarkan keturunan dan persamaan agama, tidak pula didasarkan pada bahasa dan tradisi-tradisi kesusastraan atau hukum yang sama dari suatu bangsa. Bangsa dan negara tersebut dilahirkan dari suatu usaha bersama, dalam suatu revolusi perjuangan untuk memperoleh hak-hak politik, kemerdekaan perseorangan dan toleransi mengenai asal-usul ras dalam suatu "*melting-pot*".

Bangsa ini dipersatukan oleh cita-cita, cita-cita kemerdekaan di bawah undang-undang, seperti dinyatakan dalam konstitusi. Konstitusi Amerika mulai berlaku pada tahun 1789, tahun meletusnya revolusi Prancis. Konstitusi tersebut mampu mempertahankan diri dari berbagai ujian jaman melebihi konstitusi-konstitusi negara manapun di seluruh dunia (Hans Kohn, 1965: 26-27).

Demikian pula halnya dengan negara republik Indonesia yang didirikan bersama dalam bentuk bangunan negara kebangsaan menurut teori-teori dan prinsip-prinsip nasionalisme modern yang sangat mirip dengan yang dianut Amerika Serikat. Konstruksi kesatuan bangsa yang dibangun berdasarkan konsep *bhinneka tunggal ika* (pluralisme) menurut pola dan kriteria-kriterianya merupakan produk sejarah.

Demikian pula untuk membangun tekad kesatuan (*unity*), bangsa kita memerlukan waktu lebih dari seperempat abad dengan dipancangkannya tiga tonggak sejarah, yakni kebangkitan bangsa dengan berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, dicanangkannya

manifesto politik oleh Perhimpunan Indonesia (1925) dan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kemudian pada 17 Agustus 1945 diikrarkanlah proklamasi kemerdekaan yang menunjukkan bahwa Indonesia telah terlepas dari belenggu asing (A. Daliman, 2006: 62).

Proklamasi tersebut didasarkan pada kesadaran "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa..." Unit kesatuan teritorial dan unit kesatuan bangsa yang kita nyatakan sebagai negara kebangsaan yang telah merdeka (*independent*) mencakup wilayah seluruh daerah Hindia Belanda. Kebanggaan sebagai bangsa dinyatakan dalam lagu kebangsaan "Indonesia Raya", dan kesatuan kita sebagai bangsa dikat dengan kuat oleh bahasa negara "bahasa Indonesia" dan bendera negara "Sang Merah Putih"(A. Daliman, 2006: 62).

Dengan demikian, sikap nasionalisme dapat dirumuskan melalui sikap dan perilaku sebagai berikut: bangga sebagai bangsa Indonesia; cinta tanah air dan bangsa; rela berkorban demi bangsa; menerima kemajemukan; bangga pada budaya yang beraneka ragam; menghargai jasa para pahlawan; dan mengutamakan kepentingan umum.

Pendidikan sejarah, selain bertugas memberikan pengetahuan sejarah (kognitif), tetapi juga untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur bangsanya (apektif). Pendidikan sejarah akan mampu menumbuhkan sikap nasionalisme apabila diselenggarakan mengacu pada upaya pencapaian tujuan kurikulum yang salah satunya adalah pembentukan sikap nasionalisme.

Oleh karena itu, legalitas pendidikan sejarah dalam kurikulum pendidikan nasional harus menekankan aspek-aspek penting materi pelajaran sejarah, di mana kurikulum harus menekankan: pentingnya pembelajaran sejarah sebagai sarana pendidikan bangsa; sebagai sarana pembangunan bangsa secara mendasar; menanamkan *national consciousness* dan *Indonesianhood* sebagai sarana menanamkan semangat nasionalisme; perspektif sejarah *the past-present-future* sebagai sarana menanamkan semangat nasionalisme; *historical consciousness* pada masa revolusi kemerdekaan, membentuk semangat nasionalisme dan solidaritas rakyat dalam mempertahankan negara RI;

Selanjutnya, pengalaman sejarah bangsa sebagai pengetahuan penting dalam penyelenggaraan pendidikan bangsa; perlunya pengakuan pemerintah akan pentingnya pendidikan sejarah sebagai sarana untuk membentuk jati diri dan integritas bangsa; dan rumusan sejarah sebagai mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga masa kini (Djoko Suryo, 2005: 2). Dalam hal ini, pembentukan nasionalisme melalui pendidikan sejarah mencakup nasionalisme secara umum, baik nasionalisme politik, ekonomi, maupun nasionalisme dalam bidang budaya, sehingga dalam kegiatan apapun siswa memiliki jiwa nasionalisme.

C. Kecakapan Akademik (*Academic Skill*)

Dennis Gunning (1978: 179-180) menjelaskan bahwa secara umum pembelajaran sejarah bertujuan untuk

membentuk warga negara yang baik, dan menyadarkan peserta didik untuk mengenal diri dan lingkungannya, serta memberikan perspektif historikalitas. Sedangkan secara spesifik, lanjut Gunning, tujuan pembelajaran sejarah ada tiga hal yaitu, mengajarkan konsep, mengajarkan keterampilan intelektual, dan memberikan informasi kepada peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran sejarah tidak bertujuan untuk menghafal peristiwa sejarah.

Keterangan tentang kejadian dan peristiwa sejarah hanyalah merupakan suatu alat, dan juga merupakan suatu media untuk mencapai tujuan. Sudah barang tentu tujuan di sini dikaitkan dengan arah baru pendidikan modern, yaitu menjadikan peserta didik mampu mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi dirinya dan menyadari keberadaannya untuk ikut serta dalam menentukan masa depan yang lebih manusiawi bersama-sama dengan orang lain. Dengan kata lain adalah berupaya untuk menyadarkan peserta didik akan historikalisasi diri dan masyarakatnya.

Kedekatan yang lebih dengan kelas sangat berpengaruh kepada keperdayaan dan praktek guru di ruang kelas. Selama ini dokumen kebijakan, panduan sumber, dokumen standard dan berbagai diskusi di tingkatan dalam sistem terkesan sangat abstrak, sehingga menyulitkan guru memahami, menterjemahkan dan mempraktekkannya di ruang kelas. Sebaliknya material kurikulum, penaksiran kebutuhan kelas, aktifitas kebutuhan kelas, buku teks sangat dengan berhubungan dengan ruang kelas, sehingga memudahkan guru mempraktekkannya (Coburn, 2005: 13).

Tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada sangat mungkin untuk tercapai karena seorang pengajar sejarah sebagai organisator dan fasilitator menempati posisi yang strategis dalam proses belajar mengajar. Posisi strategis seorang pengajar sejarah sebaiknya disertai dengan kemampuan yang memadai, seperti mampu mengenal setiap peserta didik yang dipercayakan kepadanya, memiliki kecakapan memberi bimbingan, memiliki pengetahuan yang luas mengenai bidang ilmu yang diajarkan, dan mampu memilih strategi belajar mengajar secara tepat (Winarno Surakhmad, 2000: 14). Menurut Preire, yang paling penting adalah bahwa pendidikan termasuk pembelajaran sejarah haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri (Freire, 1999: ix).

Tujuan pendidikan sejarah tersebut memang harus melalui suatu proses, di mana dalam proses itulah yang tidak jarang menjadikan pendidik sejarah dalam proses belajar mengajarnya hanya terkungkung oleh pelbagai perubahan pragmatis (Hariyono, 1992 : 21-28). Maka sering dijumpai adanya pembelajaran sejarah yang mengutamakan pada hapalan materi sejarah, karena yang dikejar adalah materinya itu sendiri. Pengajar sejarah yang demikian itu sebenarnya telah terperangkap dalam bidang gelap, karena tidak mampu menjangkau sesuatu yang ingin dicapainya.

Fenomena itu muncul karena adanya kekuatan atau perangkap yang secara tidak kentara tetapi pasti menjebak pengajar sejarah, seperti adanya birokratisasi dalam pembelajaran, mekanisme tes yang seragam dan mengutamakan ranah kognitif, target penyelesaian pem-

belajaran sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum, dan lain sebagainya. Menghadapi pelbagai hal tersebut menjadikan sebagian besar pengajar sejarah berada dalam suatu *feelings of powerlessness* (rasa tak berdaya) menghadapi dunianya.

Apalagi masih adanya kecenderungan dari kelompok yang dominan yang lebih menekankan pada stabilitas, maka kajian materi sejarah secara kritis dan kreatif hanya dirasakan sebagai utopia belaka. Dalam konteks yang demikian itu barangkali perlu suatu pendekatan struktural, yang menekankan pada aspek sistem dalam mempengaruhi kesadaran individu.

Bab IV

REFORMULASI PEMBELAJARAN SEJARAH

A. Refleksi Kurikulum Sejarah: Dulu dan Sekarang

Dalam perkembangan sejarahnya, kurikulum pendidikan sejarah selalu menjadi ajang legitimasi kekuasaan belaka. Oleh karena itu, indikator utama *nation building* yang ingin dicapai melalui pembelajaran sejarah menjadi bias jika tidak mau dikatakan gagal. *Nation hood* yang menjadi salah satu indikator *nation building* sudah tercerabut dari makna yang sesungguhnya. Bahkan banyak sejarawan yang secara frontal berteori bahwa pemerintah dan rakyat tidak pernah mau belajar dari sejarah (French, 1978: ix).

Dampaknya, *nationalism*, *nation hood* dan seluruh inti *nation building* hanya berada di atas kertas saja, dan jauh dari realita yang sesungguhnya. Liberalisme telah merobek-robek sistem kemanusiaan, dan menjadikannya manusia Indonesia menjadi “budak teknologi” yang mengesampingkan prinsip-prinsip humanisme. Dengan perkataan lain, pembelajaran sejarah telah gagal dalam membentuk karakter bangsa.

Adalah fakta historis yang tidak dapat dipungkiri bahwa semenjak Indonesia merdeka, kurikulum pendidikan sejarah tidak pernah terlepas dari intervensi dan politisasi dari rezim yang sedang berkuasa. Kurikulum sejarah terus silih berganti ketika paradigma pemegang kekuasaan selalu berubah-ubah sesuai dengan terminologi subjektivitasnya. Tahun 1945-1951, Sekolah Menengah Atas menggunakan kurikulum AMS (*Algemene Middlebare School*) yang merupakan warisan jaman Hindia Belanda (Asvi Warman Adam, 2005).

Dampak dari penerapan kurikulum tersebut, maka pembelajaran sejarah berpola *Eropa centris* yang menjauhkan peserta didik dari prinsip-prinsip *nation hood*. Oleh karena itu, sejarah nasional yang diajarkan adalah sejarah orang-orang besar dan sejarah pemerintahan Belanda di Indonesia.

Pengajaran pendidikan sejarah kurang menampilkan peran sejarah orang-orang kecil atau peran rakyat yang turut memberikan nuansa terhadap dinamika sejarah bangsa. Namun demikian bukan berarti bahwa pembelajaran sejarah harus bercorak *Indonesia-centris* yang mengabaikan objektivitas kajian sejarah, melainkan tetap berprinsip pada paradigma objektivitas ilmu sejarah.

Pada tahun 1952, kurikulum sejarah berubah lagi menjadi kurikulum berbasis ilmu pengetahuan. Namun karena dianggap kurang memperhatikan aspek keterampilan siswa, dan bahkan dinilai terlalu bernuansa akademis, maka kurikulum ini pun tidak berlangsung lama.

Kemudian pada tahun 1964, di mana kurikulum sejarah sangat sarat dengan nuansa politis, kurikulum sejarah menjadi semakin kaku. Kurikulum gaya baru ini dijadikan ajang legitimasi kebijakan politik penguasa, yang berujung pada membenaran-pembenaran sepihak terhadap teori kepemimpinan yang diterapkannya. Pada saat itu, pendidikan harus berlandaskan Pancasila dan Manipol (Manifestasi Politik UUD 1945 yang terdiri dari Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).

Sebenarnya, jika doktrin ini diterapkan sesuai dengan konsep teori awal, maka kebijakan ini sungguh dapat diterima dengan akal sehat, termasuk konsep “pendidikan terpimpin”. Suatu hal yang menjadi permasalahannya adalah tidak terjadi kecocokan antara teori dan praktek, atau kata Syafi’i Maarif terjadi keretakan antara kata dan laku. Bung Karno suka mengatakan suatu hal yang ideal, tetapi dia sendiri melakukan hal lain (Syafi’i Maarif, 1987: 83). Dengan demikian, maka kurikulum pendidikan sejarah tidak dapat mencapai sasaran yang sesungguhnya.

Ketika kepemimpinan Soekarno runtuh, maka pada masa awal Orde Baru kurikulum sejarah berubah lagi, yakni dengan menerapkan kurikulum 1968. Kurikulum ini juga tidak terlepas dari muatan politik, meskipun sistem pendidikan sudah diarahkan untuk memperkuat keyakinan beragama.

Pada kurikulum 1975, materi pendidikan sejarah dijiwai oleh moral Pancasila, dan menekankan pentingnya nilai-nilai 1945 bagi generasi penerus bangsa (Warman Adam, 2005). Kurikulum berbasis Orde Baru

ini juga hanya bertahan sembilan tahun, dan kemudian diganti dengan kurikulum 1984. Dalam kurikulum 1984, ditegaskan bahwa sektor pendidikan harus mendukung pembangunan bangsa di segala bidang.

Kurikulum sejarah tidak hanya menggariskan sejarah nasional dan dunia saja, tetapi juga secara terpisah dan khusus diselenggarakan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Tujuan diajarkannya PSPB adalah agar peserta didik meyakini bahwa: 1) penjajahan Belanda menyebabkan kemiskinan dan penderitaan di kalangan rakyat Indonesia; 2) kebenaran cara-cara yang dilakukan para pahlawan bangsa dalam mengusir penjajahan.

Selanjutnya, 3) pemaksaan PKI untuk menghancurkan NKRI melalui aksi-aksi sepihak; 4) kesatuan-kesatuan aksi melawan PKI didorong dengan prinsip membela kebenaran dan keadilan; 5) Orde Baru mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat (Sunardi, 2001: 1).

Kurikulum ini sangat jelas sangat sarat dengan muatan politik dalam rangka menanamkan peserta didik untuk membenarkan segala tindakan penguasa terutama sejarah bangkitnya Orde Baru. Selain untuk memberikan membenaran terhadap segala kebijakannya, kurikulum tersebut juga dimaksudkan untuk menghancurkan kekuatan politik tertentu dan mengantisipasi kebangkitannya kembali.

Diterapkannya kurikulum 1994, bukan berarti permasalahan politisasi kurikulum selesai, melainkan justru permasalahan menjadi semakin kompleks. Kurikulum ini sarat dengan berbagai pengetahuan yang lebih makro,

sehingga untuk situasi mikro bagi Indonesia dianggap kurang relevan. Kurikulum sejarah dengan nama Sejarah Nasional dan Dunia, di samping membahas sejarah nasional yang teramat luas, juga membahas sejarah dunia yang diakronismenya sangat panjang.

Dalam kondisi ini, guru-guru sejarah mengeluh karena materi ajar terlampau banyak, sementara porsi waktu yang disediakan sangat terbatas, dianggap tidak cukup untuk membahas secara mendalam. Materi juga akhirnya kurang menarik karena hanya dapat disajikan sekilas-sekilas saja, sehingga tuntutan untuk menanamkan sikap kritis di kalangan peserta didik menjadi kabur.

Pendidikan sejarah semakin kehilangan arah dan tujuan, sehingga menyisakan banyak permasalahan yang tidak harmonis bagi dinamika kependidikan di Indonesia. Akhirnya ketika arus reformasi muncul, dan memberi kritik yang cukup keras terhadap sejarah resmi Orde Baru, guru dan siswa menjadi bingung, mengikuti informasi dari buku, koran, atau media massa lain yang masih nampak sarat dengan berbagai kepentingan.

Pada tahun 1999, di mana diterapkan adanya suplemen tambahan dan revisi untuk kurikulum 1994, maka muatan sejarah yang diakronisnya terlampau panjang seperti pada materi tentang peradaban Amerika Latin dan perbandingannya dengan Yunani dan Romawi di-tiadakan. Di samping itu sebagai penjabaran dari kurikulum, buku-buku sejarah yang diterbitkan dan mengacu pada suplemen GBPP 1999, maka banyak terdapat koreksi, di mana misalnya pembahasan mengenai G30S/PKI, nama PKI di belakang G30S hilang, yang ada hanya G30S.

Dalam pembahasannya, tidak disebutkan bahwa PKI bersalah sebagai dalang G30S, melainkan bahwa dalam peristiwa tersebut ada beberapa kelompok yang bertanggung jawab, seperti PKI sendiri, Soekarno, Soeharto, Angkatan Darat, dan CIA (intelejen Amerika Serikat). Namun ini juga bukan berarti bahwa PKI pasti tidak bersalah atau bukan dalang dari peristiwa G30S. Kenyataan yang sesungguhnya masih memerlukan kajian kritis sampai ditemukannya fakta yang kuat seputar peristiwa tersebut.

Pada saat reformasi sudah berjalan sekitar lima tahun, Direktorat Sejarah dan Pusat Kurikulum Depdiknas bersama para pakar sejarah menyusun Kurikulum Berbasis Kompetensi, yang kemudian berganti nama menjadi Kurikulum 2004. Kurikulum sejarah 2004 lebih maju, menunjukkan objektivitas dan prinsip-prinsip keadilan ketimbang kurikulum pada masa Orde Baru.

Kurikulum 2004 bukan hanya membahas materi sejarah sebagai “pelipur lara” dan menonjolkan peran dominan angkatan bersenjata saja, melainkan membahas secara lebih luas dan komprehensif peristiwa-peristiwa nasional. Berbagai gerakan dan pemberontakan ditinjau dari berbagai perspektif yang lebih luas dan bernuansa. Dalam materi yang masih sangat krusial, peserta didik terutama kalangan SLTA ditampilkan aneka pendapat seputar peristiwa, dampak sosial politik dari peristiwa tersebut, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pemikirannya sendiri seputar peristiwa-peristiwa sejarah nasional.

B. Masalah Rekonstruksi dan “Dekonstruksi”

Peristiwa sejarah selalu berhubungan dengan masalah dekonstruksi dan rekonstruksi dalam membangun fakta sejarah yang objektif. Fenomena seperti itu selalu mewarnai sejarah historiografi di Indonesia, yang mengkondisikan kurang dinamisnya penulisan-penulisan sejarah kontemporer terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah politik. Nuansa demikian adalah bagian dari langkah politik para penguasa dan pemegang otoritas kultural, ataupun pemberangusan terhadap lawan-lawan politik serta pandangan-pandangan yang berbeda secara ideologis maupun politis (MT. Aripin, 2005: 2).

Kondisi tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan, di mana penulisan-penulisan sejarah sangat sarat dengan berbagai kepentingan penguasa. Persoalan-persoalan semacam itu biasanya terkait dengan kecenderungan-kecenderungan tertentu yang bernuansa subjektif. Subjektivitas semacam itu, banyak ditemukan dalam lingkungan sosial yang sangat nyata, di mana hal demikian sangat dipengaruhi oleh dua kemungkinan.

Pertama, adanya kecenderungan semakin luasnya pengaruh dari kekuasaan yang semakin tidak terbandung atau terkontrol akibat adanya dominasi ataupun hegemoni politik, merupakan suatu bagian yang sangat menonjol dan mempengaruhi penulisan-penulisan umum, terutama karya sastra dan historiografi sejarah. Dalam pengalaman terakhir sering dikenal dengan istilah buku putih atau “versi resmi” yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang sedang memegang tampuk kekuasaan.

Keadaan seperti itu, biasanya akan berlangsung selama stabilitas dari rejim kekuasaan itu dapat dijaga dengan baik. Pada masa Orde Baru dikenal adanya buku putih seputar peristiwa Gestapu, sementara pada masa Gus Dur dikenal adanya buku putih PKB. Semuanya itu adalah *pledoi-pledoi* atau bahkan *justifikasi* terhadap segala kebijakannya.

Sedangkan yang *kedua*, apabila kemampuan dari komunitas-komunitas independen dan pemikiran-pemikiran bebas yang ada dalam masyarakat semakin lemah (akibat aturan perundangan yang mengakibatkan lemahnya *bargaining* politik, ataupun tidak memiliki daya dukung ekonomi sosial yang memadai), sehingga ketidakberdayaan untuk menjadi kekuatan pembanding, atau memang telah semakin terkooptasi ke dalam kekuasaan itu sendiri (MT. Aripin, 2005: 3). Hal demikian terjadi pula dalam kehidupan berdasar sistem politik yang berlaku dan tidak memberi ruang untuk memperkenankan adanya model kontrol melalui pola-pola oposisionis dalam suasana politik dan kehidupan lainnya secara lebih luas.

Di dalam kehidupan yang serba berubah dengan kebebasan pendapat umum dan akses informasi yang sangat terbatas, maka pergeseran-pergeseran akan mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan dalam masyarakat, termasuk pada pokok-pokok bahasan dan materi pelajaran sejarah, dan hanya mungkin terjadi manakala berlangsung perubahan-perubahan yang bersifat paradigmatik, baik dalam tataran teoritik, maupun pada tingkat politik dan kekuasaan. Perkembangan baru yang bersifat teoritik

dalam ilmu sejarah, tercermin dari perubahan historiografi Indonesia, yang dianggap sebagai isi sejarah dan pandangan dunia (*weltanschauung*) dari sifatnya yang tradisional ke modern (Sartono Kartodirdjo, 1968: 42).

Fenomena itu berlangsung setelah seminar Sejarah Nasional Indonesia I di Yogyakarta tahun 1957, yang membahas persoalan filsafat sejarah, periodisasi dalam sejarah, dan pendidikan sejarah. Sejak Seminar Nasional pertama tersebut, diusulkan pelbagai upaya dalam historiografi Indonesia, namun dampaknya di bidang pengajaran sejarah belum tampak jelas. Apabila lewat pengenalan sejarah kesadaran nasional dapat dipupuk dan identitas nasional menjadi landasan kuat bagi pembangunan bangsa, maka jelaslah bahwa pengkajian sejarah mempunyai fungsi fundamental dalam pembangunan bangsa serta pembentukan manusia Indonesia bermartabat (Sartono Kartodirdjo, 1968: 66).

Perkembangan baru yang bersifat politik, meskipun memiliki implikasi terhadap perubahan-perubahan lain, namun umumnya lebih berpengaruh langsung pada kandungan materi tentang peran politik tertentu, serta pesan-pesan moral dan politik yang perlu disosialisasikan terhadap peserta didik melalui proses pembelajaran. Seperti halnya perubahan-perubahan ipoleksosbud yang terjadi pada masa awal Orde Baru, mengarah pada perubahan paradigma.

Hal tersebut diawali dengan pendobrakan paradigma lama yang sifatnya *top-down*, seperti polemik seputar kelahiran dan rumusan tentang Pancasila, pelarangan buku-buku sejarah tertentu, seperti karya dari Sanusi

Pane, pemunculan format baru kekuasaan menimbulkan persoalan interpretasi pada akhir penulisan sejarah nasional. Dalam hal ini, materi pelajaran sejarah mengalami perubahan yang sangat mendasar, dengan masuknya teori-teori pembangunan dan pengaruh sistem ekonomi liberal yang diformulasikan melalui pembangunan, legitimasi terhadap eksistensi Orde Baru, ataupun sistem politik yang menempatkan pengaruh militer menjadi dominan.

Ketika pemerintahan Orde Baru terpuruk, maka perubahan di tingkat politik yang bersifat paradigmatis yang memberikan pengaruh terhadap bergulirnya polemik di sekitar materi pembelajaran sejarah, khususnya yang berhubungan dengan masalah peristiwa Gestapu dan rejim pemerintahan Orde Baru. Kuatnya dominasi politik pada masa Orde Baru terhadap segala bidang kehidupan masyarakat yang termasuk bidang akademis, mengakibatkan munculnya tuntutan-tuntutan yang bersifat dari bawah ke atas, *bottom-up*.

Memang terdapat sebuah kecenderungan, bahwa setiap kali terjadi perubahan sosial politik yang dramatis, masyarakat lalu cenderung mempersoalkan kebenaran gambaran masa lalu mereka. Gugatan itu sangat dipengaruhi oleh gagasan tentang reformasi, yang digulirkan oleh kelompok menengah perkotaan. Dari sinilah era kebebasan demokrasi dan keadilan mulai merebak di hampir setiap sendi kehidupan masyarakat.

Dalam era kebebasan sipil dan politik yang baru dan semangat emansipasi politik yang reformatoris di tengah pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia, pelbagai hasil kajian terhadap peristiwa Gestapu di luar versi resmi

banyak bermunculan bagaikan jamur di musim hujan. Hal ini didorong terutama setelah adanya kebebasan pers dan tidak adanya lagi kendala politik perijinan dalam penerbitan dan penyiaran.

Realitanya, karya-karya baru tersebut telah menampilkan fakta-fakta baru selama ini tidak pernah ada dalam versi resmi. Misalnya buku yang ditulis oleh Hermawan Sulistyono, *Palu Arit di Ladang Tebu*, Robert Cribb, *The Indonesian Killings of 1965-1966*, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan komunisme, PKI, dan kesaksian dari para pelaku sejarah yang selama ini tidak memiliki kesempatan untuk menyatakan kesaksian-kesaksiannya.

Perubahan-perubahan seperti itu sebenarnya telah didahului oleh proses panjang, yang bersumber dari konflik-konflik kepentingan dan penentangan terhadap praktek *developmentalism* di tingkat atas, sebagai suatu gejala politik yang oleh Huntington (1983) diformulasikan sebagai *political decay* atau pembusukan politik. Fenomena tersebut nampak dengan jelas ketika terjadi polemik di sekitar fakta Supersemar (Surat Pemerintah Sebelas Maret), munculnya gerakan Prodem (Pro Demokrasi) yang disponsori oleh kelompok militer senior, di sekitar perbedaan pendapat antara Presiden Soeharto dengan militer di sekitar jabatan Wakil Presiden oleh Soedarmono, SH (MT. Aripin, 2005: 8).

Bahkan juga gagasan tentang demokratisasi yang berujung pada pemikiran tentang kebangkitan kembali masyarakat sivil (*civil society*) dan restrukturisasi ruang publik. Dalam wacana tersebut, begulir gerakan tradisional, dari kehidupan yang dinilai otoriter kepada yang lebih demokratis, yang menuntut berlakunya kebebasan

yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan yang penting dan didasarkan atas nilai-nilai *political justice*, dan menumbuhkan *the ethics of pluralism* yang sangat fundamental dalam kehidupan demokrasi.

Pada tataran ini, berbagai elemen masyarakat merasa memiliki hak untuk menyampaikan sikap, pandangan, dan penilaian terhadap peristiwa-peristiwa itu sebagaimana yang diketahui, dan menurut mereka dianggap proposional. Hal ini terjadi karena di samping peristiwa melibatkan kelompok-kelompok pelakunya juga merupakan suatu pilihan-pilihan yang faktornya cukup kompleks, dan bahkan tidak jarang, pelbagai *interest* pribadi dan kelompok tertentu, berkepentingan terhadap rumusan-rumusan seperti itu.

Pada titik ini, akan muncul titik persinggungan antara satu dengan lainnya, namun juga muncul perbedaan-perbedaan yang menganga terhadap peristiwa itu, terutama perspektif dan implikasi terhadap politik pada tingkat kepentingan masing-masing (kelompok dan individu) dalam kaitan kekuasaan (politik, ekonomi, dan wacana kultural). Secara prinsip, sejarah dirumuskan bukan untuk suatu legitimasi atau peminggiran suatu kelompok; tidak pula hanya didasarkan atas suatu konsensus politik belaka, melainkan harus mampu mengungkapkan tentang kenyataan-kenyataan yang hidup pada masa lampau, beserta kebenaran-kebenaranannya (MT. Aripin, 2005: 9).

Dengan demikian, peristiwa yang dianggap bersejarah itu dihadapkan pada persoalan klasik kefilsafatan dari ilmu sejarah, yang sebagaimana dinyatakan oleh Walsh dalam persoalan "*truth and fact in history*",

ataupun mempertanyakan kemungkinan-kemungkinan dari peristiwa itu, “*can history be objective?*”. Atau bahkan justru sebagaimana pernyataan Tolstoy, bahwa sebenarnya sejarah ini tidak lebih cenderung bagaikan ocehan dari para istri tua, sehingga hanya menghasilkan informasi antiwart (Walsh, 1960: 70-118).

Fenomena historis semacam itu, bagi kalangan sejarawan akademis merupakan peluang berharga untuk melakukan kajian ulang dan penulisan yang lebih bernuansa, dengan derajat kebebasan yang dimiliki secara akademis. Tetapi, tidak demikian halnya dengan para guru, yang bertugas menyampaikan masa lampau dalam pelajaran ilmu sejarah kepada peserta didik, terutama pada tingkat sekolah menengah.

Disebabkan karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, baik yang berhubungan dengan sumber informasi, ruang akademik, fasilitas pendukung dan tugas-tugas pengajaran dan administrasi yang menyita waktu, para guru mestinya membutuhkan suatu kejelasan tentang politik pengajaran, dan juga materi-materi pengajaran tersebut. Dalam politik pengajaran, kejelasan tentang politik pembelajaran sejarah menjadi sangat penting, yang salah satu sisi di antaranya, berkaitan dengan membangun pengetahuan dan kedudukan yang strategis untuk kepentingan pendidikan intelektual (*intellectual training*), pendidikan kesadaran kolektif (pendidikan moral bangsa) dan pendidikan *civil society* yang bertanggung jawab.

C. Kebijakan PP Nomor 7 Tahun 2005

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang penundaan implementasi kurikulum 2004 untuk materi pelajaran sejarah dan larangan penggunaan buku-buku teks yang berbasis kurikulum tersebut, bukan tanpa alasan oleh pemerintah. Tetapi, seberapa besar tingkat penerimaan masyarakat terhadap alasan tersebut perlu dikaji secara objektif, agar diketahui benang merah yang melatarbelakangi diterapkannya kebijakan tersebut. Apakah alasan tersebut benar-benar rasional, dan dapat diterima terutama oleh kalangan sejarawan, atau justru sebaliknya menimbulkan masalah-masalah yang divergen.

Jika tidak diungkap secara transparansi, maka kebijakan pemerintah tersebut hanya akan membawa pendidikan nasional terjebak dalam konsep-konsep pragmatisme belaka. Jika itu yang terjadi, maka pendidikan nasional akan kehilangan identitas, dan semakin jauh dari tujuan-tujuan awal untuk kemajuan bangsa.

Pokok permasalahan penerapan kebijakan yang menjadi polemik dan ramai diperbincangkan oleh kalangan sejarawan dan masyarakat adalah legalitas kurikulum sejarah yang kandungan materinya dianggap kontroversi. Masalah yang paling krusial adalah materi seputar peristiwa Gestapu, di mana dalam kurikulum 2004 nama PKI di belakang G30S ditiadakan.

Pihak-pihak yang keberatan terhadap kandungan materi kurikulum 2004 sejarah tersebut datang dari tokoh-tokoh Islam seperti Ahmad Soemargono, Taufik Ismail, dan Yusuf Hasyim serta Alwi Sihab. Mereka

merasa keberatan jika nama PKI di belakang kata G30S dihilangkan, yang dalam prespektifnya berarti bahwa PKI bukan dalang peristiwa berdarah tersebut. Bahkan Alwi Sihab mengatakan bahwa penghapusan Pemberontakan PKI itu sebagai sebuah pengabaian sejarah.

Akhirnya, mereka sepakat mengadu kepada DPR agar kurikulum sejarah direvisi, dan untuk itu implementasinya perlu ditunda. Reaksi tersebut disambut positif oleh Agung Laksono yang turut merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.

Bahkan, Padli Zon menduga bahwa penghapusan tersebut sebagai upaya dari para eks PKI untuk mencoba menghapus jejak sejarah, dan juga dengan sengaja memutarbalikannya (Sardiman AM, 2005). Mereka berpendapat bahwa penghapusan Pemberontakan PKI dalam kurikulum 2004 sebagai manuver politik kelompok-kelompok tertentu untuk “mebutakan” peserta didik dari sejarah buram bangsa, dan merupakan suatu gerakan sistematis bagi kalangan yang menghendaki kebangkitan PKI.

Di kalangan sejarawan dan akademis, melihat polemik yang berkembang di seputar kurikulum sejarah justru merasa aneh. Mengapa polemik yang berangkat dari suatu kelompok dan termasuk yang mengaku dirinya sebagai pelaku sejarah memunculkan kebijakan yang ganjil dan “nyeleneh”. Apakah tidak lebih baik kalau yang diminta pendapat seputar fakta Pemberontakan PKI itu adalah sejarawan yang lebih bertanggungjawab terhadap kajian ilmunya?

Dalam terminologi sejarawan, fakta seputar peristiwa Gestapu masih bersifat lunak, sehingga tidak dapat

dikatakan secara sepihak bahwa PKI pasti dalang dari peristiwa tersebut. Jika hal itu terus dipaksakan, justru merupakan sebuah langkah mundur karena pada kurikulum 1994 suplemen 1999 saja kata PKI di belakang G30S sudah tiada. Kurikulum 2004 sejarah sudah cukup objektif dan demokratis, sebuah perubahan paradigma besar dalam sejarah kurikulum di Indonesia.

Jika paradigma sepihak itu menjadi acuan, maka dapat saja muncul kecurigaan di kalangan masyarakat terhadap penyusun kurikulum sejarah, yang merupakan bagian sistematis dari gerakan kebangkitan PKI. Dalam persepektif sejarawan, dipastikan bahwa para penyusun kurikulum bukan merupakan bagian integral dari gerakan tersebut bila memang ada. Karena dalam jaman reformasi yang membuka kran kebebasan dan keterbukaan cukup lebar, maka diskriminasi dan intimidatif terhadap kelompok tertentu sangat bertentangan dengan tuntutan reformasi.

Persoalan perubahan politik yang berlangsung di sekitar peristiwa Gestapu yang selama ini mendeskripsikan PKI sebagai dalangnya, semakin banyak dipersoalkan dalam forum-forum resmi. Dalam pada itu, setidaknya ada tiga kelompok yang memiliki sikap dan pendapat yang saling berbeda satu sama lain.

Pertama, penulisan tentang peristiwa tersebut sebagaimana yang ada dan diajarkan selama ini, memang merupakan realitas politik yang sebenarnya, dengan versi resmi dari pemerintahan Orde Baru. Ini dapat dilihat dari penulisan buku putih dari pemerintahan Presiden Soeharto, yang mengungkap latar belakang, aksi, dan penumpasan G30S/PKI (Sekretariat Negara, 1994: 118).

Versi ini secara tegas memvonis bahwa yang bertanggung jawab dari peristiwa Gestapu 1965 adalah PKI. PKI dianggap secara sah dan meyakinkan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah saat itu.

Kedua, beberapa kalangan kelompok dalam masyarakat yang melihat peristiwa buram itu sebagai suatu *event* yang lebih banyak bersifat *artificial*, dan kemudian dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan Orde Baru. Sebagian terbesar pandangan seperti itu berasal dari kelompok-kelompok dalam masyarakat, yang merasa dirugikan oleh susunan versi resmi, ataupun pula kelompok bagian dari korban politik pemerintahan Orde Baru. Persoalan ini tercermin dari beberapa pandangan, seperti pledoi dari pelaku seperti halnya pledoi Kolonel A. Latief yang mengatakan bahwa Soeharto terlibat dalam peristiwa Gestapu, perihal kesaksian Soebandrio, ataupun sebagaimana hasil pelacakan terhadap peristiwa itu yang dianggap latar rekayasa serangkaian historiografi.

Sedangkan kelompok yang *ketiga*, adalah kelompok yang lebih netral, dan sebagian di antaranya menuntut agar dilakukan penulisan ulang yang lebih objektif, yang terbebas dari motif-motif politik dan legitimasi untuk kepentingan kekuasaan tertentu. Kajian demikian diawali dari perdebatan tentang persoalan di balik kolapsnya PKI yang berlangsung di kalangan Indonesianis di Cornell University, hingga memunculkan pemikiran dinamika sejarah Indonesia, yang menuntut perlunya penelitian dan penulisan ulang terhadap pelbagai bagian dari sejarah dengan cara-cara yang lebih jernih dari objektif (Brackman, 2000).

Dalam polemik mutakhir seputar masalah kurikulum 2004 tersebut, ternyata pemerintah yang berkuasa membuat suatu pilihan pahit terutama bagi para guru sejarah dan kalangan sejarawan, di mana khusus untuk materi pelajaran sejarah ditunda implementasinya sampai revisi terhadap kurikulum tersebut selesai. Komisi X DPR RI dalam rapat kerja dengan Mendiknas pada hari Senin tanggal 17 Juni 2005, mendesak pemerintah dalam hal ini Mendiknas untuk menanggukkan pemakaian materi mata pelajaran sejarah dalam kurikulum 2004. Mendiknas juga didesak untuk menyelesaikan materi pelajaran sejarah yang harus memuat materi tentang Pemberontakan PKI secara menyeluruh.

Akhirnya, keluarlah PP Nomor 7 Tahun 2005 yang berisi tentang penangguhan implementasi kurikulum 2004 untuk materi pelajaran sejarah, dan larangan penggunaan buku-buku teks sejarah yang ditulis berdasarkan kurikulum 2004 tersebut. Itulah nasib sejarah yang telah menghiasi perjalanan bangsa ini, selalu tidak luput dari intervensi dan motif-motif politik tertentu.

D. Karakteristik Mata Pelajaran Sejarah di SMA

Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul dan perkembangan serta peranan masyarakat di masa lampau berdasarkan metode dan metodologi tertentu. Pengetahuan masa lampau tersebut mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian peserta didik. Mata pelajaran Sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak

dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara substantif, materi sejarah:

- 1) mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik;
- 2) memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan;
- 3) menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa;
- 4) sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari;
- 5) berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Mendiknas No. 22 tahun 2006 Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mata pelajaran sejarah untuk Sekolah Menengah Atas meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) Prinsip dasar ilmu sejarah
- 2) Peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia
- 3) Perkembangan negara-negara tradisional di Indonesia
- 4) Indonesia pada masa penjajahan
- 5) Pergerakan kebangsaan
- 6) Proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan Indonesia.

E. Tujuan Mata Pelajaran Sejarah SMA

Peraturan Mendiknas No. 22 tahun 2006 Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa mata pelajaran sejarah di SMA secara rinci memiliki 5 tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- 1) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan.
- 2) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan dida-

sarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan.

- 3) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau.
- 4) Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang.
- 5) Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional. (2006: 254).

Kelima tujuan tersebut pada prinsipnya memiliki tujuan penting untuk membentuk dan mengembangkan 3 kecakapan peserta didik, yaitu kemampuan akademik, kesadaran sejarah, dan nasionalisme. Kemampuan akademik dijabarkan secara rinci dalam tujuan kedua dan keempat yakni: melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan; menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang.

Kesadaran sejarah diuraikan lebih lanjut pada tujuan kesatu, ketiga dan kelima yakni membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan; menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau; dan menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional.

Sedangkan nasionalisme diuraikan lebih rinci dalam tujuan kelima. Tujuan kelima tersebut yaitu, menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional.

Kelima tujuan tersebut apabila dihubungkan dengan pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan SMA, mata pelajaran sejarah memiliki posisi yang cukup strategis. Posisi strategis tersebut mengindikasikan betapa pentingnya pembelajaran sejarah untuk membentuk karakter dan kemampuan peserta didik, sehingga menjadi generasi yang cerdas yang selalu berpijak pada pengalaman sejarah untuk menjadikan kehidupan mendatang yang lebih gemilang. Dengan mengacu pada tujuan tersebut, maka aplikasi pembelajaran sejarah normatif sebagai sarana pendidikan

bangsa akan tercapai dengan baik, dan tujuan pendidikan secara substansial juga akan tercapai.

F. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.

Untuk itu diperlukan model evaluasi pembelajaran sejarah yang dapat mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran secara komprehensif, dan memberikan informasi yang akurat bagi para pengambil kebijakan terutama pimpinan sekolah, yang dalam hal ini adalah kepala sekolah pada tingkat sekolah, dan juga guru pada tingkat kelas. Sebagai hasil evaluasi maka rekomendasi bertujuan untuk memberi masukan bagi sekolah agar ditindaklanjuti untuk perbaikan-perbaikan proses pembelajaran.

Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sejarah untuk SMA termuat dalam Permen-diknas no. 22 tahun 2006 Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk mengetahui posisi kompetensi dasar dalam pencapaian tujuan pembelajaran sejarah dapat disusun tabel keterkaitan antara tujuan pembelajaran sejarah dengan kompetensi dasar (KD) sejarah dengan mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagaimana tercantum dalam kurikulum nasional.

Standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran sejarah lebih difokuskan pada pencapaian tujuan mata pelajaran sejarah yang kedua (kemampuan akademik), yaitu melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan; dan keempat, yaitu menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang.

Aspek tujuan yang lain seperti membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan (tujuan pertama); menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau (tujuan ketiga); dan menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional (tujuan kelima).

Ketiga tujuan yang disebut terakhir merupakan tanggung jawab serta otonomi guru untuk dapat menunjukkan kreativitasnya dalam mendesain strategi maupun model pembelajaran yang digunakan untuk mencapai aspek tujuan tersebut.

Selama ini, penilaian hasil pembelajaran sejarah hanya difokuskan pada kemampuan akademik sebagaimana diwujudkan dalam tujuan sejarah yang kedua dan keempat, sedangkan penilaian terhadap kesadaran

sejarah dan nasionalisme sebagaimana diwujudkan dalam tujuan sejarah 1, 3, dan 5 kurang mendapat perhatian. Ukuran keberhasilan pembelajaran sejarah tidak cukup hanya dinilai dari aspek kecakapan akademik semata, tetapi perlu melihat hasil penilaian aspek kesadaran sejarah dan nasionalisme.

Dengan demikian, standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan Standar Proses dan Standar Penilaian.

G. Paradigma Baru Pembelajaran Sejarah

Pembelajaran sejarah sebagai sarana pendidikan bangsa, terutama dalam aplikasi sejarah normatif, Djoko Suryo (2005: 3) merumuskan beberapa indikator terkait dengan pembelajaran sejarah tersebut yaitu:

1. Pembelajaran sejarah memiliki tujuan, substansi, dan sasaran pada segi-segi yang bersifat normatif.
2. Nilai dan makna sejarah diarahkan pada kepentingan tujuan pendidikan daripada akademik atau ilmiah murni.
3. Aplikasi pembelajaran sejarah bersifat pragmatik, sehingga dimensi dan substansi dipilih dan di-

sesuaikan dengan tujuan, makna, dan nilai pendidikan yang hendak dicapai yakni sesuai dengan tujuan pendidikan.

4. Pembelajaran sejarah secara normatif harus relevan dengan rumusan tujuan pendidikan nasional.
5. Pembelajaran sejarah harus memuat unsur pokok: *instruction*, *intellectual training*, dan pembelajaran moral bangsa dan *civil society* yang demokratis dan bertanggung jawab pada masa depan bangsa.
6. Pembelajaran sejarah tidak hanya menyajikan pengetahuan fakta pengalaman kolektif dari masa lampau, tetapi harus memberikan latihan berpikir kritis dalam memetik makna dan nilai dari peristiwa sejarah yang dipelajarinya.
7. Interpretasi sejarah merupakan latihan berpikir secara intelektual kepada para peserta didik (*learning process* dan *reasoning*) dalam pembelajaran sejarah.
8. Pembelajaran sejarah berorientasi pada *humanistic* dan *verstehn* (*understanding*), *meaning*, *historical consciousness* bukan sekadar pengetahuan kognitif dari pengetahuan (*knowledge*) dari bahan sejarah.

9. Nilai dan makna peristiwa kemanusiaan sebagai nilai-nilai universal di samping nilai particular.
10. Virtue, religiusitas, dan keluhuran kemanusiaan universal, dan nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, dan kewarganegaraan, serta nilai-nilai demokratis yang berwawasan nasional, penting dalam penyajian pembelajaran sejarah.
11. Pembelajaran sejarah tidak saja mendasari pembentukan kecerdasan atau intelektuilitas, tetapi pembentukan martabat manusia yang tinggi.
12. Relevansi pembelajaran sejarah dengan orientasi pembangunan nasional berwawasan kemanusiaan dan kebudayaan.

Konsep pembelajaran, sering juga disebut dengan "*instruction*" yang terdiri dari dua kata yakni kegiatan belajar dan mengajar. Dalam konsepsi umum, belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada yang berlangsung pada diri seseorang.

Dalam hal ini, Woolfolk & Nicolich (1984: 159) menjelaskan bahwa "*Learning is a change in a person that comes about as a result of experience*". Belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri seseorang sebagai hasil pengalaman.

Perubahan sebagai hasil kegiatan pembelajaran dapat mencakup perubahan pengetahuannya, kecakapan

dan kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan dan lain sebagainya. Demikian pula dengan mengajar yang pada dasarnya merupakan suatu proses, yang meliputi proses mengatur dan mengorganisir lingkungan belajar siswa yang tujuannya adalah menumbuhkan dan memotivasi siswa untuk belajar.

Sependapat dengan itu, Nana Sudjana (2002 : 29) menjelaskan bahwa mengajar merupakan suatu proses mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat dua kegiatan yang terjadi dalam satu kesatuan waktu dengan pelaku yang berbeda, yakni siswa belajar dan guru yang mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.

Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar terjadi hubungan dua arah antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, eksistensi guru dan siswa yang saling mendukung dalam kegiatan pembelajaran merupakan suatu faktor yang harus ada dalam proses pembelajaran.

Menurut Winata Putera (1992 : 86), mengajar merupakan suatu aktivitas profesional yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi dan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan-keputusan. Pengajar dituntut untuk mampu mengelola kegiatan pembelajaran, yakni dalam hal: merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengevaluasi.

Keberhasilan kegiatan pembelajaran sangat tergantung pada kompetensi guru dalam merencanakan, yang

mencakup antara lain menentukan tujuan belajar peserta didik, bagaimana caranya agar peserta didik mencapai tujuan tersebut, sarana apa yang diperlukan, dan lain sebagainya. Dalam hal mengatur, yang dilakukan pada waktu implementasi apa yang telah direncanakan dan mencakup pengetahuan tentang bentuk dan macam kegiatan yang harus dilaksanakan, bagaimana semua komponen dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Pengajar bertugas untuk mengarahkan, memberikan motivasi, dan memberikan inspirasi kepada peserta didik untuk belajar. Memang benar tanpa pengarahan pun masih dapat juga terjadi proses belajar, tetapi dengan adanya pengarahan yang baik dari pengajar maka proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan dalam hal mengevaluasi, termasuk penilaian akhir, hal ini dimaksudkan apakah perencanaan, pengaturan, dan pengarahannya dapat berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki.

Dalam proses belajar mengajar, pengajar perlu mengadakan keputusan-keputusan, misalnya metode apakah yang perlu dipakai untuk mengajar mata pelajaran tertentu, alat dan media apakah yang diperlukan untuk membantu peserta didik membuat suatu catatan, melakukan praktikum, menyusun makalah diskusi, atau cukup hanya dengan mendengar ceramah pengajar saja. Dalam proses belajar mengajar pengajar selalu dihadapkan pada bagaimana melakukannya, dan mengapa hal tersebut perlu dilakukan. Begitu juga dalam hal evaluasi atau penilaian dihadapkan pada bagaimana

sistem penilaian yang digunakan, bagaimana kriterianya, dan bagaimana pula kondisi peserta didik sebagai subjek belajar yang memerlukan nilai itu.

Djemari Mardapi (2003 b: 8) mengatakan bahwa keberhasilan program pembelajaran selalu dilihat dari hasil belajar yang dicapai. Evaluasi pembelajaran memerlukan data tentang pelaksanaan pembelajaran dan tingkat ketercapaian tujuannya.

Hal ini tidak hanya terjadi di jenjang pendidikan tinggi, tetapi juga di pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi pembelajaran seringkali hanya didasarkan pada penilaian aspek hasil belajar, sementara implementasi program pembelajaran di kelas atau kualitas pembelajaran yang berlangsung maupun *input* program pembelajaran jarang tersentuh oleh kegiatan penilaian.

Penilaian terhadap hasil belajar selama ini pada umumnya juga terbatas pada *output*, sedangkan *outcome* jarang tersentuh kegiatan penilaian. Penilaian hasil belajar masih terbatas pada *output* pembelajaran, belum menjangkau *outcome* dari program pembelajaran. *Output* pembelajaran yang dinilai juga masih terfokus pada aspek kognitif, sedangkan aspek afektif kurang mendapat perhatian.

Demikian pula dengan pembelajaran sejarah selama ini yang hanya terfokus pada *hard skill* atau *academic skill*, kurang memperhatikan penilaian afektif yakni tentang nasionalisme, kepribadian, kesadaran sejarah, dan kepribadian sebagai hasil belajar sejarah.

Dampaknya, pembelajaran sejarah menjadi kering kurang menyentuh aspek yang substantif.

Pembelajaran sejarah sebagai sub-sistem dari sistem kegiatan pendidikan, merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan integritas dan kepribadian bangsa melalui proses belajar mengajar. Keberhasilan ini akan ditopang oleh berbagai komponen, termasuk kemampuan dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Sistem kegiatan pendidikan dan pembelajaran adalah sistem kemasyarakatan yang kompleks, diletakkan sebagai suatu usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam rangka untuk membangun dan mengembangkan diri (Banathy, 1992 : 175).

Dalam konteks yang lebih sederhana, pembelajaran sejarah sebagai sub sistem dari sistem kegiatan pendidikan, merupakan usaha pembandingan dalam kegiatan belajar, yang menunjuk pada pengaturan dan pengorganisasian lingkungan belajar mengajar sehingga mendorong serta menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan diri. Di dalam pembelajaran sejarah, masih banyak kiranya hal yang perlu dibenahi, misalnya tentang porsi pembelajaran sejarah yang berasal dari ranah kognitif dan afektif.

Kedua ranah tersebut harus selalu ada dalam pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah yang mengutamakan fakta keras, kiranya perlu mendapat perhatian yang signifikan karena pembelajaran sejarah yang demikian hanya akan menimbulkan rasa bosan di kalangan peserta didik atau siswa dan pada gilirannya akan

menimbulkan keengganan untuk mempelajari sejarah (Soedjatmoko, 1976 : 15).

Gagasan ini berkaitan dengan usaha untuk memahami bagaimana para siswa mendapatkan pengalaman dalam pembelajaran. Selama ini system evaluasi akhir yang cenderung hanya fokus pada hasil pembelajaran dengan parameter para pendidik. Gagasan ini mendorong inisiasi lahirnya masukan dan umpan balik dari mahasiswa untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan pembelajaran yang selama ini telah berlangsung. Oleh karena itu, sistem umpan balik tidak hanya berupa kesimpulan akhir perkuliahan, namun merupakan suatu proses dalam relasi pembelajaran-pembelajaran yang terus menerus.

Realitas yang selama ini terjadi, para pendidik hanya berkonsentrasi pada disseminasi materi tanpa mempertimbangkan bagaimana proses tersebut mempengaruhi peserta didik dan membentuk lingkungan pembelajaran. Sistem umpan balik yang efektif bermaksud menjembatani gap yang ada antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran dan pembelajaran. Pendidik selayaknya meluangkan waktu diakhir sesi kuliah untuk kesimpulan umum dan mengadakan dialog dengan peserta didik. Pola semacam ini memungkinkan terciptanya proses belajar mengajar yang kondusif (Carolyn Rekar Murno, 2005: 13).

Untuk itu, pembelajaran sejarah yang bersifat destruktif sebagaimana sering dijumpai di lapangan perlu diubah. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sartono Kartodirdjo (1982 : 86), yang mengungkapkan bahwa: "Apabila sejarah hendak tetap berfungsi dalam pendidikan, maka

harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi sosial dewasa ini. Jika studi sejarah terbatas pada pengetahuan fakta-fakta, akan menjadi steril dan mematikan segala minat terhadap sejarah”.

Sependapat dengan Sartono Kartodirdjo, Ahmad Syafii Maarif mengatakan bahwa, “pembelajaran sejarah yang terlalu mengedepankan aspek kognitif, tidak akan banyak pengaruhnya dalam rangka memantapkan apa yang sering disebut sebagai jati diri dan kepribadian bangsa” (Ahmad Syafii Maarif, 1995: 1).

Lebih jauh diungkapkan pula bahwa pembelajaran sejarah nasional yang antara lain bertujuan untuk mengukuhkan kepribadian bangsa dan integritas nasional sebagai bagian dari tujuan pergerakan nasional yang dirumuskan secara padat dalam Sumpah Pemuda 1928 diperlukan pemilihan strategi dan metode mengajar yang tepat. Aspek kognitif dan aspek moral perlu dianyam secara koherensi dan integratif, masing-masing saling menguatkan, tanpa harus mengorbankan watak ilmiahnya.

Menurut Taufik Abdulah (1996: 9), pembelajaran sejarah bukanlah rentetan peristiwa yang kering dan partikularistik, yang berhenti pada dirinya, dan seakan-akan partikel-partikel masing-masing berada dalam kevakuman. Sejarah tidak bisa ditampilkan sebagai rentetan “satu peristiwa yang diikuti oleh peristiwa yang lain”. Sehingga hal yang demikian ini baru dapat disebut kronologi.

Jika argumen ini hendak ditingkatkan, maka sebagai pelajaran, pembelajaran sejarah yang merupakan wacana intelektual itu harus menampilkan diri sebagai *art*, seni yang memberi kenikmatan intelektual. Seni sebagai *mode of discourse* terpantul dalam sistematika penyajian kisah dan gaya bahasa serta rasionalitas dalam pengajuan keterangan peristiwa.

Betapapun besarnya hasrat untuk memupuk aspirasi normatif tertentu, strategi pendidikan sejarah sebaiknya dimulai dengan pemahaman bahwa sejarah adalah sebuah corak wacana intelektual, yang kritis dan rasional, bukan khotbah yang memakai ilustrasi dengan kisah-kisah yang telah terjadi di masa lalu. Jika patokan awal ini dipakai, maka ada beberapa tahap atau tingkat kematangan intelektual yang dapat diterapkan kepada peserta didik.

Di satu pihak dapat menentukan "tingkat pemahaman sejarah", dan dipihak lain dapat memberikan "tingkat kekhususan pengetahuan kesejarahan". Kedua hal ini tentu saja berakibat pada bentuk wacana yang akan dipakai, dan "tingkat kecanggihan akademis dalam menerangkan peristiwa sejarah" atau yang disebut juga sebagai *level of explanation* (Suyatno Kartodirdjo, 2000: 29-33).

Dengan pembedaan yang jelas tentang sifat dan corak pembelajaran sejarah ini, kebosanan peserta didik untuk menerima "fakta" yang tampak sekilas sama pada setiap jenjang pendidikan dapat dihindarkan. Proklamasi kemerdekaan, umpamanya, mungkin sekali akan dibicarakan pada setiap jenjang pendidikan.

Tetapi, pada setiap jenjang pendidikan peristiwa itu akan tampil pada tingkat pengetahuan, pemahaman, serta pemberian keterangan sejarah yang semakin tinggi dan kompleks. Dengan itu setiap tingkat atau tahap diharapkan dapat memberikan keterangan dan kematangan intelektual baru.

Hill (1956: 12-13), merekomendasikan bahwa seorang pengajar sejarah seyogianya memiliki pengetahuan yang luas mengenai masalah-masalah kemanusiaan dan kebudayaan serta sebagai pengabdian perubahan dan kebenaran. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari belajar sejarah, di mana materi pembelajaran sejarah berhubungan erat dengan manusia dan segala permasalahannya. Tanpa menghubungkan dengan masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan, maka pembelajaran sejarah akan menjadi media penyampaian informasi yang kering dan tidak bermakna.

Pada ininya, tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan penanaman sikap mental atau nilai-nilai. Pencapaian tujuan belajar berarti akan menghasilkan hasil belajar. Adapun Hasil pembelajaran meliputi: 1) hal ikhwal keilmuan dan pengetahuan, konsep dan fakta (kognitif); 2) hal ikhwal personal, kepribadian atau sikap (afektif); dan 3) hal ikhwal kelakuan, keterampilan (psikomotorik) (Sardiman AM, 2007: 29).

Ketiga hasil di atas dalam pembelajaran merupakan tiga hal yang secara perencanaan dan programatik terpisah, namun dalam kenyataannya pada diri siswa akan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Ketiganya

itu dalam kegiatan belajar mengajar, masing-masing direncanakan sesuai dengan butir-butir bahan pelajaran (*content*). Karena semua itu bermuara pada anak didik, maka setelah terjadi proses internalisasi, terbentuklah suatu kepribadian yang utuh. Untuk itu semua, diperlukan sistem lingkungan yang mendukung.

Sesuai dengan kompleksitas dan globalnya kecenderungan dan perkembangan masyarakat Indonesia dalam perjalanan sejarahnya, maka sudah pada tempatnya apabila perspektif pengajaran sejarah berorientasi pada masa depan. Hal ini berarti akan memerlukan orientasi, atau mungkin lebih tepat perluasan wawasan pengajaran sejarah, yaitu dari orientasi pengajaran sejarah yang menekankan aspek masa kelampauannya (*past oriented*), perlu diperluas ke arah orientasi pengajaran sejarah berwawasan masa depan (*future oriented*) (Djoko Suryo, 2005: 3).

Penekanan wawasan pengajaran sejarah pada masa depan ini, pada dasarnya juga sesuai dengan hakekat tujuan pendidikan yang mempersiapkan kehidupan masa depan bagi generasi muda. Konsep masa lampau guru terbaik bagi masa depan, dapat menjadi salah satu perspektif dalam menempatkan konsep wawasan masa depan dalam pengajaran sejarah.

Oleh karena itu, adalah perlu untuk merumuskan paradigma baru dalam kajian dan pengajaran sejarah di Indonesia. Kajian dan pengajaran sejarah sebaiknya bertolak pada beberapa wilayah kajian yaitu:

1. Sejarah pemikiran dan filsafat keagamaan sebagai sumber eksplanasi tentang perubahan dan kelangsungan kehidupan makhluk.
2. Sejarah peradaban dan kebudayaan sebagai sumber pemahaman nilai dan makna kelangsungan dan perubahan hidup manusia dalam berdialog dengan lingkungan alam sekitar dan zamannya;.
3. Sejarah nasional dan sejarah lokal atau Indonesia makro dan mikro merupakan landasan penting bagi proses revitalisasi dan rekonstruksi masyarakat bangsa dan negara bangsa masa kini dan masa depan.
4. Sejarah sosial, atau sejarah masyarakat atau sejarah dari bawah (*history from bellow*) yang berpusat pada golongan tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan orang kecil akan melengkapi gambaran dinamika dan proses perkembangan masyarakat Indonesia secara luas dan lengkap serta kontinu.
5. Sejarah konstitusional Indonesia memberikan landasan pemahaman tentang demokrasi dan pembentukan masyarakat madani (*civil society*) (Djoko Suryo, 2005: 3).

Sedangkan dalam menyusun kurikulum sejarah yang sesuai dengan perubahan zaman, maka legalitas

pendidikan sejarah dalam kurikulum pendidikan nasional harus menekankan aspek-aspek penting materi pelajaran sejarah, di mana kurikulum harus menekankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pentingnya pengajaran sejarah sebagai sarana pendidikan bangsa,;
2. Sebagai sarana pembangunan bangsa secara mendasar
3. Menanamkan *national consciousness* dan *Indonesianhood* sebagai sarana menanamkan semangat nasionalisme
4. Perlunya pengakuan pemerintah akan pentingnya pendidikan sejarah sebagai sarana untuk membentuk jati diri dan integritas bangsa.
5. Rumusan sejarah sebagai mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga masa kini.

Oleh karena itu, pengajaran sejarah harus mampu mendorong siswa berpikir kritis-analisis dalam memanfaatkan pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami kehidupan masa kini dan yang akan datang; mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan

pilan untuk memahami proses perubahan dan keberlanjutan; dan berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran akan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat melalui dimensi waktu (Djoko Suryo, 2005: 4).

Bagi kalangan pendidik, mensikapi kebijakan Mendiknas tentang PP Nomor 7 Tahun 2005 tersebut, maka terdapat beberapa peluang dan strategi untuk mensiasatinya, agar proses pengajaran sejarah tidak terganggu. Pertama para pengajar tidak perlu terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang bersifat politik dan paradigmatik, melainkan justru harus semakin mandiri dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik.

Jadikan kurikulum sebagai salah satu referensi saja, bukan menjadi segala-galanya yang mengakibatkan kebingungan berkepanjangan. Jika hal itu dilakukan, maka guru akan semakin kreatif dan mampu bersikap kompetitif dan berani mengembangkan diri.

Di samping itu, guru juga harus mampu memanfaatkan peluang yang ada di sekitar institusi tempat menjalankan tugasnya. Guru tidak perlu menunggu kebijakan politik yang sifatnya *top-down* saja, tetapi harus bergerak cepat dalam memanfaatkan peluang bagi perkembangan profesi secara menyeluruh.

Sekadar contoh, ketika di lembaga tempat menjalankan tugas belum tersedia media pembelajaran yang memadai, maka bagaimana caranya guru mengupayakan media pembelajaran meskipun dalam bentuk yang sederhana. Guru yang demikian adalah guru yang

bertanggung jawab terhadap profesinya. Karena apabila sifatnya menunggu, maka barangkali kebijakan itu tidak akan pernah datang.

Begitu pula dalam perencanaan pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, serta sistem evaluasi, adalah tugas guru untuk mengembangkannya. Dengan demikian, pembelajaran menjadi sistemis dan sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh.

Jika memang kurikulum pengajaran sejarah untuk sementara waktu dikembalikan kepada kurikulum 10-094, ini merupakan jawaban sementara, yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan teknis pengajaran, sampai dengan perbaikan kurikulum 2004 untuk materi pelajaran sejarah diselesaikan oleh pihak departemen. Namun persoalannya masih berkisar pada kenyataan pengajaran yang masih menjadi polemik di berbagai kalangan. Kurikulum 1994 yang dibuat tidak rinci memang memberikan kebebasan pada guru agar mengembangkan kreativitas dan kebebasan dalam menentukan metode, media, strategi pembelajaran dan evaluasi.

Menurut Dennis Gunning, secara umum pengajaran sejarah bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, dan menyadarkan peserta didik untuk mengenal diri dan lingkungannya, serta memberikan perspektif historikalitas. Sedangkan secara spesifik, lanjut Gunning, tujuan pengajaran sejarah ada tiga yaitu, mengajarkan konsep, mengajarkan ketrampilan intelektual dan mem-

berikan informasi kepada peserta didik (Dennis Gunning, 1980: 179-180).

Dengan demikian, pengajaran sejarah tidak bertujuan untuk menghafal pelbagai peristiwa sejarah. Keterangan tentang kejadian dan peristiwa sejarah hanyalah merupakan suatu tujuan. Sudah barang tentu tujuan di sini dikaitkan dengan arah baru pendidikan, modern yaitu menjadikan peserta didik mampu mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi dirinya dan menyadari keberadaannya untuk ikut serta dalam menentukan masa depan yang lebih manusiawi bersama-sama dengan orang lain.

Bab V

ORIENTASI PEMBELAJARAN SEJARAH

Secara garis besar, terdapat dua variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, yakni ketersediaan dan dukungan *input* serta kualitas pembelajaran. *Input* terdiri dari siswa, guru, dan sarana serta prasarana pembelajaran. Kualitas pembelajaran adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi kualitas interaksi guru dengan siswa dalam proses pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Kegiatan belajar mengajar tersebut dilaksanakan dalam suasana tertentu dengan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran tertentu pula.

Oleh karena itu, keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung pada: guru, siswa, sarana pembelajaran, lingkungan kelas, dan budaya kelas. Semua indikator tersebut harus saling mendukung dalam sebuah sistem kegiatan pembelajaran yang berkualitas.

A. Kinerja Guru Sejarah

Dalam pembelajaran sejarah, Wiriaatmadja (1992: 66) menyatakan bahwa variabel guru merupakan faktor yang penting bagi keberhasilan pembelajaran sejarah. Guru sejarah yang tidak memiliki kinerja baik seperti tidak mampu mengaktifkan siswanya menyebabkan pembelajaran sejarah kurang berhasil untuk penghayatan nilai-nilai secara mendalam.

Hal serupa disampaikan oleh Taufik Abdulah dalam Supardan (2001: 67), bahwa pada umumnya guru sejarah belum menunjukkan kinerja yang baik, terbukti dengan masih banyaknya guru sejarah SMA yang dalam proses pembelajarannya masih suka menyampaikan "tumpukan" informasi tentang nama-nama tokoh, tanggal suatu peristiwa, dan isi perjanjian sebanyak mungkin, bukan bagaimana semua itu diartikan bagi peserta didiknya. Tentunya dalam konsepsi ini sebenarnya kualitas pembelajaran sejarah sebagaimana disampaikan oleh Helius Sjamsuddin (2005: 33) salah satunya harus didukung oleh kinerja guru yang menuntut banyak pikiran, tenaga, dan waktu bagi guru untuk persiapan, pelaksanaan, dan sampai kepada evaluasinya.

Mengacu pada beberapa konsepsi di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kinerja guru adalah faktor penting dalam mewujudkan kualitas pembelajaran. Ini berarti bahwa jika guru memiliki kinerja yang baik, maka akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, begitu juga sebaliknya.

Konsekuensinya adalah, ketika kualitas pembelajaran meningkat, maka hasil belajar siswa juga akan meningkat. Guru yang memiliki kinerja yang baik, akan mampu menyampaikan pelajaran dengan baik dan bermakna, mampu mampu memotivasi peserta didik, terampil dalam memanfaatkan media, mampu membimbing dan mengarahkan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa akan memiliki semangat dalam belajar, senang dalam proses pembelajaran, dan merasa mudah memahami materi pelajaran yang sampaikan oleh guru.

Menurut Mulyasa (2005: 37), paling kurang ada 19 peran guru dalam kegiatan pendidikan yakni peran guru sebagai: pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu, model dan teladan, peribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa ceritera, aktor, emansipator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulinator. Untuk menunjang tugasnya tersebut, maka guru harus memiliki kompetensi yang memadai.

Mulyasa (2005: 190-192) mengidentifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yakni kemampuan dasar (kepribadian), kemampuan umum (kemampuan mengajar), dan kemampuan khusus (pengembangan keterampilan mengajar). Kemampuan dasar meliputi: beriman dan bertakwa, berwawasan Pancasila, mandiri penuh tanggungjawab, berwibawa, berdisiplin, berdedikasi, bersosialisasi dengan masyarakat, dan mencintai peserta didik serta peduli terhadap pendidikannya. Kemampuan umum meliputi:

1. Menguasai ilmu pendidikan dan keguruan.
2. Menguasai kurikulum.
3. Menguasai didaktik metodik umum.
4. Menguasai pengelolaan kelas.
5. Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi peserta didik.
6. Mampu mengembangkan dan aktualisasi diri.

Sedangkan kemampuan khusus meliputi: keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, dan mengajar kelompok kecil dan perorangan.

Berdasarkan teori dan gagasan di atas, maka dapat direduksi dan disusun rumusan kompetensi guru SMA yang mengakomodasi perbedaan yang ada sehingga menghasilkan rumusan yang dianggap paling lengkap. Kompetensi guru SMA meliputi:

1. Penguasaan bidang studi atau bahan ajar.
2. Pemahaman karakteristik peserta didik.
3. Penguasaan pengelolaan pembelajaran.
4. Penguasaan metode dan strategi pembelajaran.

5. Penguasaan penilaian hasil belajar siswa.
6. Memiliki kepribadian dan wawasan pengembangan profesi.

B. Materi Pelajaran Sejarah

Kajian materi pembelajaran sejarah menurut Djoko Suryo (2005: 2), sebaiknya bertolak pada beberapa wilayah kajian yaitu:

1. Sejarah pemikiran dan filsafat keagamaan sebagai sumber eksplanasi tentang perubahan dan kelangsungan kehidupan makhluk.
2. Sejarah peradaban dan kebudayaan sebagai sumber pemahaman nilai dan makna kelangsungan dan perubahan hidup manusia dalam berdialog dengan lingkungan alam sekitar dan zamannya.
3. Sejarah nasional dan sejarah lokal atau sejarah Indonesia makro dan mikro merupakan landasan penting bagi proses revitalisasi dan rekonstruksi masyarakat bangsa dan negara bangsa masa kini dan masa depan.
4. Sejarah sosial, atau sejarah masyarakat atau sejarah dari bawah (*history from below*) yang berpusat pada golongan tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan orang kecil akan melengkapi

gambaran dinamika dan proses perkembangan masyarakat Indonesia secara luas dan lengkap serta kontinu.

5. Sejarah konstitusional Indonesia yang memberikan landasan pemahaman tentang demokrasi dan pembentukan masyarakat madani (*civil society*).

Dalam menyusun kurikulum pendidikan sejarah atau standar isi yang sesuai dengan perubahan zaman, maka legalitas pendidikan sejarah dalam kurikulum pendidikan nasional harus menekankan aspek-aspek penting materi pelajaran sejarah, di mana kurikulum harus menekankan:

1. Pentingnya pembelajaran sejarah sebagai sarana pendidikan bangsa.
2. Sebagai sarana pembangunan bangsa secara mendasar.
3. Menanamkan *national consciousness* dan *Indonesianhood* sebagai sarana menanamkan semangat nasionalisme.
4. Perspektif sejarah *the past-present-future* sebagai sarana menanamkan semangat nasionalisme.

5. *Historical consciousness* pada masa revolusi kemerdekaan, membentuk semangat nasionalisme dan solidaritas rakyat dalam mempertahankan negara RI.
6. Pengalaman sejarah bangsa sebagai pengetahuan penting dalam penyelenggaraan pendidikan bangsa.
7. Perlunya pengakuan pemerintah akan pentingnya pendidikan sejarah sebagai sarana untuk membentuk jati diri dan integritas bangsa.
8. Rumusan sejarah sebagai mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga masa kini (Djoko Suryo, 2005: 2).

Oleh karena itu, pembelajaran sejarah harus mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis-analisis dalam memanfaatkan pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami kehidupan masa kini dan yang akan datang; mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan untuk memahami proses perubahan dan keberlanjutan; dan berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran akan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat melalui dimensi waktu (Djoko Suryo, 2005: 3).

Pemilihan materi dan pengembangan tujuan pembelajaran sejarah tidak dapat hanya dipandang sebagai rutinitas. Di samping memerlukan pemahaman mengenai hakikat belajar sejarah dan wawasan mengenai nilai edukatif sejarah dalam kaitan dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, juga memerlukan kesungguhan dan ketekunan untuk melaksanakannya. Masalah ini menjadi semakin penting apabila seorang pengajar sejarah hendak mengembangkan atau melaksanakan strategi atau pendekatan baru dalam pembelajarannya, seperti halnya pendekatan garis besar kronologis dengan pendekatan tematis (Taufik Abdulah, 1996: 10).

Penetapan tujuan pembelajaran dan pemilihan materi pelajaran tidak akan membuahkan hasil secara optimal jika tidak dibarengi dengan pemilihan strategi dan metode mengajar yang tepat. Dalam pada itu, faktor lain yang perlu mendapat perhatian dalam memilih strategi dan metode mengajar adalah ada atau tidaknya sarana fungsional untuk mengetrapkan strategi dan metode tersebut.

Metode diskusi mungkin tidak lebih baik dari metode ceramah, apabila jumlah peserta didiknya besar dan belum memiliki fondasi pengetahuan yang memadai mengenai materi yang akan disampaikan. Oleh sebab itulah pembelajaran sejarah dimana aspek kognitif yang selalu menuntut fakta keras, dan dimensi moral yang memerlukan imajinasi teleologis, perlu diintegrasikan secara kohern-integratif, tanpa mengabaikan kaidah keilmuannya (Syafii Maarif, 1995: 1).

Pembelajaran sejarah, selain bertugas memberikan pengetahuan sejarah (kognitif), tetapi juga untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur bangsanya (apektif). Kedua hal ini tidak akan memiliki arti bagi kehidupan peserta didik pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang, apabila peserta didik tidak mampu memahami maknanya.

Mengingat setiap peserta didik memiliki kemampuan yang tidak sama untuk menangkap makna yang ada dibalik ceritera sejarah, maka setiap pengajar sejarah seyogianya selalu menekankan pada arti dan makna dari setiap peristiwa yang dipelajarinya. Hal ini menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan pendapat Sartono Kartodirdjo, 1982: 86) tentang fungsi pembelajaran sejarah, yaitu:

1. Untuk membangkitkan minat kepada sejarah tanah airnya.
2. Untuk mendapatkan inspirasi dari sejarah, baik dari kisah-kisah kepahlawanan baik peristiwa-peristiwa yang merupakan tragedi nasional.
3. Memberi pola berpikir ke arah berpikir secara rasional, kritis, dan empiris.
4. Mengembangkan sikap mau menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Hill (1956: 12), sejarah yang diajarkan dengan baik, dapat menjadikan seseorang bersikap kritis

dan berperikemanusiaan. Sebaliknya, jika sejarah diajarkan secara keliru, maka ia dapat mengubah manusia menjadi fanatik, dapat juga menjadi penganut aliran yang berlebih-lebihan.

Untuk itu, agar pembelajaran sejarah tetap relevan terhadap tuntutan pembangunan dan tuntutan jaman, maka pembelajaran sejarah perlu melakukan reorientasi perspektif pembelajarannya. Orientasi pemilihan masa lampau dalam pemilihan bahan dan interpretasi sejarah, perlu diimbangi dengan perluasan orientasi berwawasan masa depan.

Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mata pelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Materi sejarah memiliki arti penting dan makna yang sangat berharga bagi pembangunan bangsa, karena sesungguhnya materi sejarah memuat hal-hal berikut:

1. Mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik.
2. Memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia dan materi tersebut merupakan bahan

pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan.

3. Menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa.
4. Sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
5. Berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Adapun ruang lingkup materi sejarah berdasarkan Peraturan Mendiknas No. 22 tahun 2006 Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mata pelajaran sejarah untuk Sekolah Menengah Atas meliputi aspek-aspek yaitu:

1. Prinsip dasar ilmu sejarah.
2. Peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia.
3. Perkembangan negara-negara tradisional di Indonesia.
4. Indonesia pada masa penjajahan.

5. Pergerakan kebangsaan.
6. Proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan Indonesia.

Materi sejarah tersebut di samping dikembangkan secara faktual dalam KTSP, juga dikembangkan makna atau arti penting fakta-fakta tersebut bagi kehidupan siswa sebagaimana rambu-rambu berdasarkan standar isi.

Kuntowijoyo (1997: 66) menjelaskan bahwa sejarah itu pada dasarnya ialah ilmu *diakronis*, yang memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang yang terbatas. Dalam kajian *diakronis*, sejarah menjelaskan suatu peristiwa secara sistematis, dan menjelaskan secara faktual derajat kausalitas dari suatu peristiwa. Ini berkaitan dengan hukum sebab akibat, bahwa ada suatu peristiwa pasti ada yang menjadi penyebabnya.

Sartono Kartodirdjo (1992: 94) menjelaskan bahwa di antara teori-teori kausalitas yang banyak digunakan di masa lalu ialah teori-teori yang deterministik sifatnya; artinya kausalitas suatu peristiwa, keadaan, dan perkembangan dikembalikan kepada satu faktor saja. Faktor itu dipandang sebagai faktor tunggal atau satu-satunya faktor yang menjadi faktor kausal.

Ketika faham determinisme mulai melemah, maka disamping harus menjawab pertanyaan *when*, *where*, *what*, dan *how*, maka sejarah juga harus menjawab pertanyaan *why* dalam konteks non-deterministik atau perspektivisme. Dalam mencari kausalitas, maka

penekanannya adalah multikausalistik dan bukan monokausalistik.

Ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial, maka sejarah juga adalah ilmu *sinkronis*. Artinya, selain memanjang dalam waktu, sejarah juga melebar dalam ruang. Sejarah akan lengkap jika dibantu oleh ilmu-ilmu sosial lain dengan pendekatan multidimensi. Oleh karena itu, selain bersifat sistematis sebagaimana dalam *diakronis*, juga bersifat sistemik, artinya ada dimensi-dimensi lain yang mengkondisikan suatu peristiwa sejarah. Dengan demikian, maka lengkaplah sejarah tersebut.

Sejarah Baru yang lahir dari adanya perkembangan ilmu-ilmu sosial menjadi bukti bagaimana besar pengaruh ilmu-ilmu sosial pada sejarah. Pengaruh ilmu-ilmu sosial pada sejarah dapat digolongkan ke dalam empat macam yaitu: (1) konsep, (2) teori, (3) permasalahan, dan (4) pendekatan.

Namun demikian, penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam sejarah itu bervariasi yakni ada yang menolak sama sekali, menggunakan secara implisit, yang menggunakan secara eksplisit, di samping varian campuran dan keaburan batas. Akan tetapi, mereka yang tidak memakai ilmu-ilmu sosial pun setuju bahwa pendidikan ilmu-ilmu sosial amat penting karena ilmu-ilmu sosial akan mempertajam *insigh* sejarawan.

Dalam dimensi lain, di samping sejarah sebagai ilmu, maka sebenarnya sejarah juga adalah seni. Tanpa adanya imajinasi, maka sejarah tidak mungkin dapat ditulis. Kuntowijoyo (1997: 70) menjelaskan bahwa seni memberi karakterisasi bagi sejarah.

Untuk menjelaskan biografi sosok pahlawan nasional misalnya, maka seorang sejarawan harus menjelaskan watak seseorang. Kemudian seni memberi struktur dalam penulisan sejarah.

Sejarah yang ditulis secara sistematis, menunjukkan bahwa peristiwa tersebut jelas kausalistiknya. Setiap kali akan menulis suatu peristiwa, maka penulis selalu menuliskan latar belakang peristiwa itu. Perlu disadari bahwa teknik tersebut sebenarnya adalah teknik sastra yang disebut *freshadowing* atau pelukisan sebelum sebuah peristiwa.

Dalam mengembangkan materi sejarah sebagai sebuah mata pelajaran, maka tidak terlepas dari unsur generalisasi dalam sejarah. Kuntowijoyo (1997: 144) terdapat beberapa macam generalisasi dalam sejarah yaitu: generalisasi konseptual, personal, tematik, spatial, periodik, sosial, kausal, kultural, sistemik, dan struktural. Generalisasi konseptual berupa konsep yang menggambarkan fakta. Ketika orang mengatakan “revolusi”, bukan yang lainnya, seperti “pemogokan”, “pemberontakan”, maka dalam gambarannya adalah darah, pertempuran, orang yang diadili massa, pembelotan, dan pergantian pemimpin. Orang dapat memakai istilah “revolusi sosial”, “revolusi damai”, “revolusi petani”, dan lain sebagainya. Semua itu memiliki denotasi dan konotasi yang berbeda.

Generalisasi personal tentang seseorang atau pelaku peristiwa; tematik fokus pada tema tertentu; spatial mengenai tempat; periodik berkaitan dengan periodisasi;

sosial berkaitan dengan kelompok-kelompok sosial tertentu; generalisasi kausal mengenai sebab-musabab, generalisasi kultural terkait dengan budaya; generalisasi sistemik menyangkut masalah sistem dalam sejarah; dan generalisasi struktural terkait dengan struktur sosial yang ada.

Sartono Kartodirdjo (1992: 54) materi sejarah sebagai konstruk selalu merupakan suatu kesatuan yang koheren. Koherensi itu mengandung tuntutan bahwa unsur-unsur (fakta-fakta) terkumpul tetapi tidak lepas satu sama lain, yaitu adanya hubungan yang saling mengaitkan unsur-unsur itu, sehingga pada dasarnya ada saling ketergantungan (interdependensi), terutama fungsi-fungsinya.

Kesemuanya berfungsi untuk mendukung fungsi keseluruhannya. Konsep sistem dan pendekatan sistem dalam materi sejarah dapat memudahkan proses analisis dan sintesis, terutama dalam menunjukkan saling hubungan antara unsur-unsur atau dimensi-dimensi, yaitu bagaimana saling pengaruh mempengaruhi antara faktor ekonomi, sosial, politik, dan kultural.

Dengan demikian, ilmu sosial yang mempunyai perspektif *sinkronis* terhadap suatu gejala, maka sangat diperlukan bagi sejarah. Oleh karena itu menurut Sartono Kartodirdjo (1992: 57) sejarah dapat menggunakan dua pendekatan *diakronis* dan *sinkronis*, terutama apabila objek studi sejarah ditunjukkan pada suatu masyarakat atau lembaga sosial, maka untuk melacak perkembangan historis strukturnya mau tidak mau diperlukan kedua pendekatan tersebut.

Dalam konsep *diakronik*, selain memiliki derajat kausalistik, konstruktif, dan sistematik, sejarah juga memiliki aspek prosesual. Proses adalah aspek dinamis dari struktur dan sebaliknya, struktur adalah aspek statis dari proses. Proses sejarah senantiasa bergerak antara keduanya, segi prosesual mengarah ke pelembagaan atau strukturasi, sedang strukturasi adalah pengedepanan proses sebagai institusi atau lembaga.

Dipandang dengan perspektif ini jenis sejarah umumnya menampilkan proses dan struktur sosial (Sartono Kartodirdjo, 1992: 51). Sejarah deskriptif-naratif pada hakekatnya memberi gambaran segi prosesual, urutan kejadian, dan bagaimana perkembangan peristiwa mewujudkan unit prosesual tertentu.

Suatu yang tidak bisa dihindari ialah pendapat yang cenderung menghubungkan istilah naratif (*narrative*) dengan hasil akhir kerja sejarawan, yaitu presentasi hasil-hasil karyanya kepada pembaca; menafsirkan naratif hanya sebagai sebuah cerita (*story*) atau sebuah anekdot sejarah. Topolski (1990: 43) mengakui kenyataan bahwa di kalangan pendukung narativisme sendiri kategori narasi sejarah diartikan dan dianalisis dari beberapa perspektif yakni:

1. Semacam wacana, menyingkap tujuan-tujuan komunikatif, ekspresif, dan persuasif dari pengarang (sejarawan).
2. Seperangkat kode-kode komunikatif.

3. Ungkapan historis yang puitis.
4. Ungkapan bahasa kiasan dan retorik yang secara *a priori* mengendalikan sejarah.
5. Sebuah struktur makna-makna dalam pengertian semiotik struktural.

Setiap rekonstruksi sejarah menghasilkan suatu konstruk atau bangunan, gambaran atau gubahan. Setiap konstruk mengandung unsur-unsur subjek yang membuat konstruk itu. Dengan demikian, konstruk tidak mungkin sama dengan gambaran lengkap atau dari potret dari apa yang sesungguhnya terjadi.

Unsur-unsur yang sama-sama dicakup oleh kedua hal tersebut adalah fakta-fakta mengenai sejumlah peristiwa yang terjadi dalam suatu waktu tertentu. Oleh karena setiap konstruk senantiasa dituntut menghasilkan sesuatu yang utuh dan bulat, baik naratif maupun deskriptif, maka bagi penyusunan fakta-fakta menjadi kebulatan diperlukan tambahan unsur-unsur lain. Unsur itu ialah imajinasi sejarawan.

Pengungkapan multidimensional melalui pendekatan ilmu sosial akan mengungkapkan pula tidak hanya unsur-unsur kompleksitas gejala sosial-politik dalam sejarah, tetapi juga saling ketergantungan antara unsur-unsur itu. Dengan demikian, hubungan isomorfik (garis hubungan tunggal) dari kausalitas dapat dilengkapi dan diubah menjadi jaringan hubungan-hubungan.

Sartono Kartodirdjo (1992: 47) menegaskan bahwa proses politik sebagai kompleksitas hubungan antara pemimpin dan pengikut, otoritas dan ideologi, ideologi dan mobilisasi, solidaritas dan loyalitas, dan lain sebagainya kesemuanya akan mampu mengungkapkan pola distribusi pengaruh dan kekuasaan (*polity*) dalam kaitannya dengan pola distribusi komoditi (*economy*) serta dengan *society* sendiri (pola distribusi hubungan sosial). Kesemuanya itu didasarkan atas *culture* (pola distribusi nilai-nilai).

Kemudian muncullah pertanyaan apakah sejarah itu ilmu atau seni. Syafii Maarif (1997: 18) menjelaskan bahwa pendirian moderat yang mengatakan bahwa sejarah mengandung kedua dimensi ilmu dan seni lebih pantas untuk dipertahankan. Dari sudut metode pengumpulan dan penafsiran data, sejarah tidak berbeda dengan metode ilmu pada umumnya. Tetapi dalam teknik penyusunan laporan unsur imajinasi sejarawan memegang peranan penting.

Tentu saja bukanlah imajinasi liar, melainkan imajinasi historis yang dikontrol oleh hukum-hukum logika berdasarkan fakta. Karena imajinasi inilah maka karya sejarah dirasakan juga sebagai karya sastra. Dalam masalah bahasa bahasa sejarah sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan menampilkan keindahan bahasa meskipun tidak seperti dalam novel.

Untuk itu, dalam konteks KTSP guru sejarah harus mampu mengorganisasi materi atau bahan pelajaran sehingga mendukung kualitas pembelajaran sejarah.

National Institute for Educational Research 1999 (Nana Supriatna, 2007: 92) bahwa materi sejarah dimasukkan dalam kurikulum sekolah untuk membangun kohesi dan identitas nasional, serta pewarisan nilai, etika, dan budaya kepada peserta didik. Pengorganisasian materi berkaitan dengan penguasaan konsep atau tema besar yang diambil dari disiplin ilmu sosial serta penggunaan teori sejarah atau disiplin ilmu sosial.

Konsep perubahan (*change*), kesinambungan (*continuity*), konflik, revolusi, interdependensi, relasi sosial, status dan peranan, budaya, masyarakat, peradaban, dan lain-lain dapat menjadi tema dalam pembelajaran sejarah. Konsep dapat membantu memahami berbagai objek, peristiwa, gagasan, fenomena, serta dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Konsep dapat menjadi alat untuk menghubungkan pengalaman masa lalu masyarakat dengan kenyataan-kenyataan kontemporer. Ini memberi petunjuk bahwa materi sejarah di samping konseptual, faktual, prosesusal, juga kontekstual atau aktual.

Widja (1989: 38) menjelaskan bahwa materi atau isi pelajaran sejarah harus menjadi bagian penting yang harus diperhatikan guru sejarah. Materi pelajaran sejarah menekankan aspek waktu, ruang, dan tempat. Atas dasar batasan waktu, sejarah dapat dibedakan antara apa yang sering disebut "sejarah umum" dan "sejarah kontemporer".

Sejarah umum lebih menekankan tinjauan isi yang berisi gambaran evaluasi kehidupan manusia

dari perkembangan awal sampai masa kini; jadi tanpa batasan waktu yang tegas. Sedangkan yang kedua, dari namanya sudah jelas lebih menekankan materi yang berisi gambaran perkembangan peristiwa. Penekanan atas dasar ruangan atau tempat, memungkinkan membedakan antara sejarah yang menekankan materi dari lingkungan yang sempit (terbatas) dan sejarah dari lingkungan yang lebih luas.

Berdasarkan teori-teori tentang substansi materi sejarah di muka, maka dapat dirumuskan indikator-indikator materi pelajaran sejarah yang berkualitas dan baik untuk diterapkan di tingkat sekolah menengah. Pertama, materi sejarah disajikan berdasarkan perspektif *diakronis* dengan indikatornya adalah: sistematis, prosesual, kausalistik, faktual, dan konseptual.

Kedua materi sejarah dalam perspektif *sinsronis* yakni sistemik dan multidimensif atau multikausalistik serta konstruktif. Ketiga materi sejarah memiliki arti atau *meaning* yakni menunjukkan arti penting peristiwa dan kontekstual. Keempat naratif-deskriptif yakni sajian materi menarik dan bahasa menyenangkan atau tidak membosankan.

C. Metode Pembelajaran Sejarah

Metode menurut Winarno Surakhmad (Wiryawan, 2001: 15), merupakan cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Hal

ini berlaku bagi guru (metode mengajar) dan bagi siswa (metode belajar).

Semakin baik metode yang digunakan, maka semakin efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran. Tetapi kadang-kadang metode dibedakan dengan teknik, di mana metode bersifat prosedural, sedangkan teknik bersifat implementatif. Baik metode maupun teknik pembelajaran, merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Gerlach and Ely (1980: 186) dalam pemilihan metode pembelajaran, harus mempertimbangkan kriteria-kriteria yakni efisiensi, efektivitas, dan kriteria lain seperti tingkat keterlibatan siswa.

Temuan *National Assessment of Educational Progress* pada 1987, Diane Ravitch dan Chester Finn (Wilson, 2001: 231) menggambarkan kelas sejarah khas sebagai tempat murid menyimak pelajaran yang diberikan guru, menggunakan buku teks, dan mengerjakan ujian, kadang-kadang mereka disuguhi film, kadang-kadang mereka juga menghafal pelajaran atau membaca kisah tentang kejadian atau orang. Jarang mereka belajar bersama dengan murid kelas lain, menggunakan dokumen asli, menulis karangan, atau membahas makna dari apa yang mereka pelajari. Hal itu mengindikasikan bahwa pembelajaran sejarah sebaiknya dibangun oleh banyak kekuatan atau variasi metode pembelajaran sehingga fakta sejarah dapat dijelaskan dan maknanya dapat ditemukan.

Dalam pembelajaran sejarah, pendekatan konstruktivisme memungkinkan peserta didik melakukan dialog kritis dengan subjek pembelajar, menggali informasi

sebanyak mungkin dari berbagai sumber untuk melakukan klasifikasi dan prediksi serta menganalisis masalah-masalah sejarah termasuk masalah sosial yang kontroversial yang dihadapinya (Nana Supriatna, 2007: 93-94). Melalui pendekatan konstruktivistik, pengalaman masa lalu masyarakat bangsa dapat dianalisis dan ditarik hubungannya dengan masalah kontemporer.

Para peserta didik dapat memanfaatkan pengalaman belajar sebelumnya untuk mengkonstruksi pengetahuan baru, mengujicoba dan mengubahnya, serta menarik hubungan antara pengalaman masa lalu dengan kenyataan sosial sehari-hari. Cara berpikir konstruktivistik sehari-hari yang dikembangkan oleh Denzin dan Lincoln (1994: 312) dapat dirujuk dalam mengkonstruksi pengetahuan siswa:

“In a fairly unremarkable sense, we all constructivists if we believe that the mind is active in the construction of knowledge. Most of us would agree that knowing is not passive a simple imprinting of sense data on the mind but active; mind does something with these impressions, at the very least form abstractions or concepts. In this sense, constructivism means that human being do not find or discover knowledge so much as construct or make it. We invent concepts, models, and schemes to make sense of experience and, further, we continually test and modify these constructions in the light of new experience”.

Dalam pada itu, metode pembelajaran merupakan bagian integral dari strategi pembelajaran yang merupakan langkah-langkah taktis yang perlu diambil oleh pengajar sejarah dalam menunjang strategi yang hendak

dikembangkan. Dengan sendirinya perlu pula disadari bahwa seperti halnya dalam hubungan strategi mengajar, sasaran akhir dari pelaksanaan metode mengajar tidak lain dari apa yang tercantum dalam perencanaan suatu pembelajaran (*course planing*).

Pembelajaran sejarah yang diimplementasikan secara baik, tidak saja dapat mengembangkan kemampuan ranah kognitif pada peserta didik, melainkan juga dapat mengembangkan potensi dan menguasai ranah afektif, bahkan ranah psikomotor dan konatif yaitu ketersediaan bertindak sesuai dengan kemampuan ranah yang lain (G. Moedjanto, 1986: 6). Pembelajaran sejarah yang baik juga dapat menolong peserta didik untuk berpikir kritis dan komprehensif dan berafektif moral. Berpikir kritis inilah yang sebenarnya dapat menuntun peserta didik untuk memahami makna sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah umum.

Untuk itu, pembelajaran sejarah harus diorganisir dan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat nyata, menarik, dan berguna bagi diri peserta didiknya. Kegiatan belajar harus dilaksanakan dalam suasana yang penuh dengan tantangan, sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan belajar secara aktif atas inisiatifnya sendiri menuju kepada pemahaman dan keterampilan yang lebih baik serta terbentuknya sikap yang lebih berarti.

Dengan kata lain, masalah terpenting yang harus diperhatikan seorang guru dalam mengelola kegiatan proses belajar mengajar adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan proses belajar dengan baik. Di samping itu, guru sejarah seyogianya dapat

menentukan strategi kegiatan belajar mengajarnya secara tepat sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan hakikat belajar sejarah.

Pembelajaran sejarah hendaknya diselenggarakan sebagai suatu *avontuur* bersama dari pengajar dan yang diajar. Dalam konsep ini, maka bukan hafalan fakta, melainkan riset bersama antara pengajar dan peserta didik menjadi model utama.

Dengan jalan ini, maka peserta didik langsung dihadapkan dengan tantangan intelektual yang memang merupakan ciri khas dari sejarah sebagai ilmu. Demikian juga dilibatkan secara langsung pada suatu *engagement* baru dalam arti sejarah untuk hari ini (Soedjatmoko, 1984 : 67).

Meskipun metode yang dianjurkan tersebut cukup baik, namun pengajar sejarah yang hendak mencobanya perlu mempertimbangkan akan kegagalan atau keberhasilannya. Dengan kata lain, suatu metode yang dipilih harus selalu dipertimbangkan segi efektivitas dan efisiensinya. Keterlibatan peserta didik secara lebih aktif merupakan kecenderungan baru dalam proses belajar mengajar.

Kecenderungan semacam ini mungkin sudah banyak dilaksanakan oleh para pengajar sejarah, meskipun perlu dibuktikan kebenaran dan kesungguhannya. Apabila hal itu benar, maka peserta didik diharapkan akan lebih mampu untuk memahami hakekat belajar sejarah dan sekaligus merasa terlibat dalam proses belajar sejarah. Hal itu dilakukan oleh pengajar sejarah

dengan memeriksa kembali berbagai informasi dalam sumber-sumber belajar yang diandalkan (G. Moedjanto, 1999 : 19).

Dalam kegiatan belajar mengajar sejarah, seorang pengajar harus mampu menciptakan proses belajar mengajar yang dialogis, sehingga dapat memberi peluang untuk terjadinya atau terselenggaranya proses belajar mengajar yang aktif. Dengan cara ini, peserta didik akan mampu memahami sejarah secara lebih benar, tidak hanya mampu menyebutkan fakta sejarah belaka. Pemahaman konsep belajar sejarah yang demikian, memerlukan pendekatan dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, agar peserta didik benar-benar dapat mengambil manfaat dari belajar sejarah (Abu Suud, 1994 : 6).

Hasil belajar yang dimaksud adalah terjadinya perubahan dan perbedaan dalam cara berpikir, merasakan, dan kemampuan untuk bertindak serta mendapat pengalaman dalam proses belajar mengajar. Sistem penilaian mempengaruhi pola dan cara belajar siswa. Oleh karena itu, sistem penilaian harus direncanakan dengan matang oleh guru. Penilaian seperti halnya tes akhir sekolah sangat penting keberadaannya karena pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat ukur utama keberhasilan sebuah kebijakan di sektor pendidikan.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa metode mengajar merupakan bagian dari strategi pembelajaran yang merupakan langkah-langkah taktis yang perlu diambil guru dalam menunjang strategi yang hendak dikembangkan. Dengan sendirinya perlu pula

disadari bahwa seperti halnya hubungan strategi pembelajaran, sasaran utama dari pelaksanaan metode pembelajaran tidak lain dari apa yang tercantum dalam perencanaan suatu pembelajaran (*course planing*) (Widja, 1989: 41). Adapun beberapa metode utama yang dapat dikembangkan oleh guru sejarah dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut.

Pertama, metode reseptif. Metode ini terutama berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam lingkungan domain kognitif yang dalam hubungan sejarah berarti mengetahui fakta-fakta sejarah yang berupa aktivitas manusia di waktu yang lampau terutama yang memiliki makna penting bagi perkembangan masyarakat dan perjalanan sejarahnya. Metode ini meliputi ceramah, membaca buku teks sejarah, mendengarkan radio, menonton film, atau kegiatan reseptif lainnya.

Hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam situasi-situasi tertentu, metode ceramah bisa menjadi metode yang paling baik, efektif, dan efisien, tetapi dalam situasi lain bisa jadi sangat tidak efektif (Wiryawan, 2001: 126). Metode reseptif ceramah seyogyanya bisa dijadikan batu loncatan bagi pengembangan metode yang lain. Untuk itu guru sejarah harus kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran sejarah sehingga mampu mendorong antusiasme siswa untuk belajar sejarah.

Kedua, metode tanya jawab. Metode ini menyangkut pertanyaan-pertanyaan dan penyumbangan ide-ide dari pihak siswa. Kelebihan metode tanya jawab: kelas lebih

aktif karena siswa tidak hanya menjadi pendengar; memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya sehingga guru mengetahui hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa. Sedangkan kelemahannya perlu waktu banyak dan terkadang pertanyaan di luar materi pelajaran (Wiryawan, 2001: 129).

Ketiga, metode diskusi. Metode ini cara penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Metode ini terutama menekankan proses multiarah dalam pelaksanaan pembelajaran, yang mana berarti adanya usaha untuk mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut (Widja, 1989: 44).

Kebaikan metode diskusi siswa belajar bermusyawarah; siswa mendapat kesempatan untuk menguji tingkat pengetahuan masing-masing; belajar menghargai pendapat orang lain; mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Sedangkan kelemahannya adalah pendapat serta pertanyaan siswa dapat menyimpang dari pokok bahasan; kesulitan dalam menyimpulkan sering menyebabkan tidak ada penyelesaian; memerlukan waktu cukup banyak.

Keempat, metode kerja kelompok. Metode ini merupakan suatu kegiatan belajar mengajar di mana siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan pengajaran. Kelebihan metode kerja

kelompok: dapat memupuk rasa kerja sama; suatu tugas yang luas dapat segera diselesaikan; dan adanya persaingan yang sehat.

Sedangkan kelemahannya adalah: adanya sifat-sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri atau sebaliknya yang lemah merasa rendah diri dan selalu tergantung pada orang lain; apabila kecakapan tiap individu tidak seimbang, maka akan menghambat kelancaran tugas, atau didominasi oleh seseorang (Wiryawan, 2001: 139).

Kelima, metode sosio drama. Metode ini mengembangkan kreativitas siswa; memupuk kerja sama antara siswa; menumbuhkan bakat siswa dalam seni drama; siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri; memupuk keberanian siswa di depan kelas; melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat.

Sedangkan kelemahannya adalah adanya kurang kesungguhan para pemain yang menyebabkan tujuan tidak tercapai; pendengar atau siswa yang tidak berperan sering mentertawakan tingkah laku pemain sehingga merusak suasana.

Keenam, metode inkuiri. Edwin Fenton (1967: 262), mengemukakan bahwa berdasarkan observasi terhadap strategi pembelajaran yang dilakukan oleh para pengajar sejarah, ternyata strategi itu bergerak pada suatu kontinum dari strategi ekspositori sampai pada strategi inkuiri. Strategi ekspositori menunjukkan keterlibatan unsur guru secara penuh menuntut keterlibatan mental guru untuk

mampu memilih model dan metode mengajar yang sesuai dengan beban dan isi materi serta tujuan yang akan dicapai. Penentuan terhadap satu model mengajar akan membuka kemungkinan untuk menggunakan beberapa metode mengajar. Sedangkan strategi inkuiri menunjukkan keterlibatan siswa secara penuh dalam kegiatan belajar mengajar.

Dalam kegiatan belajar mengajar, metode inkuiri merupakan suatu strategi pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik untuk mendapatkan jawabannya sendiri (Soewarso, 2000: 57). Metode inkuiri adalah metode pembelajaran yang dalam penyampaian bahan pelajarannya tidak dalam bentuknya yang final, tidak langsung.

Artinya, dalam penyampaian metode inkuiri peserta didik sendirilah yang diberi peluang untuk mencari (menyelidiki/meneliti) dan memecahkan sendiri jawaban (permasalahan) dengan mempergunakan teknik pemecahan masalah. Sementara pengajar bertindak sebagai pengarah, mediator, dan fasilitator, yang wajib memberikan informasi yang relevan, sesuai dengan permasalahan atau materi pelajaran.

Hal tersebut dapat berlangsung dalam kelompok-kelompok kecil dalam kelas melalui diskusi dan bermain peran. Dalam kegiatan ini peserta didik dituntut aktif terlibat dalam situasi belajar. Peserta didik menyadari masalah, mengajukan pertanyaan, selanjutnya menghipunkan informasi sebelum mengambil keputusan (Munandar, 1995: 85).

Proses inkuiri dapat dimulai dengan mengajukan permasalahan-permasalahan yang kemudian harus dijawab dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan, baik berupa narasumber, buku-buku, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Dengan metode ini berarti peserta didik terdorong untuk melakukan penyelidikan, yang berarti ada minat intrinsik untuk belajar mendapat pemahaman atau pengetahuan. Pembelajaran dengan metode inkuiri menempatkan peserta didik ke dalam situasi yang mana mereka harus ikut serta dalam operasi-operasi intelektual yang terdapat di dalamnya (Beyer, 1999: 6).

Dalam penelitian pengembangan ini metode inkuiri merupakan metode yang penting diterapkan untuk mengerti dan memahami peristiwa-peristiwa sejarah terutama melalui proses penggalan oleh peserta didik. Oleh karena peristiwa sejarah hanya dapat dimengerti dan difahami secara mendalam jika dikaji melalui proses bertanya, yakni mengapa, siapa, di mana, apa, bagaimana, kemudian dirumuskan dalam hipotesis dan selanjutnya dicari jawabannya melalui teknik penyelidikan.

Melalui kepekaan terhadap masalah yang ada dalam peristiwa sejarah, memperjelas dan mencoba merumuskan dalam bentuk sebagai hipotesis, peserta didik akan bertanya dan menyelidiki fakta-fakta serta mengumpulkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari nara sumber atau yang terdapat dalam dokumen, buku-buku, majalah, kamus, gambar, dan kemudian menyimpulkannya. Dengan demikian peserta didik

akan memperoleh pemahaman kembali peristiwa sejarah secara mendalam. Jadi, dengan inkuiri peserta didik terlibat secara aktif, baik dalam proses mencari, menyelidiki, maupun dalam memperoleh pengetahuan, sehingga mampu mengembangkan sikap kritis dan sintesis (Asmawi Zainul, 2000: iv).

Menurut hasil penelitian Schlenker, dalam Dahlan (1999: 60), ternyata metode pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan, daya kreativitas, serta kemampuan mengolah informasi. Demikian pula penelitian Soetjipto (2001: 39), menyimpulkan bahwa inkuiri dapat mengimplementasikan *active learning methods*. Bertitik tolak dari konsep-konsep pembelajaran inkuiri serta dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang optimal terhadap fakta-fakta atau peristiwa sejarah yang menjadi sumber materi sejarah, maka dalam penelitian tindakan ini penulis berupaya mengoptimalkan cara kerja metode inkuiri tersebut dalam pembelajaran di kelas.

Penerapan metode inkuiri dalam penelitian ini, adalah mengikuti model yang telah dikembangkan oleh Massialas dan Cox. Adapun tahap-tahap dalam strategi inkuiri model Massialas dan Cox (Widja, 1989: 41) adalah:

1. Tahap pertama (orientasi) berisi kegiatan menetapkan masalah sebagai pokok bahasan yang akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.

2. Tahap kedua (hipotesis), merumuskan hipotesis sebagai acuan inkuiri.
3. Tahap ketiga (definisi), menguraikan dan memperjelas hipotesis.
4. Tahap keempat (eksploratif), berupa menguji hipotesis menurut logika, yaitu yang disesuaikan dengan implikasi dan asumsi.
5. Tahap kelima (pembuktian), mengumpulkan data dan fakta-fakta untuk membuktikan hipotesis.
6. Tahap keenam (generalisasi), yakni membuat kesimpulan sebagai pemecahan atau jawaban terhadap permasalahan yang dapat diterima kebenarannya.

Di samping itu, metode-metode yang cocok untuk kegiatan pembelajaran sejarah adalah metode karyawisata, pembelajaran luar kelas, metode latihan, *problem solving*, metode pemberian tugas, musyawarah kerja, simposium, seminar, dan lain sebagainya yang dapat dikembangkan oleh guru sejarah sesuai dengan karakteristik kelas sejarah yang dihadapi. Berdasarkan konsep, definisi, dan teori tentang metode pembelajaran sejarah, maka dalam penelitian ini dirumuskan indikator-indikator bahwa suatu metode dikatakan baik dan berkualitas apabila: sajian metode oleh guru beragam sesuai dengan karakteristik kelas, dinamis dengan adanya upaya pengembangan oleh guru sejarah, efektif, efisien,

dan kemenarikan penerapan metode pembelajaran sehingga membangkitkan minat, sikap, dan motivasi siswa untuk belajar sejarah.

D. Sarana Pembelajaran Sejarah

Di samping faktor kemampuan pengajar, pengembangan strategi belajar mengajar, sangat berkaitan erat dengan tersedianya fasilitas dan kelengkapan kegiatan belajar mengajar atau sarana pembelajaran, baik yang bersifat statis (seperti gambar, model, dan lain sebagainya) ataupun yang bersifat dinamis (seperti kehidupan yang nyata di sekitar peserta didik) (Widja, 1989: 37). Ini berarti, dalam pengembangan strategi pembelajaran sejarah, harus sudah diperhitungkan pula fasilitas atau sarana yang ada (perlu diadakan), sebab tanpa memperhitungkan itu semua, suatu strategi yang betapapun direncanakan dengan baik akan tidak efektif pula hasilnya. Juga dengan sendirinya diperhitungkan alokasi-alokasi waktu yang tersedia. Oleh karena itu, pengembangan suatu strategi pembelajaran sejarah berkaitan erat dengan usaha membuat perencanaan pembelajaran (*course planing*), di mana segala unsur-unsur yang menunjang strategi tersebut diperhitungkan dan dipersiapkan sehingga sasaran yang hendak dicapai melalui suatu strategi, dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.

Pemilihan strategi belajar mengajar itu, sebaiknya dilaksanakan atas pertimbangan yang matang, seperti tujuan yang ingin dicapai atau materi pembelajaran

yang akan disampaikan. Di samping itu, harus memperhatikan juga kemampuan pengajar dan peserta didik yang memainkan peranan dalam proses belajar mengajar, bentuk kegiatan yang dilakukan, serta sarana dan prasarana yang tersedia (Widja, 1989: 37). Faktor-faktor tersebut, sebenarnya saling mempengaruhi secara bervariasi sehingga setiap peristiwa belajar memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Keunikan inilah yang mengakibatkan tujuan belajar dapat tercapai secara berbeda antara lingkungan belajar yang satu dengan lingkungan belajar yang lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sarana pembelajaran merupakan segala sesuatu yang memudahkan terlaksananya kegiatan pembelajaran. Sarana pembelajaran meliputi ruang belajar, media pembelajaran dan sumber belajar. Pemanfaatan media pembelajaran secara optimal dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.

Sarana pembelajaran juga berpengaruh pada kinerja mengajar guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sarana pembelajaran yang baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi: ruang kelas yang memadai atau representatif, lengkap dan memadainya media pembelajaran, serta ketersediaan sumber-sumber belajar yang mendukung. Sarana pembelajaran secara umum dimaknai sebagai segala sesuatu yang mendukung kegiatan proses pembelajaran.

E. Iklim Kelas

Iklim kelas merupakan salah satu indikator penting yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran, di samping faktor-faktor pendukung lainnya. Dikatakan Hyman dalam (Hadiyanto & Subiyanto 2003: 8) dijelaskan bahwa iklim pembelajaran yang kondusif antara lain dapat mendukung:

1. Interaksi yang bermanfaat di antara peserta didik.
2. Memperjelas pengalaman-pengalaman guru dan peserta didik.
3. Menumbuhkan semangat yang memungkinkan kegiatan-kegiatan di kelas berlangsung dengan baik.
4. Mendukung saling pengertian antara guru dan peserta didik.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Moos dalam (Hadiyanto & Subiyanto 2003: 8) bahwa iklim sosial dapat berpengaruh terhadap kepuasan peserta didik dalam belajar, dan dapat menumbuhkembangkan pribadi. Berdasarkan pendapat tersebut jelas bahwa iklim kelas sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran, dan pada gilirannya berarti berpengaruh juga terhadap hasil pembelajaran (Widoyoko, 2007).

Kemudian dimensi pertumbuhan atau perkembangan pribadi yang disebut juga dimensi yang berorientasi pada tujuan menjelaskan tujuan utama kelas dalam

mendukung pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan motivasi diri. Skala-skala yang terkait dalam dimensi ini di antaranya adalah kesulitan (*difficulty*), kecepatan (*speed*), kemandirian (*independence*), kompetisi (*competition*).

Skala kecepatan, misalnya, mengukur bagaimana tempo (cepat atau lambat) pembelajaran berlangsung. Sedangkan dimensi perubahan dan perbaikan sistem menjelaskan sejauh mana iklim kelas mendukung harapan, memperbaiki kontrol dan merespon perubahan.

Skala-skala yang termasuk dalam dimensi ini di antaranya adalah formalitas (*formality*), demokrasi (*democracy*), kejelasan aturan (*rule clarity*), inovasi (*innovation*). Skala formalitas, misalnya, mengukur sejauh mana tingkah laku siswa di kelas berdasarkan aturan-aturan yang diterapkan dalam kelas (Widoyoko, 2007).

Mengacu pada beberapa penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa iklim kelas yang kondusif dan mendukung untuk kegiatan belajar mengajar, akan menjadikan siswa merasa senang dalam proses pembelajaran dan mampu dapat meningkatkan motivasi belajar, sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Dalam penelitian ini, iklim kelas yang dimaksud menyangkut segala keadaan yang muncul akibat hubungan antara guru dan siswa atau antar siswa berpengaruh pada proses belajar mengajar.

Berdasarkan beberapa pendapat dan teori di atas, indikator iklim kelas dalam penelitian ini meliputi ke-kompakan siswa (*student cohesiveness*) dalam kelas, keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar (*student involvement*), kepuasan siswa selama kegiatan pembelajaran (*student satisfaction*), dan dukungan guru (*teacher support*) dalam proses pembelajaran di kelas (Widoyoko, 2007).

F. Sikap Siswa

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Untuk itu diperlukan kecakapan dalam mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak lupa menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contoh atau model.

Dalam interaksi belajar mengajar guru akan senantiasa diobservasi, dilihat, didengar, ditiru semua perilakunya oleh para siswanya. Dari proses observasi siswa dapat saja siswa meniru perilaku gurunya, sehingga diharapkan terjadi proses internalisasi yang dapat menumbuhkan sikap dan proses penghayatan pada setiap diri siswa untuk kemudian diamalkan (Sardiman AM, 2007: 28).

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik, tidak akan terlepas dari soal penanaman nilai-nilai, *transper of values*. Oleh karena itu, guru tidak sekedar pengajar, tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan

memindahkan nilai-nilai itu kepada anak didiknya. Dengan dilandasi nilai-nilai itu, anak atau peserta didik akan tumbuh kesadaran dan kemauannya, untuk mempraktikkan segala sesuatu yang sudah dipelajarinya. Cara berinteraksi atau metode-metode yang dapat digunakan misalnya dengan diskusi, demonstrasi, sosiodrama, maupun *role playing*.

Berdasarkan berbagai pengertian di depan dapat dikemukakan bahwa sikap yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sikap berupa tendensi mental yang dapat diaktualkan baik secara verbal maupun tindakan dan kecenderungan afektif ke arah positif maupun negatif terhadap suatu objek. Pengertian tersebut memuat tiga komponen sikap, yaitu kognisi, afeksi dan konasi. Kognisi berkenaan dengan pengetahuan, pemahaman maupun keyakinan tentang objek, afeksi berkenaan dengan perasaan dalam menanggapi objek dan konasi berkenaan dengan kecenderungan berbuat atau bertingkah laku sehubungan dengan objek.

Dalam kaitannya dengan pelajaran sejarah, maka sikap peserta didik pada dasarnya sangat bervariasi dari sangat menyukai hingga sangat tidak menyukai. Kemungkinan adanya sebagian peserta didik yang menganggap pelajaran sejarah sebagai pelajaran yang membosankan, bukanlah suatu hal yang mustahil.

Hal ini mengakibatkan peserta didik kurang bergairah untuk mengikuti pelajaran sejarah di sekolah, tidak memiliki motivasi untuk mempelajari sejarah, dan pada gilirannya mereka tidak mampu memahami makna

sejarah bagi kehidupannya, baik masa kini maupun yang akan datang. Sikap peserta didik semacam ini dapat dijadikan indikator bahwa mereka tidak memiliki kesadaran sejarah dan menganggap belajar sejarah bukan sebagai kebutuhan.

Sebaliknya kemungkinan adanya sebagian siswa yang melihat pelajaran sejarah sebagai sesuatu yang menarik, yang aktual dalam kehidupan masa kini, kiranya bukanlah suatu hal yang dapat di sangkal begitu saja. Kelompok ini akan memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk mempelajari sejarah, baik di sekolah maupun di rumah. Mereka beranggapan bahwa belajar sejarah lebih merupakan sebagai suatu kebutuhan dari pada sebagai suatu kewajiban. Berapa persen jumlah kelompok ini dibanding dengan kelompok pertama, sulit untuk menentukan secara pasti.

Dalam konsepsi penelitian ini, sikap siswa terhadap pelajaran sejarah diartikan sebagai sikap mental yang diaktualkan terhadap mata pelajaran sejarah yang didasarkan pada pemahaman dan keyakinan serta perasaannya terhadap sejarah. Objek yang disikapi adalah mata pelajaran sejarah yang mencakup: pembelajaran sejarah dan materi pembelajaran sejarah.

Atas dasar pernyataan tersebut, kiranya cukup jelas bahwa apabila peserta didik memandang belajar sejarah sebagai suatu kebutuhan, maka mereka akan bersikap positif terhadap sejarah dan sebaliknya. Di samping itu sikap positif terhadap pelajaran sejarah juga dapat dikembangkan di kalangan peserta didik di SMA dengan

jalan memberikan informasi yang benar tentang sejarah dalam arti yang seluas-luasnya.

Apabila setiap guru telah memberikan informasi yang benar tentang hakikat belajar sejarah, maka peserta didik akan yakin akan manfaat belajar sejarah.

Sikap positif siswa dalam pembelajaran sejarah, memiliki sumbangan positif terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran sejarah. Siswa yang mempunyai sikap positif selama kegiatan belajar mengajar pada dasarnya memiliki semangat dan motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang sikapnya negatif.

Pada dasarnya, motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik, akan diikuti oleh intensitas belajar yang lebih baik sehingga pada gilirannya dapat memperoleh prestasi belajar yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kualitas proses dan hasil pembelajaran sejarah juga dipengaruhi sikap siswa terhadap pelajaran sejarah selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.

G. Motivasi Belajar Sejarah

Kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan).

Berawal dari kata motif itu maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif.

Motif menjadi aktif pada suatu saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak (Sardiman AM, 2003: 73). Sedangkan menurut Jackie Hill (2003: 40) motif diartikan sebagai pikiran-pikiran dan preferensi-preferensi tak sadar yang mendorong perilaku karena perilaku-perilaku adalah sumber kepuasan, seperti halnya dorongan berprestasi maupun ingin bekerja lebih baik.

Menurut SP. Siagian (2004: 161), pendapat yang dewasa ini dominan di kalangan para ilmuwan yang mendalami teori motivasi mengatakan bahwa berbagai kebutuhan manusia itu merupakan rangkaian, bukan hirarkhi. Dalam klasifikasi Maslow (SP. Siagian (2004: 161) sambil memuaskan kebutuhan fisiologis, seseorang butuh keamanan, ingin dikasihi oleh orang lain, mau dihormati dan akan sangat gembira apabila potensi yang masih terpendam dalam dirinya dikembangkan. Orang yang sudah menikmati keamanan fisik yang paling mantap sekalipun tetap perlu makan, pakaian dan tempat tinggal, tetap perlu diakui keberadaannya dan dalam rangka pemuasan kebutuhan sosial, tetap ingin dihormati dan tetap ingin berkembang.

Dalam terminologi Mc. Donald (Sardiman AM, 2003: 73), motivasi diartikan sebagai suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya "*feeling*" dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dalam konsepsi ini mengandung tiga elemen penting: pertama, bahwa motivasi

itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia.

Perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan energi di dalam sistem *neurophysiological* yang ada pada organisme manusia. Karena menyangkut perubahan energi manusia meskipun motivasi itu muncul dalam diri manusia, penampakkannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia.

Kedua, motivasi diawali dengan munculnya rasa atau *feeling* seseorang. Dalam konsepsi ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. Ketiga motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Dengan demikian motivasi ini sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, yakni tujuan.

Motivasi muncul dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang atau terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan. Oleh karena itu motivasi sebagai sesuatu yang kompleks, akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan.

Teori motivasi membahas faktor-faktor yang menentukan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Teori perilaku adalah teori mengenai:

1. Bagaimana perilaku didorong oleh kebutuhan dan harapan untuk mencapai tujuan yang bisa memuaskan tersebut.
2. Bagaimana pencapaian tujuan dan atau umpan balik atas pencapaian tersebut memperkuat perilaku yang berhasil.
3. Bagaimana keyakinan terhadap kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas tertentu akan mewujudkan perilaku yang diharapkan bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik (Michael Armstrong dan Helen Murlis, 2003: 50).

Proses motivasi bisa diawali oleh kesadaran seseorang atas tidak terpenuhinya suatu kebutuhan. Kemudian, orang tersebut menetapkan suatu tujuan, yang menurutnya akan memuaskan kebutuhan tadi. Tentu saja, kemudian orang tersebut menentukan tindakan yang diharapkan akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut.

Bisa juga, seseorang diberi suatu tujuan tertentu dan dibangkitkan harapannya bahwa pencapaian tersebut akan menenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Orang tersebut akan mengambil suatu tindakan dan kebutuhannya bila terpuaskan (Michael Armstrong dan Helen Murlis, 2003: 50).

Dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya. Karena itulah

terdapat perbedaan dalam kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi situasi tertentu dibandingkan dengan orang-orang lain yang menghadapi situasi yang sama. Bahkan seseorang akan menunjukkan dorongan tertentu dalam menghadapi situasi yang berbeda dan dalam waktu yang berlainan pula. Motivasi berbeda seseorang dengan orang lain dan dalam diri seseorang pada waktu yang berlainan (Sondang P. Siagian, 2004: 137).

Orang bisa dimotivasi dengan imbalan dan insentif yang memungkinkan untuk memuaskan kebutuhannya atau memberinya tujuan yang harus dicapai (sepanjang tujuan tersebut masuk akal dan bisa dicapai). Tetapi kaitan antara kebutuhan individu dan tujuan yang ditetapkan sangat luas kemungkinan dan variasinya sehingga sangat sulit, atau bahkan tidak mungkin, untuk diperkirakan secara tepat imbalan atau insentif apa yang mempengaruhi perilaku individu. Konteks sosial juga ikut mempengaruhi tingkat motivasi. Konteks sosial ini mencakup budaya organisasi secara umum, gaya manajemen, dan pengaruh individu atau tim terhadap individu (Michael Armstrong dan Helen Murlis, 2003: 50).

Dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada seseorang siswa, misalnya tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan, maka perlu diselidiki sebab-sebabnya. Sebab-sebab itu biasanya bermacam-macam, mungkin ia tidak senang, mungkin sakit, lapar, ada problem pribadi dan lain-lain. Hal ini berarti pada diri anak tidak terjadi perubahan energi, tidak terangsang

afeksinya untuk melakukan sesuatu, karena tidak memiliki tujuan atau kebutuhan belajar.

Keadaan semacam ini perlu dilakukan daya upaya yang dapat menemukan sebab permasalahannya kemudian mendorong seseorang siswa itu mau melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, yakni belajar. Dengan lain kata, siswa perlu diberi rangsangan agar tumbuh motivasi pada dirinya, atau perlu diberikan motivasi (Sardiman AM, 2007: 74-75).

Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Seorang yang memiliki intelegensia cukup tinggi boleh jadi gagal karena kekurangan motivasi.

Mengenai hal ini, tidak saja mempersalahkan pihak siswa, sebab mungkin saja guru tidak berhasil dalam memberi motivasi yang mampu memberikan semangat dan kegiatan siswa untuk belajar. Dengan demikian tugas guru adalah bagaimana mendorong para siswa agar pada dirinya tumbuh motivasi untuk belajar dan memiliki prestasi (Sardiman AM, 2007: 75-76).

Dengan demikian motivasi dapat disimpulkan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha meniadakan atau mengelakan perasaan tidak suka itu. Motivasi belajar memegang peranan yang

penting dalam memberi gairah, semangat dan rasa senang dalam belajar sehingga siswa yang mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar yang pada akhirnya akan mampu memperoleh prestasi yang lebih baik.

Jadi, motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu tumbuh di dalam diri seseorang. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.

Menurut Bernard (Sardiman AM, 2007: 76) dikatakan bahwa minat timbul tidak secara tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja. Jadi jelas bahwa soal minat akan selalu berkait dengan soal kebutuhan atau keinginan. Oleh karena itu yang penting bagaimana menciptakan kondisi tertentu agar siswa itu selalu membutuhkan dan ingin terus belajar untuk mewujudkan prestasi belajarnya.

McClelland (Widoyoko, 2007: 62) merumuskan secara operasional ciri-ciri perilaku individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dan individu dengan motivasi berprestasi rendah. Mereka yang memiliki motivasi tinggi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yakni:

1. Memperlhatikan berbagai tanda aktivitas fisiologis yang tinggi.
2. Menunjukkan kewaspadaan yang tinggi.
3. Berorientasi pada keberhasilan dan sensitif terhadap tanda-tanda yang berkaitan dengan peningkatan prestasi kerja.
4. Memiliki tanggung jawab secara pribadi atas kinerjanya.
5. Menyukai umpan balik berupa penghargaan dan bukan insentif untuk peningkatan kinerjanya.
6. Inovatif mencari hal-hal yang baru dan efisien untuk peningkatan kinerjanya.

Dalam teori psikoanalitik Freud, dikemukakan adanya beberapa ciri-ciri motivasi yang ada pada diri seseorang yakni menyangkut:

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai).
2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak mudah putus asa).
3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah.

4. Lebih senang bekerja mandiri.
5. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif).
6. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakni akan sesuatu).
7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu.
8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.

Apabila orang sudah memiliki ciri-ciri tersebut di atas, berarti orang tersebut selalu memiliki motivasi yang kuat. Ciri-ciri motivasi itu akan sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan berhasil dengan baik, kalau siswa tekun mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan berbagai masalah dan hambatan secara mandiri. Siswa yang belajar dengan baik tidak akan terjebak pada sesuatu yang rutinitas dan mekanis.

Siswa harus mampu mempertahankan pendapatnya, kalau ia sudah yakin dan dipandanginya cukup rasional. Bahkan lebih lanjut siswa harus juga peka dan responsif terhadap berbagai masalah umum, dan bagaimana memikirkan pemecahannya. Hal-hal itu semua harus dipahami benar oleh guru, agar dalam berinteraksi dengan siswanya dapat memberikan motivasinya yang tepat dan optimal (Sardiman AM, 2007: 84).

Motivasi belajar siswa dalam penelitian ini difokuskan pada motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi dimaknai sebagai dorongan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan maksimal berdasarkan standar tertentu yang merupakan ukuran keberhasilan atas tugas-tugas yang dikerjakan seseorang.

Dengan demikian standar keberhasilan merupakan kerangka acuan bagi individu yang bersangkutan pada saat ia belajar, menjalankan tugas, memecahkan masalah maupun mempelajari sesuatu. Adapun ciri-ciri motivasi berprestasi dapat direduksi menjadi empat komponen indikator yakni: 1) berorientasi pada keberhasilan, 2) bertanggung jawab, 3) inovatif, dan 4) mengantisipasi kegagalan. Keempat indikator ini dianggap dapat mewakili indikator-indikator lain sebagai hasil reduksi.

Bab VI

PENUTUP

Komponen penting yang paling berpengaruh terhadap keterpurukan pendidikan nasional Indonesia, adalah adanya politisasi bidang pendidikan. Meskipun ada ungkapan bahwa suatu kebijakan apapun yang sifatnya *top-down* tidak pernah terlepas dari adanya politisasi, namun intervensi yang terlalu jauh dan sarat oleh pelbagai kepentingan politik, dapat menimbulkan dampak yang deskruktif bagi bangunan suatu bangsa.

Ketertinggalan sektor pendidikan nasional dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, adalah fakta historis bahwa politik pendidikan memerlukan paradigma baru yang dapat mengangkat derajat pendidikan. Ini mengisyaratkan bahwa politisasi pendidikan harus segera disudahi, terutama yang menyangkut adanya kepentingan-kepentingan politik di dalamnya.

Dengan demikian, cara-cara berpikir baru dan terobosan-terobosan baru harus segera diperkenalkan dan diciptakan untuk mengatasi permasalahan pendidikan

pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, reformasi pendidikan dengan berbagai segmen-segmennya merupakan suatu kebutuhan dan juga suatu *imperative action*.

Pendidikan sejarah adalah salah satu bidang kajian yang paling banyak dipengaruhi oleh situasi politik nasional, terutama menyangkut materi pelajaran yang sarat dengan muatan-muatan politik. Materi sejarah digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dengan melakukan pembenaran-pembenaran sepihak terhadap fakta sejarah. Dampaknya, materi sejarah yang ada adalah sejarah versi penguasa yang memvonis masa lampau hanya berdasarkan terminologinya yang dipaksakan.

Subjektivikasi pendidikan sejarah ini lebih kentara terutama masa pemerintahan Orde Baru yang menjadikannya sebagai alat kekuasaan yang bersifat militeristik. Sentralisasi kurikulum yang membungkam aspirasi arus bawah adalah bukti bahwa pemerintah membuat kerangka politik yang subjektif untuk menyeragamkan pola pikir, sikap dan perilaku siswa.

Dalam kurikulum sentralistis tersebut, kebhinnekaan yang menjadi ciri khas rakyat Indonesia terabaikan, dan berdampak pada tercerabutnya siswa dari praktek budaya dan kebutuhan riil siswa di tempat tinggalnya. Terlebih sentralisasi kurikulum sejarah yang “membutakan” siswa dari sejarah daerahnya, sementara siswa harus belajar sejarah nasional dan dunia yang penuh manipulatif.

Masalah mutakhir yang menyangkut kurikulum sejarah, adalah penundaan implementasi kurikulum 2004 melalui PP Nomor 7 Tahun 2005. PP tersebut menjelaskan bahwa khusus untuk materi pelajaran sejarah dan buku teks sejarah versi kurikulum 2004, implementasinya ditangguhkan, sampai selesai dilakukan perbaikan-perbaikan.

Pokok pangkal yang menjadi problematika krusial adalah bahwa materi pelajaran sejarah dinilai tidak memuat secara terperinci masalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan demikian Komisi X DPR dalam rapat kerja dengan Mendiknas pada tanggal 17 Juni 2005 mendesak Mendiknas agar menangguhkan implementasi kurikulum 2004 sejarah, dan merevisinya dengan memasukkan persoalan seputar pemberontakan PKI secara menyeluruh.

Kebijakan ini merupakan langkah mundur mengingat kurikulum sejarah 1994 suplemen 1999 sudah cukup objektif dalam menampilkan suatu peristiwa, terutama masalah peristiwa Gerakan Tiga Puluh September (Gestapu) 1965 yang tidak mencantumkan lagi nama PKI dibelakangnya G30S. Lebih dari sekedar itu, suplemen 1999 juga tidak menyebut lagi PKI sebagai pelaku G30S. Dalam suplemen 1999, dikatakan bahwa dalang Gestapu dapat saja PKI, CIA AS, Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto, tidak menyebutkan salah satu dari itu adalah dalang Gestapu.

Peristiwa-peristiwa yang menjadi polemik dalam masyarakat, seperti halnya yang berkaitan dengan peristiwa Gestapu, tentu saja itu merupakan peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Di sini persoalannya bagaimana penjelasan terhadap peristiwa itu, dan pelbagai hal lainnya yang terkait dengan era Orde Baru yang kontroversial, mampu dijelaskan secara memadai dan proposional.

Suatu yang pertama kali harus dilakukan, bagaimana peristiwa masa lampau itu dijelaskan dengan menggunakan “pengetahuan sejarah”, yang menyangkut keseluruhan *historical discourse* yang berisikan bukan hanya fakta-fakta yang telah lulus dalam kritik teks, namun berita-berita lain yang menjadi bahan perdebatan atau kontrovensi dalam masyarakat, sehingga akan mengarah kepada persoalan pokok utama dari peristiwa itu, yang kemudian akan dijawab secara gamblang oleh guru, dikaitkan dengan proses pembentukan bangsa (*nation formation*).

Wacana tentang masa lampau bukan hanya sekedar akan melahirkan pengetahuan sejarah, pada gilirannya juga akan menuntut untuk tidak dipisahkan dari dorongan masyarakat terhadap lahirnya peristiwa sejarah itu, dimana sejarah selalu dilahirkan oleh kontemplasi tentang “nasib kemanusiaan”. Persoalan yang berkaitan dengan ketepatan faktual (*historical truth* atau *historical certainty*) adalah dengan menerapkan ilmu sejarah kritis, sehingga akan memilahkan persoalan itu antara bersifat akademis dan yang bersifat politis.

Pada tingkat ini, sebenarnya persoalan yang dijadikan bahan polemik di sekitar peristiwa Gestapu dan lahirnya pemerintahan rejim Orde Baru, umumnya harus berkisar pada sebuah jalur politik tentang proses peralihan kekuasaan (dari Orde Lama ke Orde Baru), yang sebenarnya bukan semata-mata soal waktu yang objektif, tetapi juga terkait dengan situasi psikologi yang unik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Suud. (1994). "Format metodologi pengajaran sejarah dalam transformasi nilai dan pengetahuan". *Makalah seminar nasional memantapkan format metodologi pendidikan sejarah dan sosialisasi kurikulum 1994*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- A. Fanar Syukri. (2007). *Peran pemuda dalam 20 tahunan Sikus nasionalisme Indonesia (refleksi 75 tahun Soempah Pemoeda, 1928-2003)*. Dalam <http://ppi-jepang.org/article.php?id=1>. Diakses tanggal 2 Agustus 2007.
- Ahmad Syafii Maarif. (1995). "Historiografi dan pengajaran sejarah Indonesia". *Makalah dalam seminar nasional tentang "demitologi pemahaman sejarah masa kini dalam rangka pendewasaan pengetahuan sejarah bangsa"*. Padang: FPIPS IKIP Padang.
- (2006). "Keterkaitan antara sejarah, filsafat, dan agama", dalam *Kearifan sang profesor: bersuku-suku bangsa untuk kenal-mengenal*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.

- Aman. (2006). "Pemikiran Hatta tentang demokrasi, kebangsaan, dan hak asasi manusia". Dalam *Mozaik, jurnal ilmu-ilmu sosial dan humaniora, volume 1 nomor 1, Juli 2006*. Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah.
- Amstrong Michael and Helen Murlis. (2003). *Reward management: a hand book of remuneration strategy and practice*. Jakarta: Gramedia.
- Anastasius Daliman. (1988). "Peranan pendidikan sejarah dalam proses sosialisasi sikap nasionalisme", dalam *jurnal kependidikan majalah ilmiah penelitian pendidikan NO.2 tahun ke-18*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- .(2003). "Model perkuliahan berdasarkan konsep kinerja pada pembelajaran sejarah", dalam *jurnal kependidikan majalah ilmiah penelitian pendidikan no.II tahun XXXIII November 2003*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- .(2006). "Harmonisasi antara nasionalisme dalam kehidupan bernegara dan beragama", dalam *kearifan sang profesor*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.
- Hassan. (1984). *Islam dan kebangsaan*. Bangil: Lajnah Penerbitan Pesantren Persis Bangil.
- Anhar Gonggong. (1996). "Nasionalisme: tinjauan kritis dengan wawasan sejarah". Yogyakarta: *Makalah Seminar Nasional Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Yogyakarta*.

- Ankersmith, F.R. (1987). *Refleksi tentang sejarah: pendapat-pendapat modern tentang filsafat sejarah*, alih bahasa Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asmawi Zainul & Noehi Nasoetion. (1997). *Penilaian hasil belajar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Asmawi Zainul.(2004). *Penerapan asesmen alternatif dalam pembelajaran sejarah lokal*. Dalam *Historia, jurnal pendidikan sejarah nomor.9. volume v, Juni 2004*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Banathy, Bela H. (1992). *A systems view of education: concepts and principles for effective practice*. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.
- Bloom, B. (1976). *Human characteristics and school learning*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Carr, Edwar H. (1972). *Whats is history*. New York: Alfred A. Knopt.
- Coburn, E. Cynthia. (2005). *The role of nonsystem action in the relationship between policy and practice: the case of reading instruction in california. analysis and evaluation education journal*.
- Collingwood, RG. (1973). *The idea of history*. London: Oxford University Press.

- C. Wijaya. (1992). *Upaya pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dadang Supardan. (2001). "Kreativitas guru sejarah dalam proses pembelajaran: studi kasus di SMU Kotamadya Bandung", dalam *historia no. 3 volume II*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah UPI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- .(2001). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen Depdiknas.
- .(2003). *Sistem penilaian kelas SD, SMP, SMA, dan SMK.* Jakarta: Depdiknas.
- .(2006). *Peraturan mendiknas nomor 22 tahun 2006*. Jakarta: Depdiknas.
- Djemari Mardapi. (2000). *Evaluasi pendidikan*. Makalah disampaikan pada Konvensi Pendidikan Nasional tanggal 19–23 September 2000 di Universitas Negeri Jakarta.
- .(2003 a). *Kurikulum 2004 dan optimalisasi sistem evaluasi pendidikan di sekolah*. Makalah disampaikan pada seminar nasional kurikulum 2004 berbasis kompetensi, tanggal 10 Januari 2003 di UAD.

- .(2003 b). "Desain dan penilaian pembelajaran mahasiswa". *Makalah disajikan dalam lokakarya sistem jaminan mutu proses pembelajaran*, tanggal 19 Juni 2003 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Djoko Suryo. (1989). " Kesadaran sejarah: sebuah tinjauan". Dalam *historika no.2 tahun ke I*. Surakarta: PPS FPS IKIP Jakarta KPK UNS Surakarta.
- .(2005). "Paradigma sejarah di Indonesia dan kurikulum sejarah", dalam *makalah seminar nasional dan temu alumni program studi pendidikan sejarah Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Surakarta: PPS UNS.
- E. Mulyasa. (2005). *Menjadi guru profesional: menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fernandes, H.J.X. (1984). *Evaluation of educational programs*. Jakarta: National Educational Planning Evaluation and Curriculum Development.
- Frederick, WH. dan Soeri Soeroto. (ed). (1982). *Pemahaman sejarah Indonesia sebelum dan sesudah revolusi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan dan Ekonomi Sosial.
- Freire, Paulo. (1999). *Politik pendidikan: kebudayaan, kekuasaan, dan pembebasan*. Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Gazalba, Sidi. (1966). *Sedjarah sebagai ilmu*. Djakarta: Bhratara.
- Gerlach V.S. at.al. (1980). *Teaching and media: a systematic approach*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- G. Moedjanto. (1986). "Sejarah sebagai sarana pendidikan nilai kebijaksanaan". Semarang: *makalah seminar FPIPS IKIP Semarang*.
- .(1989). "Kesadaran sejarah dan indikatornya". Dalam *historika no.2 tahun ke 1*. Surakarta: PPS FPS IKIP Jakarta KPK UNS Surakarta.
- .(1999). "Reformasi pengajaran sejarah nasional". *Kompas. 1 Mei 1999*.
- Gottschalk, Louis. (1969). "Understanding history: a primer of historical method", alih bahasa Nugroho Notosusanto, *Mengerti sejarah: pengantar metode sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Gunning, Dennis. (1978). *The teaching of history*. London: Cronhelm.
- Hamid Hasan. (1998). *Pendidikan ilmu sosial*. Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, Ditjen Dikti, Depdikbud.
- Haryati Soebadio. (1985). "Sejarah sebagai ilmu", dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *pemikiran tentang pembinaan kesadaran sejarah*.

Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah.

Hariyono. (1992). "Pengajaran sejarah dan egenwelt subjek-didik". *Historika. no.1 vol 1*. Surakarta: PPs Pendidikan Sejarah IKIP Jakarta KPK Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Helius Sjamsuddin. (2005). *Model-model pengajaran sejarah: beberapa alternatif untuk SLTA*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah UPI.

Herminarto Sofyan. (2008). *Optimalisasi pembelajaran berbasis kompetensi pada pendidikan kejuruan teknik otomotif*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Hill, C.P. (1956). "Sugestions on the teaching of history". Alih Bahasa Haksan Wira Sutisna, *saran-saran tentang mengajarkan sejarah*. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P. dan K.

Hill, Jackie. (2003). *People and competencies: the route to competitive advantage*. Jakarta: Gramedia.

Husain Haikal. (1989). *Tutwurihandayani dalam pendidikan sejarah: suatu penelitian kepustakaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikti PPLPTK.

Hutahaeon, B. (2005). *Pengembangan model evaluasi kurikulum multidimensi untuk KBK*. Bandung: Disertasi tidak diterbitkan, IKIP Bandung.

- I Gde Widja. (1989). *Pengantar ilmu sejarah: sejarah dalam perspektif pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.
- .(1989). *Dasar-dasar pengembangan strategi serta metode pengajaran sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Karmon Sigalingging. (2009). *Model evaluasi kreativitas lomba kompetensi siswa sekolah menengah kejuruan*. Yogyakarta: Disertasi tidak diterbitkan, PPS UNY.
- Kaufman, R. and Susan, T. (1980). *Evaluation without fear*. New York: New View Point.
- Kohn, Hans. (1965). *Nationalism: its meaning and history*. New York: D Van Nostrand Company.
- Krathwohl, David R., et.al. (1980). *Taxonomy of educational objectives*. New York and London: Longman.
- Kun Setyaning Astuti. (2009). *Pengembangan model evaluasi pembelajaran dalam perspektif penciptaan makna baru pada grup nasyid Provinsi DIY*. Yogyakarta: Disertasi tidak diterbitkan PPS UNY.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana dan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.

- .(1995). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Mansur Muslich. (2008). *KTSP pembelajaran berbasis kompetensi dan kontekstual: panduan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manullang. (1991). *Pengembangan motivasi berprestasi*. Jakarta: Pusat Produktivitas Nasional. Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- Muhammad Imarah. (1998). *Perang terminologi Islam versus Barat*. Jakarta: Robbani Press.
- Nana Sudjana. (1992). *Penelitian hasil proses belajar mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- .(2002). *Dasar-dasar proses belajar dan mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Nana Sudjana dan Ahmad Rivai. (2005). *Media pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Nana Supriatna. (2001). "Pengajaran sejarah yang konstruktivistik". Dalam *historia, jurnal pendidikan sejarah, nomor.3. volume II, Juni 2001*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- .(2007). *Konstruksi pembelajaran sejarah kritis*. Bandung: Historia Utama Press.

- Ormrod, J.E. (2003). *Educational psychology, developing learners fourth edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Padmo Wahyono. (1992). "Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan". Dalam Moerdiono, dkk, *pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*. Jakarta: BP7-Pusat.
- Putri Angreni. (2006). "Model evaluasi kinerja karyawan lulusan pendidikan formal dan non formal kepariwisataan". Yogyakarta: *Disertasi Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Reiner, G.J. (1961). *History: its purpose and method*. London: George Allen and Unwim, ltd.
- Rekar Munro, Carolin. (2005). "*Best practices*" in teaching and learning: challenging current paradigms and redefining their role in education. *The College Quarterly*. 8 (3), 1 – 7.
- Rizal. (2007). *Evaluasi program sekolah lapangan pengendalian hama terpadu (SLPHT) padi di Kabupaten Jember*. Yogyakarta: *Disertasi tidak diterbitkan, PPS UNY*.
- R.M. Ali. (1961). *Pengantar ilmu sejarah*. Jakarta: Bhatara.

- Rochiati Wiriaatmaja. (2004). "Multicultural perspective in teaching history to the Chinese Indonesian Studies", dalam *historia: jurnal pendidikan sejarah*, no.9 vol.v. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah UPI.
- .(2002). *Nasionalitas, etnisitas, dan integrasi bangsa dalam pembelajaran sejarah*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Saifuddin Azwar. (2005). *Sikap manusia, teori dan pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sardiman AM. (2006). "An alternative model of curriculum of social science' *international journal of social studies Vol.2.No.1*.
- .(2007). *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sartono Kartodirdjo. (1968). "Beberapa fatsal dari historiografi Indonesia", dalam *lembaran sejarah*. Jakarta: PPLPTK.
- . (1982). *Pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia: suatu alternatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- . (1989). "Fungsi sejarah dalam pembangunan nasional", dalam *historika no.1 tahun I*. Surakarta: Program Pasca Sarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta KPK Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- . (1992). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- . (1994). *Pembangunan bangsa, nasionalisme, kesadaran sejarah, dan kebudayaan nasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- . (1999). *Multidimensi pembangunan bangsa etos nasionalisme negara kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- S. Eko Putro Widoyoko. (2007). *Pengembangan model evaluasi pembelajaran IPS di SMP*. Yogyakarta: Disertasi Program Pasca Sarjana Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Soedjatmoko. (1976). "Kesadaran sejarah dalam pembangunan". *Prisma* No. 7. Jakarta.
- . (1984). *Dimensi manusia dalam pembangunan: pilihan karangan*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- . (1995). "Sejarawan Indonesia dan jamannya", dalam Soedjatmoko, dkk., (ed), *historiografi Indonesia sebuah pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Slamet PH. (2005). *Kapita selekta desentralisasi pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

- Sondang P. Siagian (2004). *Teori motivasi dan aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Anitah Wiryawan. (2001). *Strategi belajar mengajar*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Stufflebeam, D.L. (2003). *The CIPP model for evaluation*, the article presented at the 2003 annual conference of the Oregon program evaluators network (OPEN) 3 Oktober 2003. Diambil pada tanggal 25 Oktober 2005, dari <http://www.wmich.edu/evalctr/cippmodel>.
- Sulfikar Amir. (2007). *Efistomologi nasionalisme*. Diambil pada <http://kompas.com/kompas-cetak/0411/03/Bentara/1363295.htm>. Diakses tanggal 2 Agustus 2007.
- Suyatno Kartodirdjo. (2000). "Teori dan metodologi sejarah dalam aplikasinya", dalam *historika*, no.11 tahun XII. Surakarta: Program Pasca Sarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta KPK Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Suharsimi Arikunto. (1988). *Penilaian program pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- . (2001). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto. & Cepi Safruddin AJ. (2004). *Evaluasi program pendidikan, panduan teoritis praktis bagi praktisi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sukamto. (2004). "Pengembangan sistem penilaian untuk sertifikasi guru". *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Rekayasa Sistem Penilaian dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Yogyakarta pada tanggal 26 dan 27 Maret 2004.
- Sumarna Surapranata & Muhammad Hatta. (2004). *Penilaian portofolio*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Takeshi, Tsuchiya. (2006). "Develoving Communication skill in teaching of history as part of social sciences". *International Journal of Social Studies Vol.2.No.1*.
- Taufik Abdullah. (1985). "Pembinaan kesadaran dan penjernihan sejarah", dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *pemikiran tentang pembinaan kesadaran sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah.
- . (1996). "Perdebatan sejarah dan tragedi 1965", dalam *jurnal sejarah 9: pemikiran, rekonstruksi, dan persepsi*. Jakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia.
- . (1996). *Sejarah lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- . (2001). *Sejarah lokal di Indonesia: kumpulan tulisan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Tim Pengembang Sertifikasi Kependidikan. (2004). *Pedoman sertifikasi kompetensi pendidik*. Jakarta: Bagian Proyek PPTK Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional.
- Udin S Winata Putra. (1992). *Model-model pembelajaran*. Jakarta: Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen .
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wilson, Suzane M. (2006). "Model kearifan dalam mengajar sejarah", dalam Sam Winerburg, *berpikir historis: memetakan masa depan, mengajarkan masa lalu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Winarno Surakhmad. (2000). *Metodologi pengajaran nasional*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- Winkel, W.S. (1996). *Psikologi pengajaran*. Jakarta: Grasindo.
- Zamroni. (2001). *Paradigma pendidikan masa depan*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.

Zamroni, (2005). "Mengembangkan kultur sekolah menuju pendidikan yang bermutu". *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Mengembangkan Kultur Sekolah di Yogyakarta pada tanggal 23 Nopember 2005.

(A. Fanar Syukri, dalam <http://ppi-jepang.org/article.php?id=1>. Diakses tanggal 2 Agustus 2007).

(<http://ms.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2007).

(<http://re-searchengines.com/isjoni12.html>, diakses tanggal 18 Maret 2008).

<http://farhanzen.wordpress.com/2007/12/13/menejemen-kinerja-seorang-guru>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2008.